



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DI KOTA BEKASI**

TESIS

**KUSNAENI WIDYANINGSIH
NPM 0906586606**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
DESEMBER 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DI KOTA BEKASI**

TESIS

**KUSNAENI WIDYANINGSIH
NPM 0906586606**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
DESEMBER 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 27 Desember 2010



(KUSNAENI WIDYANINGSIH)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kusnaeni Widyaningsih

NPM : 0906586606

Tanda Tangan : 



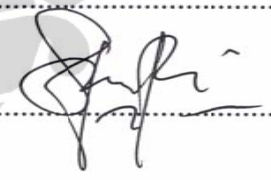
Tanggal : 27 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Kusnaeni Widyaningsih
NPM : 0906586606
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Perekonomian dan Kebijakan
Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Bekasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ir. Widyono Soetjipto ()
Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D ()
Penguji : Titissari, MT., M.Sc ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 27 Desember 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas seizin-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tesis yang berjudul “Analisis Perekonomian dan Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Bekasi” ini, mengungkapkan potensi unggulan yang dimiliki Kota Bekasi guna peningkatan pertumbuhan perekonomian ke depan. Analisis yang digunakan adalah analisis LQ, *shift share*, *multiplier* untuk analisis perekonomian dalam menentukan potensi unggulan dan juga analisis SWOT dalam pemilihan kebijakan pengembangannya. Selanjutnya membahas tentang kesesuaian arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 melalui visi dan misi Kota Bekasi dengan hasil analisis dan kondisi perekonomian pada tahun tersebut.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang turut membantu kelancaran penelitian dan penulisan tesis ini, terutama kepada :

- Bappenas yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk bisa melanjutkan studi di MPKP FE UI;
- Pemerintah Kota Bekasi, terutama Bapak Walikota Bekasi dan juga Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil;
- Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi, dimana penulis bekerja saat ini, terutama Bapak Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si yang telah banyak memberi dukungan dan bantuan bagi kelancaran penyelesaian tesis ini serta Bapak Drs. H. Aan Suhandi, SH, MH yang telah memberi masukan dan motivasi;
- Dr. Ir. Widnyono Soetjipto selaku dosen pembimbing, yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis;

- Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI beserta staf administrasi program yang telah banyak memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan;
- Para Dosen pengajar yang telah memberi wawasan selama mengikuti perkuliahan;
- Para Responden, yang bersedia membantu penulis dan memberikan informasi bagi penyelesaian dan kelancaran penelitian ini;
- Ucapan terima kasih juga saya sampaikan untuk Ibu Dra. Mien Aminah, M.Si atas kepercayaan, motivasi, juga masukan yang begitu besar kepada penulis;
- Juga teman-teman MPKP FE-UI angkatan XXI Pagi Bappenas, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga; serta
- Tidak lupa untuk orang tua dan keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Tulisan ini juga sebagai wujud terima kasih penulis atas semua pengorbanan dan dukungan tulus yang diberikan kepada penulis hingga detik ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis berterima kasih atas kritik dan saran yang sifatnya membangun dengan tujuan perbaikan atas keterbatasan yang ada. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Jakarta, 27 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusnaeni Widyaningsih
NPM : 0906586606
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Perekonomian dan Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan di
Kota Bekasi**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2010

Yang menyatakan,



(Kusnaeni Widyaningsih)

ABSTRAK

Nama : Kusnaeni Widyaningsih
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Perekonomian dan Kebijakan Pengembangan
Potensi Unggulan di Kota Bekasi

Penelitian ini dimotivasi oleh visi Kota Bekasi yang tercantum dalam Rencana Strategis Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008, yaitu sebagai kota yang “Unggul dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan”. Visi daerah inilah yang merupakan perwujudan keinginan dan harapan dari Kota Bekasi dalam jangka panjang. Untuk itu perlu upaya agar kondisi yang menjadi keinginan dan harapan dapat diwujudkan di masa yang akan datang.

Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian di Kota Bekasi dan berusaha mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi serta menganalisis kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sektor strategis yang dikembangkan adalah sektor yang memiliki keunggulan ekonomi di wilayah Kota Bekasi sendiri maupun dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam analisis perekonomian ini adalah analisis pertumbuhan dan kontribusi sektoral dalam PDRB, analisis LQ, analisis *Shift Share*, dan *Multiplier*. Sedangkan untuk strategi pengembangannya digunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang strategis untuk dikembangkan di Kota Bekasi adalah Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sub Sektor Pengangkutan, terutama Jasa Penunjang Angkutan. Strategi yang sebaiknya diambil dalam pengembangan potensi unggulan untuk jangka pendek adalah “*sosialisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi*”. Sedangkan untuk jangka panjang adalah “*optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya*”. Hasil analisis menunjukkan ada ketidaksesuaian antara visi dan misi Tahun 2003 – 2008 dengan kondisi perekonomian di Kota Bekasi saat ini. Bidang jasa yang merupakan salah satu prioritas belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari Sektor Jasa-jasa maupun Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Kata kunci : Analisis LQ, Analisis *Shift Share*, Analisis SWOT, Sektor Unggulan

ABSTRACT

Name : Kusnaeni Widyaningsih
Program Study : Magister of Planning and Public Policy
Title : Economic Analysis and Developmental Policy of Superior Sectors in Bekasi City

This research is motivated by the vision contained in Strategic Plan of Bekasi City in 2003 – 2008, namely as a city that “Superior in Service and Trade with Ihsan (religious) nuance”. The vision of this area is a manifestation of the wishes and expectations of the Bekasi City in the long term. It is necessary to make serious effort to achieve what we wish and hopes so it can be realized in the future.

The research attempts to analyze economic conditions in Bekasi City and try to identify the strategic sectors that can be developed in accelerating the economic growth in the city and also to analyze the policies that were defined in regional planning documents. Strategic sectors that are going to be developed are the sectors that have economic advantages in the area of the city itself or within the scope of West Java Province and National. The approaches used in this analysis are economic growth and contribution by sector in the GDP, LQ analysis, shift share analysis and multiplier. And for its development strategy, SWOT analysis is used.

The results showed that strategic sectors for development are Manufacturing Sector, Sub Sector of Wholesale and Retail Trade and also Sub Sector of Transportation, especially in Services Supported to Transport. The strategy that should be taken in developing the potential sectors in the short term is “the socialization of local products improvement and try to utilize the strategic position of Bekasi City which is close to Jakarta as the capital of the nation”. As for the long term the strategy is “to optimize the development budget to increase the capacity building and quantity of infrastructure such as to build transportation network and other public services”. The analysis also showed there is a mismatch between vision and mission of the Year 2003 – 2008 with the economic conditions in Bekasi City. Services sectors which is one of the priorities in Bekasi City has not shown significant contribution, both from the Services or Financial, Real Estate and Business Services Sectors.

Keyword : LQ Analysis, Shift Share Analysis, SWOT Analysis, Superior Sectors

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Batasan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Metodologi Penelitian	8
1.7. Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah	13
2.1.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi	13
2.1.2. Pengertian Perencanaan Pembangunan	14
2.2. Analisis Basis Ekonomi (<i>Economy Base</i>) dan <i>Location Quotient</i> (LQ)	17
2.2.1. Basis Ekonomi	17
2.2.2. <i>Location Quotient</i> (LQ)	19
2.3. Analisis <i>Shift Share</i>	21
2.4. Analisis <i>Multiplier</i>	24
2.5. Analisis SWOT	25
2.6. Penelitian Terdahulu	28

3.	GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI	29
3.1.	Kondisi Geografis	29
3.1.1.	Letak Wilayah	29
3.1.2.	Administrasi Wilayah	29
3.1.3.	Kondisi Wilayah	30
3.1.4.	Kependudukan	31
3.2.	Sarana dan Prasarana	32
3.2.1.	Transportasi	33
3.2.2.	Komunikasi	34
3.2.3.	Listrik dan Air Minum	35
3.3.	Potensi Ekonomi Daerah	38
3.3.1.	Pertanian	38
3.3.2.	Industri	40
3.3.3.	Perdagangan	41
3.3.4.	Hotel dan Pariwisata	41
3.3.5.	UKM dan Koperasi	42
3.4.	Kebijakan dan Program Pembangunan Ekonomi Daerah	43
4.	ANALISIS PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN	44
4.1.	Pertumbuhan Perekonomian Daerah	44
4.2.	Kontribusi Sektoral	47
4.3.	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	53
4.3.1.	Analisis LQ Kota Bekasi terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat	53
4.3.2.	Analisis LQ Kota Bekasi terhadap Perekonomian Nasional	57
4.4.	Analisis <i>Shift Share</i>	62
4.4.1.	Analisis <i>Shift Share</i> Kota Bekasi terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat	62
4.4.2.	Analisis <i>Shift Share</i> Kota Bekasi terhadap Perekonomian Nasional	65
4.5.	Analisis <i>Multiplier</i> dan Identifikasi Sektor Unggulan	69
4.6.	Hasil Analisis Perekonomian	72
5.	STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN	76
5.1.	Penetapan <i>Stakeholder</i>	76
5.2.	Analisis SWOT	76
5.3.	Strategi Jangka Pendek	77
5.3.1.	Identifikasi Lingkungan Internal (S – W)	77
5.3.2.	Identifikasi Lingkungan Eksternal (O – T)	78
5.3.3.	Alternatif Strategi Jangka Pendek	79
5.3.4.	<i>Grand Strategy</i> untuk Jangka Pendek	81
5.3.5.	Strategi Terpilih untuk Jangka Pendek	84
5.4.	Strategi Jangka Panjang	84
5.4.1.	Identifikasi Lingkungan Internal (S – W)	84
5.4.2.	Identifikasi Lingkungan Eksternal (O – T)	86
5.4.3.	Alternatif Strategi Jangka Panjang	86
5.4.4.	<i>Grand Strategy</i> untuk Jangka Panjang	88
5.4.5.	Strategi Terpilih untuk Jangka Panjang	89

6. PENUTUP	91
6.1. Kesimpulan	91
6.2. Saran Kebijakan	94
6.3. Keterbatasan Penelitian	96
DAFTAR PUSTAKA	97
Lampiran	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000	4
Tabel 1.2. Distribusi PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000	5
Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2008	30
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	31
Tabel 3.3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Km ² menurut Kecamatan Tahun 2008	32
Tabel 3.4. Panjang Jalan menurut Jenis Jalan dan Fungsi Jalan Tahun 2008	33
Tabel 3.5. Panjang Jalan menurut Jenis Jalan dan Kondisi Jalan Tahun 2008	34
Tabel 3.6. Potensi PT. Telkom Kota Bekasi Tahun 2008	35
Tabel 3.7. Perkembangan Daya Terpasang menurut Jenis Pelanggan Tahun 2004 – 2008	36
Tabel 3.8. Cakupan Pelayanan PDAM Kota Bekasi Tahun 2008	36
Tabel 3.9. Jumlah Investasi Sektor Industri di Kota Bekasi Tahun 2004 – 2008	40
Tabel 3.10. Target dan Realisasi Jumlah Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003 – 2008	42
Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan Sektoral Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	45
Tabel 4.2. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2004 – 2008	47
Tabel 4.3. Kontribusi Sektoral dalam PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	48
Tabel 4.4. Hubungan Kontribusi Sektoral dengan Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	49
Tabel 4.5. Kontribusi Sektor-sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap Sektor dan Pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	51
Tabel 4.6. Kontribusi Sektor-sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap Sektor dan Pembentukan PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	52
Tabel 4.7. Kontribusi Rata-rata Sektor terhadap Pembentukan PDRB Kota Bekasi, Sektor dan Pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat serta terhadap Sektor dan Pembentukan PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	52

Tabel 4.8.	Hasil Perhitungan LQ Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat serta Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	54
Tabel 4.9.	Kontribusi Rata-rata Sektor dalam PDRB Kota Bekasi Tahun 2004 – 2008 dan Nilai LQ Sektoral	55
Tabel 4.10.	Hasil Perhitungan LQ Kota Bekasi terhadap Perekonomian Indonesia serta Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008	58
Tabel 4.11.	Kontribusi Rata-rata Sektor dalam PDRB Kota Bekasi Tahun 2004 – 2008 dan Nilai LQ terhadap PDB Indonesia	59
Tabel 4.12.	Hasil Perhitungan Nilai <i>Shift Share</i> PDRB Kota Bekasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008	64
Tabel 4.13.	Hasil Perhitungan Nilai <i>Shift Share</i> PDRB Kota Bekasi terhadap PDB Indonesia Tahun 2004 – 2008	68
Tabel 4.14.	Hasil Analisis Perhitungan LQ dan <i>Shift Share</i> PDRB Kota Bekasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2008 serta <i>Multiplier</i> PDRB Kota Bekasi Tahun 2008 Atas Dasar Harga Konstan 2000	71
Tabel 4.15.	Hasil Analisis Perekonomian Kota Bekasi	72
Tabel 5.1.	<i>Internal Strategic Factor Analysis Summary</i> (IFAS) Jangka Pendek	80
Tabel 5.2.	<i>External Strategic Factor Analysis Summary</i> (EFAS) Jangka Pendek	81
Tabel 5.3.	Matrik SWOT untuk Jangka Pendek	82
Tabel 5.4.	Matrik <i>Grand Strategy</i> Jangka Pendek	83
Tabel 5.5.	<i>Internal Strategic Factor Analysis Summary</i> (IFAS) Jangka Panjang	85
Tabel 5.6.	<i>External Strategic Factor Analysis Summary</i> (EFAS) Jangka Panjang	87
Tabel 5.7.	Matriks SWOT untuk Jangka Panjang	88
Tabel 5.8.	Matriks <i>Grand Strategy</i> untuk Jangka Panjang	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Matriks SWOT	27
Gambar 3.1. Banyaknya Perusahaan yang Mendapat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Tahun 2004 – 2008	41
Gambar 4.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2004 – 2008	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Quesioner
Lampiran 2	Tabulasi Jawaban Responden
Lampiran 3	Peta Wilayah Administrasi Kota Bekasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik (Todaro, 2004 dalam BPS, 2009).

Suatu pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989 dalam BPS, 2009).

Seperti diketahui bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang biasa diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional ataupun regional juga untuk meningkatkan produktivitas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perlunya penyelenggaraan otonomi daerah untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Otonomi Daerah ini diselenggarakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dalam menghadapi situasi yang kian berkembang dan juga persaingan global.

Otonomi daerah menjadi tantangan bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang ada menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena

itu daerah dituntut untuk mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan juga evaluasi. Selain itu, pemberian otonomi daerah ini menuntut daerah untuk mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, juga antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan daerah terhadap pembangunan daerahnya semakin luas. Hal ini memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi yang ada guna membangun, memajukan dan berusaha untuk lebih maju dari daerah lainnya. Di atas semua itu, otonomi daerah dimaksudkan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu diperlukan strategi agar pembangunan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, akan tetapi diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator, dan stimulator (Blakely, 1989 dalam BPS, 2009). Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan ekonomi. Sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan perilaku lingkungan di daerahnya. Sedangkan sebagai stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di daerahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi telah berupaya menjalankan peran-peran tersebut dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008, strategi program yang akan dilaksanakan pada periode tersebut dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan tumbuh kembangnya sentra-sentra ekonomi dengan titik berat pada kegiatan jasa dan perdagangan;
2. Meningkatkan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah dengan upaya mengurangi pengangguran dan permasalahan sosial lainnya;
4. Memantapkan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM);
5. Meningkatkan efektivitas kelembagaan, tata laksana dan aparatur daerah serta pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga pendidikan;
7. Memantapkan kerukunan kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
9. Meningkatkan perluasan sarana penerangan dan informasi;
10. Mewujudkan tata ruang dengan memperhatikan arah pengembangan kota serta keseimbangan antar wilayah.

Di dalam Renstra tersebut juga tercantum bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana strategik ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang pembangunan, meliputi Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dimana masing-masing bidang memiliki tujuan dan juga sasaran pembangunan yang pada akhirnya adalah untuk memajukan Kota Bekasi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dukungan dana yang masih terbatas dibandingkan dengan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah menyebabkan pembangunan dilaksanakan berdasarkan prioritas. Umumnya pelaksanaan pembangunan mengarah pada sektor-sektor unggulan suatu daerah dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Kota Bekasi. Sehingga dengan percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat. Sesuai dengan visi yang dicanangkan, yaitu menjadikan

Kota Bekasi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan, arah pembangunan ditujukan pada pelaksanaan visi tersebut.

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2004 – 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kota Bekasi, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. kecuali di Tahun 2008, dimana terjadi krisis finansial yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Hal ini berdampak terhadap perekonomian dalam negeri, terutama bagi daerah-daerah yang struktur ekonominya cenderung pada sektor sekunder dan tersier.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	3,22	2,04	-2,27	4,91	1,66
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	3,92	5,30	4,27	7,00	4,52
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5,78	4,33	7,77	9,17	9,47
5	Bangunan	4,86	4,98	6,42	11,97	8,97
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,33	6,06	8,35	5,14	5,24
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,53	8,48	5,56	2,54	16,65
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,38	4,85	12,37	15,85	7,35
9	Jasa-jasa	5,76	5,15	6,96	3,45	2,63
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		5,38	5,65	6,07	6,44	5,94

Sumber : BPS Kota Bekasi

Dengan visi yang dicanangkan, sangatlah wajar apabila Kota Bekasi meletakkan perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan disamping pengembangan Sektor Industri Pengolahan untuk menunjang Sektor Perdagangan. Hal ini terbukti dengan besarnya kontribusi yang diberikan terutama oleh Sektor Industri Pengolahan dan juga Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai dua sektor yang memberikan kontribusi sekitar 75 % terhadap perekonomian di Kota Bekasi sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Distribusi PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2004	2005	2006	2007*	2008**
1.	PERTANIAN	1,11	1,08	0,99	0,98	0,94
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	0,37	0,37	0,34	0,33	0,32
1.2.	Tanaman Perkebunan	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
1.3.	Peternakan	0,72	0,69	0,64	0,63	0,60
1.4.	Kehutanan	-	-	-	-	-
1.5.	Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-
2.1.	Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
2.2.	Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
2.3.	Penggalian	-	-	-	-	-
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	46,82	46,67	45,87	46,11	45,50
3.1.	Industri Migas	-	-	-	-	-
3.1.1.	Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
3.1.2.	Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
3.2.	Industri Tanpa Migas	46,82	46,67	45,87	46,11	45,50
4.	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,43	3,39	3,44	3,53	3,65
4.1.	Listrik	1,94	1,95	1,97	2,00	2,06
4.2.	Gas	1,36	1,31	1,35	1,40	1,47
4.3.	Air Bersih	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
5.	BANGUNAN	3,49	3,47	3,48	3,66	3,77
6.	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	27,48	27,59	28,18	27,84	27,65
6.1.	Perdagangan Besar & Eceran	23,45	23,53	24,00	23,77	23,73
6.2.	Hotel	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
6.3.	Restoran	3,91	3,94	4,06	3,95	3,80
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7,69	7,90	7,86	7,57	8,34
7.1.	Pengangkutan	6,83	7,02	6,95	6,70	7,50
7.1.1.	Angkutan Rel	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
7.1.2.	Angkutan Jalan Raya	5,72	5,90	5,78	5,58	5,35
7.1.3.	Angkutan Laut	-	-	-	-	-
7.1.4.	Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
7.1.5.	Angkutan Udara	-	-	-	-	-
7.1.6.	Jasa Penunjang Angkutan	1,03	1,03	1,08	1,03	2,07
7.2.	Komunikasi	0,86	0,88	0,91	0,87	0,84
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	3,46	3,44	3,64	3,96	4,01
8.1.	Bank	0,32	0,50	0,54	0,96	1,13
8.2.	Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,46	0,45	0,43	0,43	0,41
8.3.	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
8.4.	Sewa Bangunan	2,34	2,14	2,28	2,21	2,13
8.5.	Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,39	0,37	0,35
9.	JASA-JASA	6,50	6,47	6,53	6,34	6,15
9.1.	Pemerintahan Umum & Pertahanan	3,36	3,35	3,37	3,27	3,17
9.2.	Swasta	3,14	3,12	3,16	3,08	2,97
9.2.1.	Sosial Masyarakat	0,59	0,60	0,58	0,57	0,56
9.2.2.	Hiburan & Rekreasi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9.2.3.	Perorangan & Rumah Tangga	2,49	2,46	2,52	2,45	2,35
PDRB DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Kota Bekasi

Pembangunan pun dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan di setiap wilayah pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam suatu daerah maka pembangunan harus dapat menjangkau semua bidang di seluruh wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan perencanaan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan kemampuan dan dana yang dimiliki. Perencanaan di sini meliputi perencanaan dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pembiayaan. Perencanaan sangat diperlukan dalam

pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam waktu tertentu. Perencanaan mutlak diperlukan dalam pembangunan perekonomian demi tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penentuan prioritas dalam pembangunan harus ditetapkan dengan maksud menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Dengan demikian analisis perekonomian Kota Bekasi sangat diperlukan guna menentukan prioritas pembangunan agar pembangunan dilaksanakan berdasarkan fakta yang ada.

Dengan pelaksanaan pembangunan berdasarkan analisis perekonomian diharapkan alokasi dana bisa tepat sasaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam perencanaan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga percepatan pembangunan dapat diwujudkan. Salah satu cara agar pencapaian tujuan pembangunan dapat dipercepat, yaitu dengan mengundang investor untuk dapat bekerja sama membangun daerah.

Mengundang investor agar bersedia menginvestasikan modalnya di suatu daerah, diperlukan banyak hal yang harus dipenuhi diantaranya infrastruktur yang memadai dan juga kepastian hukum dalam berusaha. Penyediaan infrastruktur menjadi tahap yang harus dipenuhi oleh daerah, terutama pemerintah dalam menarik investor. Hal ini tidaklah mudah karena infrastruktur memerlukan biaya yang sangat besar untuk mencakup seluruh wilayah yang ada. Untuk itu perlunya memacu kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menjadi pendorong bagi masuknya investasi.

Memacu pertumbuhan ekonomi ini perlu kerja sama antara pemerintah, sebagai fasilitator dan stabilisator di wilayah tersebut, dengan masyarakat, baik swasta maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketiga pihak tersebut saling terkait satu sama lain. Dengan dana yang terbatas, mustahil bagi suatu daerah untuk dapat membangun seluruh sektor kehidupan di daerah tersebut dengan baik pada waktu yang bersamaan. Untuk itu perlu dipilih sektor atau bidang tertentu yang menjadi prioritas untuk jangka waktu tertentu agar mampu menjadi penggerak perekonomian sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi ini menjadi tidak berarti apabila tidak mampu melibatkan masyarakat setempat sehingga mengakibatkan angka pengangguran tetap tinggi.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan diperlukan untuk mencari potensi unggulan suatu daerah yang akan dijadikan prioritas pengembangan sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Potensi unggulan ini haruslah merupakan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu dikembangkan dengan melihat beberapa hal, seperti memberikan kontribusi yang besar bagi daerah, mampu memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku dan juga sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut sehingga mampu bersaing dengan daerah lain karena memiliki nilai ekonomis serta memberikan manfaat bagi masyarakat daerah tersebut dan juga masyarakat di luar daerah tersebut sehingga memiliki keunggulan komparatif.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari visi Kota Bekasi yang terdapat pada Renstra Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 yaitu sebagai Kota yang Unggul dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan, dengan demikian secara tidak langsung Kota Bekasi mencanangkan sektor perdagangan dan sektor jasa, baik itu jasa pelayanan publik maupun pelayanan jasa kegiatan ekonomi, sebagai sektor yang diprioritaskan atau diunggulkan dalam pembangunan. Akan tetapi bila dilihat dari kontribusi yang dihasilkan selama Tahun 2004 – 2008, terutama sektor jasa tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Dengan alasan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :

- Berdasarkan hasil analisis, sektor-sektor apa saja yang memiliki keunggulan komparatif sehingga layak dijadikan prioritas dalam pengembangannya?
- Apakah arah kebijakan dalam dokumen perencanaan Kota Bekasi sejalan dengan hasil analisis?
- Strategi apa yang sebaiknya dijalankan oleh Kota Bekasi dalam pengembangan potensi unggulan?

1.3. Batasan Penelitian

Untuk memperkecil ruang lingkup permasalahan, penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

- Periode analisis penelitian adalah selama Tahun 2004 – 2008.
- Data sekunder yang digunakan adalah data PDRB Kota Bekasi, PDRB Provinsi Jawa Barat, dan juga PDB Indonesia selama periode waktu tersebut.
- Peneliti menetapkan *stakeholder* utama pada lingkup Pemerintah Kota Bekasi. Dengan alasan untuk mempersempit domain dokumen perencanaan kebijakan pengembangan potensi unggulan pemerintah sehingga akan lebih mudah dikelola dan difokuskan pada sisi perencanaan Kota Bekasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- Menganalisis sektor-sektor apa saja yang termasuk potensi unggulan di Kota Bekasi;
- Menganalisis kesesuaian hasil analisis dengan dokumen perencanaan dalam pengembangan potensi unggulan tersebut;
- Menganalisis strategi atau kebijakan yang sebaiknya dijalankan dalam upaya pengembangan potensi unggulan di Kota Bekasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap perencana yang ada, terutama yang bekerja di Pemerintah Kota Bekasi, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat perencanaan mengenai pengembangan potensi unggulan yang ada di Kota Bekasi untuk masa yang akan datang sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi semakin meningkat dan juga pemerataan pembangunan segera terwujud.

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisa perekonomian dalam menentukan potensi unggulan yang ada di Kota Bekasi selama periode Tahun 2004 – 2008, yang terdiri dari :

- Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2008;

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2008;
- Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008;
- Rencana Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2004 sampai dengan 2008;
- Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2009;
- Serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berhubungan dengan materi penelitian.

Sedangkan data primer digunakan untuk menganalisa kebijakan yang dipilih dalam upaya pengembangan potensi unggulan tersebut dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi. Data primer diperoleh dari penyebaran questioner kepada *stakeholder* untuk memilih strategi kebijakan dalam pengembangan sektor-sektor unggulan. *Stakeholder* utama yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bekasi untuk mempersempit pembahasan dalam pembuatan perencanaan daerah.

Dalam menganalisa perekonomian dan juga kebijakan pengembangan potensi unggulan digunakan beberapa metode atau pendekatan, meliputi :

a. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient merupakan suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif besarnya peranan atau nilai tambah suatu sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap besarnya peranan atau nilai tambah sektor tersebut dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ menghitung perbandingan antara *share output* sektor *i* di suatu kabupaten/kota dan *share output* sektor *i* di provinsi yang bersangkutan. Pada umumnya variabel yang dapat diperbandingkan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Untuk penelitian ini digunakan data nilai tambah atau pendapatan daerah. Rumus yang digunakan dengan menggunakan nilai tambah (tingkat pendapatan) adalah sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{\frac{X_i^r}{X^r}}{\frac{X_i^n}{X^n}}$$

dimana : X_i^r : *output* (PDRB) sektor *i* kabupaten/kota

X^r : *output* (PDRB) seluruh sektor kabupaten/kota

X_i^n : *output* (PDRB) sektor *i* daerah tingkat yang lebih tinggi (provinsi atau nasional)

X^n : *output* (PDRB) seluruh sektor daerah tingkat yang lebih tinggi (provinsi atau nasional)

Jika $LQ_i > 1$ mengindikasikan bahwa ada kegiatan ekspor di sektor tersebut atau sektor basis (B), $LQ = 1$ menyatakan bahwa sektor tersebut adalah sektor swasembada, sedangkan $LQ_i < 1$ menyatakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor nonbasis (NB).

b. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran serta peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah tingkat yang lebih tinggi. Perekonomian suatu daerah yang didominasi oleh sektor dengan pertumbuhan yang lambat, daerah itu akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya, berlaku juga sebaliknya. Data yang biasa digunakan ialah pendapatan per kapita, PDRB atau tenaga kerja dengan tahun pengamatan pada rentang waktu tertentu.

Persamaan dalam analisis *shift share* adalah sebagai berikut :

$$G = R + S$$

dimana : G = pertumbuhan nasional/regional

R = *national/regional share*

S = *shift*

Persamaan tersebut dapat ditulis :

$$S = G - R$$

$$G = (E_{rt}^i - E_{r0}^i)$$

$$R = E_{r0}^i(E_{nt}/E_{n0}) - E_{r0}^i$$

dimana : E_{r0} = PDRB tahun awal observasi

E_{rt} = PDRB tahun akhir observasi

E_{n0} = PDB tahun awal observasi

E_{nt} = PDB tahun akhir observasi

Different Shift (Sd)

$$Sd = \sum \{(E_{rt}^i/E_{r0}^i) - (E_{nt}^i/E_{n0}^i)\} E_{r0}^i$$

Proportional Shift (Sp)

$$Sp = \sum \{(E_{nt}^i/E_{n0}^i) - (E_{nt}/E_{n0})\} E_{r0}^i$$

Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen, yaitu :

- *National Share* digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (provinsi atau nasional). Hasil perhitungan tersebut menggambarkan peranan wilayah tingkat yang lebih tinggi (provinsi) yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah di bawahnya (kabupaten/kota).
- *Proportional (Industry-Mix) Shift* adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor *i* dibanding total sektor di tingkat yang lebih tinggi (provinsi).
- *Differential Shift* (Sd) adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih rendah (kabupaten/kota) dan nilai tambah bruto sektor yang sama di daerah tingkat yang lebih tinggi (provinsi). Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT, yakni *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat*, merupakan penjabaran dari manajemen strategik versi Chicago dengan prinsip *'inside-out'*. Sebelum dilakukan penjabaran analisis SWOT dan langkah-langkahnya, yang pertama kali harus dijabarkan adalah penentuan *stakeholder* utama. Penentuan ini sangatlah penting karena dalam manajemen strategik di sektor publik, sering memiliki *stakeholder* yang banyak dan juga sering memiliki tujuan utama yang berbeda dan saling bertentangan. Dengan alasan itulah penelitian ini memilih Pemerintah Kota Bekasi, terutama yang berkaitan dengan hasil analisis perekonomian Kota Bekasi sebagai *stakeholder* utama, yaitu untuk mempersempit domain dokumen perencanaan sehingga mudah dikelola dan difokuskan pada sisi perencanaan Kota Bekasi.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi :

Bab 1 berisi tentang latar belakang dipilihnya judul penelitian, permasalahan yang muncul sehingga perlu dilakukan penelitian ini, batasan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian dan juga manfaat penelitian serta pendekatan yang digunakan dalam menganalisis.

Bab 2 berisi tentang landasan teori atau tinjauan pustaka yang mendasari penelitian sehingga penelitian dapat dibuktikan secara ilmiah.

Bab 3 berisi tentang gambaran umum wilayah penelitian, yang terdiri dari kondisi wilayah, luas wilayah, dan potensi ekonomi Kota Bekasi.

Bab 4 berisi tentang pembahasan terhadap potensi unggulan di Kota Bekasi. Analisis mengenai potensi unggulan ini dilakukan menggunakan analisis LQ, *Shift Share* dan juga *multiplier effect*.

Bab 5 berisi tentang pembahasan terhadap kebijakan atau strategi yang diambil dalam pengembangan potensi unggulan menggunakan analisis SWOT.

Bab 6 berisi tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa teori tentang definisi perencanaan dan pembangunan serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menganalisis perekonomian pada suatu wilayah. Di samping itu juga dibahas mengenai penentuan sektor-sektor yang menjadi unggulan suatu wilayah dan pengembangannya.

2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan memiliki banyak definisi yang berbeda, tergantung dari sudut pandang pakar yang mendefinisikan dan juga kepentingan yang berbeda. Beberapa definisi pembangunan yang berasal dari pendapat beberapa pakar antara lain bahwa : ¹

- a. Pembangunan ekonomi adalah suatu situasi dimana terjadi peningkatan keseluruhan sistem sosial (Gunnar Myrdal, 1973).
- b. Suatu ekonomi dapat dikatakan berkembang jika telah terjadi pertumbuhan, pemerataan, dan peningkatan kreativitas rakyat (Chakravaty, 1987).
- c. Perkembangan ekonomi adalah situasi dimana telah terjadi pengembangan kapabilitas orang (*expantion of people capabilities*) yang antara lain dibuktikan dengan adanya perluasan kepemilikan harta oleh rakyat (Amartya Sen, 1993).
- d. Pembangunan adalah pemerataan bersama pertumbuhan (*redistribution with growth*) (Chenery, 1974) yang mempengaruhi ILO dengan munculnya konsep kebutuhan dasar manusia atau *basic human needs*.
- e. Gary Banks Jan Tumilir mengatakan bahwa pembangunan politik ekonomi masyarakat meliputi pembangunan sektor tradisional (terikat pada nilai asli atau primordial), peralihan, dan juga modern.

¹ Nining I. Soesilo, "Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik", Buku I, MPKP FE-UI, 2002, hal 4-1 s/d 4-3.

- f. Menurut Parth J. Shah, pembangunan ekonomi umumnya didefinisikan dalam beberapa bentuk indikator, yaitu :
- Pertumbuhan pendapatan perkapita riil;
 - Akumulasi sarana mendorong pertumbuhan pendapatan;
 - Pengurangan kemiskinan absolut;
 - Pengurangan perbedaan pendapat;
 - Pengurangan urbanisasi ke kota dan kemacetan;
 - Pengurangan pengangguran dan pengangguran terselubung;
 - Mencapai keluhuran, harga diri, dan kebebasan manusia.

Sedangkan menurut Nining I. Soesilo, pembangunan adalah peningkatan keseluruhan sistem sosial yang sesuai dengan nilai luhur dan dicapai melalui pertumbuhan, pemerataan, dan peningkatan kreativitas rakyat.

2.1.2. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana pembangunan, ada berbagai definisi atau pengertian tentang perencanaan dimana belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai definisi perencanaan ekonomi. Perencanaan menurut Jhingan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan; tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau militer.

Prof. Lewis dalam Jhingan (2008) menunjukkan 6 (enam) pengertian perencanaan yang digunakan dalam kepustakaan ekonomi :

Pertama, banyak sekali kepustakaan yang hanya menghubungkan istilah itu dengan penentuan letak geografis faktor, bangunan tempat tinggal, bioskop dan semacamnya. Kadangkala disebut dengan perencanaan kota dan negara, dan kadangkala disebut sebagai perencanaan saja. *Kedua*, “perencanaan” hanya berarti memutuskan uang apa yang dapat dibelanjakan. *Ketiga*, “ekonomi berencana” adalah ekonomi dimana masing-masing satuan produksi (atau perusahaan) hanya memakai sumber manusia, bahan dan peralatan yang dialokasikan ke sana melalui kuota dan menjual produknya semata-mata kepada orang atau perusahaan yang

ditunjukkan oleh pemerintah pusat. *Keempat*, “perencanaan” kadangkala berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah, apakah itu untuk perusahaan negara atau perusahaan swasta. Sebagian besar pemerintah menerapkan jenis perencanaan walau hanya secara sporadis atau untuk satu atau dua industri atau jasa saja yang dianggap penting. *Kelima*, di sini sasaran ditetapkan untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua buruh, devisa, bahan mentah, dan sumber negara lainnya ke berbagai bidang perekonomian. *Keenam*, kata “perencanaan” kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan sarana yang dipergunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada perusahaan swasta.

Ferdynand Zweig berpendapat bahwa “perencanaan” di sini adalah perencanaan perekonomian, bukan perencanaan di dalam perekonomian. Ia tidak hanya perencanaan kota, pekerjaan umum atau bagian tertentu dari perekonomian regional, tetapi perekonomian secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Dr. Dalton, “perencanaan ekonomi dalam pengertian yang paling luas adalah pengaturan dengan sengaja oleh orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi ke arah tujuan yang ditetapkan”.

Perencanaan ekonomi sebagaimana dipahami oleh sebagian besar ahli ekonomi berarti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula (Jhingan, 2008).

Menurut Tam Simatupang dalam Nining I. Soesilo (2002), pengorganisasian dan tatalaksana penyelenggaraan rencana dan program pembangunan di Indonesia mempunyai beberapa fungsi berikut :

- i. Menyusun rencana pembangunan lima tahun sebagai landasan dan pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sosial-ekonomi nasional;
- ii. Membina penyusunan program tahunan sebagai penuangan kebijaksanaan pelaksanaan Repelita melalui lingkaran (siklus) penyusunan program yang dibina oleh Bappenas agar tidak menyimpang dari sasaran Repelita;
- iii. Membina penyediaan biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan program tahunan;
- iv. Melaksanakan (dalam arti luas) proyek-proyek pembangunan;

- v. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program, mengikuti pelaksanaan proyek-proyek dan mengevaluasi laporan perkembangannya.

Gagasan modernisasi menurut Myrdall (Soesilo, 2002) diwujudkan di negara berkembang termasuk Indonesia dalam bentuk Rencana Pembangunan.

Menurut Bintoro (Soesilo, 2002) tujuan perencanaan pembangunan adalah agar tercapai :

- a. Perkembangan sosial ekonomi tetap berlangsung;
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita;
- c. Perubahan struktur ekonomi;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Pemerataan pembangunan;
- f. Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat;
- g. Didasari kemampuan nasional;
- h. Stabilitas ekonomi;
- i. Tujuan pembangunan fundamental jangka panjang.

Sedangkan kelemahan perencanaan pembangunan di negara berkembang (Bintoro dalam Soesilo, 2002) adalah karena perencanaan pembangunan :

- a. Lebih merupakan dokumen politik;
- b. Meskipun menjadi dokumen politik akan tetapi kurang mendapat dukungan politik;
- c. Ada hubungan yang kurang serasi antara rencana dan hasil perencanaannya dengan pelaksana dan hasil pelaksanaannya;
- d. Pilihan alternatif perencanaan kurang baik;
- e. Kurang data;
- f. Kurang menguasai teknik;
- g. Penekanan perumusan rencana lebih ditekankan dari pada pelaksanaan;
- h. Kemampuan administrasi pelaksana lemah.

Lebih jauh Bintoro menyatakan bahwa orientasi perencanaan pembangunan adalah :

- a. Rencana tersebut harus benar-benar dilaksanakan apabila :

- Ada hubungan elit politik;
 - Ada stabilitas politik;
 - Ada rencana yang secara teknis layak;
 - Pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan administrasi.
- b. Adanya sifat penjamin pelaksanaan rencana, yaitu adanya :
- *Rolling plans* (adanya perubahan setiap akhir tahun untuk penyesuaian);
 - Terdapat perencanaan operasional tahunan;
 - Ada kaitan rencana tahunan dengan anggaran belanja;
 - Dilengkapi dengan rencana penyempurnaan administrasi negara.

2.2. Analisis Basis Ekonomi (*Economy Base*) dan *Location Quotient* (LQ)

Seringkali perencanaan pembangunan tidak sejalan dengan ketersediaan anggaran sehingga diperlukan penentuan prioritas terhadap sektor atau kegiatan tertentu. Dengan penentuan prioritas diharapkan mampu menggerakkan kegiatan lain sehingga tujuan pembangunan tercapai dalam waktu yang lebih cepat dari yang direncanakan. Ada berbagai pendekatan yang umum dilakukan untuk mendeteksi sektor atau kegiatan yang akan dijadikan prioritas, antara lain melalui pendekatan basis ekonomi (*economy base*), *Location Quotient* (LQ) ataupun analisis *Shift Share*.

2.2.1. Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi ini dikelompokkan atas kegiatan basis dan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tidak semua investasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah secara tetap/bertahan lama. Apalagi jika suatu kegiatan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan lokal cenderung tidak bertambah, maka munculnya investor baru hanya akan mengakibatkan penurunan harga karena bertambahnya produksi tetapi permintaan akan produk tersebut tidak bertambah. Keadaan tersebut hanya akan mengakibatkan kerugian pada investor yang sudah

ada atau dengan kata lain, keuntungan rata-rata pengusaha menurun. Apabila rata-rata pengusaha tidak lagi mendapat untung yang wajar maka laju pertumbuhan ekonomi dapat terganggu. Sedangkan modal investasi seringkali berasal dari akumulasi keuntungan yang ditahan dan apabila pengusaha tidak memiliki akumulasi keuntungan yang memadai maka kemampuan berinvestasi akan menurun. Bahkan jika kegiatan tersebut diperkirakan tidak lagi memberi keuntungan/profit yang memadai, investor akan kurang berminat menanamkan modalnya pada kegiatan tersebut. Kurangnya investasi mengakibatkan berkurangnya tambahan lapangan kerja baru sehingga tidak mampu menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah. Profit pengusaha yang terus menurun juga berdampak terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak karena penerimaan pajak sulit untuk ditingkatkan. Berbeda halnya jika investor memproduksi barang/jasa yang ditujukan untuk ekspor. Kegiatan ini menciptakan nilai tambah, mendorong sektor lain untuk turut berkembang tanpa ada investor lain yang dirugikan.

Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah, baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Tenaga kerja yang berdomisili di suatu wilayah, tetapi bekerja dan memperoleh uang dari luar wilayahnya termasuk dalam pengertian ekspor. Pada dasarnya kegiatan ekspor merupakan semua kegiatan, baik penghasil produk maupun penyedia jasa, yang mendatangkan uang dari luar wilayah disebut dengan kegiatan basis. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat *exogenous* (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal).

Kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan/sektor pelayanan (*service*), agar tidak menciptakan pengertian yang keliru tentang arti *service* sebut saja sektor nonbasis. Sektor nonbasis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kenaikannya sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian, sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi

pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis (Tarigan, 2009).

2.2.2. Location Quotient (LQ)

Location Quotient merupakan suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif besarnya peranan atau nilai tambah suatu sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap besarnya peranan atau nilai tambah sektor tersebut dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ menghitung perbandingan antara *share output* sektor *i* di suatu kabupaten/kota dan *share output* sektor *i* di provinsi yang bersangkutan. Pada umumnya variabel yang dapat diperbandingkan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Rumus yang digunakan dengan menggunakan nilai tambah (tingkat pendapatan) adalah sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{\frac{X_i^r}{X^r}}{\frac{X_i^n}{X^n}} \dots\dots\dots (2.1)$$

dimana X_i^r : *output* (PDRB) sektor *i* kabupaten/kota

X^r : *output* (PDRB) seluruh sektor kabupaten/kota

X_i^n : *output* (PDRB) sektor *i* satu tingkat di atasnya (provinsi atau nasional)

X^n : *output* (PDRB) seluruh sektor satu tingkat di atasnya (provinsi atau nasional)

Dengan pendekatan analisis LQ, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Jika nilai $LQ_i > 1$, mengindikasikan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis. Ini berarti bahwa daerah tersebut memiliki potensi untuk melakukan ekspor keluar daerah pada produk sektor bersangkutan. Kriteria ini mencerminkan sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif di daerah itu. Kriteria kesimpulan nilai $LQ > 1$ menyatakan bahwa daerah tersebut melakukan ekspor ke daerah lain untuk produk-produk dari sektor-sektor basisnya. Hal ini hanya berlaku apabila produk-produk tersebut dapat diperdagangkan antar daerah. Untuk Sektor Bangunan, dimana produknya tidak dapat

diperdagangkan antar daerah, pengertian dari nilai $LQ > 1$ berarti pada waktu tersebut sedang dilakukan pembangunan/pengembangan yang tinggi pada sektor tersebut karena ada suatu kepentingan tertentu dari kebijakan daerah sehingga melebihi angka pertumbuhan nasional pada sektor tersebut.

- b. Jika nilai $LQ_i < 1$ mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis. Hal ini mengandung pengertian bahwa daerah tersebut melakukan impor dari luar daerah untuk produk sektor yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, produk-produk sektor tersebut diproduksi hanya untuk mencukupi kebutuhan daerah bersangkutan. Apabila daerah mengalami kekurangan atas produk tersebut maka daerah melakukan impor atau mendatangkannya dari daerah lain. Kriteria ini mencerminkan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif di daerah yang bersangkutan.

Penggunaan LQ sangat sederhana dan dapat digunakan untuk menganalisis tentang ‘ekspor-impor’ (perdagangan) suatu daerah. Namun teknik ini memiliki kelemahan (Sriwahyuni, 2002) :

1. Asumsi LQ adalah menganggap bahwa selera atau pola konsumsi masyarakat adalah sama. Padahal pada kenyataannya selera dan pola konsumsi tersebut berlainan, baik antar daerah maupun dalam suatu daerah;
2. Asumsi bahwa tingkat konsumsi rata-rata suatu jenis barang untuk setiap daerah adalah sama, padahal kenyataannya menunjukkan perbedaan;
3. Bahan keperluan industri berbeda antar daerah;
4. Model menggunakan perekonomian tertutup;
5. Sensitif terhadap *based* agregat, artinya meskipun nilai LQ suatu sektor tinggi, tetapi jika dilihat pada sub sektornya tidak semuanya memiliki nilai LQ tinggi.

Terlepas dari berbagai kelemahannya, pendekatan ini sangat berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bahwa sektor tertentu menjadi unggul atau tidak di tingkat provinsi atau kabupaten. Analisis LQ merupakan indikator awal untuk melihat keunggulan komparatif suatu sektor maupun komoditas.

2.3. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran serta peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah yang tingkatannya lebih tinggi atau nasional. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Analisis *Shift Share* ini dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943). Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi (seperti pertumbuhan ataupun perlambatan pertumbuhan) dari suatu variabel regional sektor atau industri dalam suatu daerah. Variabel atau data yang biasa digunakan adalah pendapatan per kapita, PDRB atau tenaga kerja dengan tahun pengamatan pada rentang waktu tertentu.

Perubahan ekonomi dan pergeseran struktur suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen, yaitu :

- a. *National Share*, ada juga literatur yang menyatakan sebagai pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth*), digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (provinsi atau nasional). Hasil perhitungan tersebut menggambarkan peranan wilayah provinsi atau nasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah regional (kabupaten/kota) yang diamati. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi maka peranannya terhadap provinsi adalah tetap.
- b. *Proportional Shift* (*Sp*) adalah komponen struktur atau *Industry-Mix*, dimana mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah bersangkutan. Komponen ini menunjukkan apakah aktivitas ekonomi pada sektor tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara nasional (daerah tingkat yang lebih tinggi).

Pengaruh *industry-mix* akan positif apabila pertumbuhan variabel regional suatu sektor lebih besar daripada pertumbuhan variabel regional total sektor di tingkat nasional. Nilai positif atau negatif menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor terhadap perekonomian nasional. Jika suatu daerah memiliki lebih banyak sektor yang tumbuh lebih cepat secara nasional maka akan memiliki pengaruh *industry-mix* yang positif. Sebaliknya, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor yang tumbuh lebih lambat secara nasional akan memiliki pengaruh *industry-mix* yang negatif.

- c. *Differential Shift* (Sd) atau *regional share* adalah komponen lokasional atau komponen regional, yaitu sisa pertumbuhan. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang bertumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor nasional intern. Jadi suatu daerah yang memiliki keunggulan lokasional, seperti sumber daya yang baik atau potensial, akan memiliki *differensial shift* yang positif. Sebaliknya daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan memiliki *differensial shift* yang negatif. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Komponen ini menunjukkan pengaruh keunggulan kompetitif, yang menjelaskan tingkat kompetisi suatu aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor tersebut secara nasional. Komponen ini mengukur perubahan dalam suatu industri di suatu daerah karena adanya perbedaan antara pertumbuhan industri di daerah tersebut dengan pertumbuhan industri tersebut secara nasional. *Differential shift* yang bernilai positif menunjukkan bahwa aktivitas sektor tersebut kompetitif.

Menurut Glasson (1990) dalam Pangidaran (2004), kedua komponen *shift* (Sp dan Sd) tersebut memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat ekstern dan intern. Dimana *proportional shift* merupakan akibat pengaruh faktor-faktor luar yang bekerja secara nasional, sedangkan *differential shift* adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di daerah bersangkutan.

Persamaan dalam analisis *shift share* adalah sebagai berikut :

Universitas Indonesia

$$G = R + S$$

dimana : G = pertumbuhan nasional/regional

R = *national/regional share*

S = *shift*

Persamaan tersebut dapat ditulis :

$$S = G - R$$

$$G = (E_{rt}^i - E_{r0}^i)$$

$$R = E_{r0}^i (E_{nt}/E_{n0}) - E_{r0}^i$$

dimana : E_{r0} = PDRB tahun awal observasi

E_{rt} = PDRB tahun akhir observasi

E_{n0} = PDB tahun awal observasi

E_{nt} = PDB tahun akhir observasi

Kriteria pengambilan keputusan didapatkan dari analisis ini adalah sebagai berikut :

- Apabila nilai S negatif, berarti pertumbuhan daerah tersebut lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional;
- Apabila nilai S positif, berarti pertumbuhan daerah tersebut lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional.

Different Shift (Sd)

$$Sd = \sum \{(E_{rt}^i/E_{r0}^i) - (E_{nt}^i/E_{n0}^i)\} E_{r0}^i$$

Proportional Shift (Sp)

$$Sp = \sum \{(E_{nt}^i/E_{n0}^i) - (E_{nt}/E_{n0})\} E_{r0}^i$$

Kriteria pengambilan keputusan didapatkan dari analisis ini adalah sebagai berikut :

- Apabila nilai Sp positif menyatakan bahwa pada daerah tersebut pertumbuhan terspesialisasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tingkat nasional;

- Apabila nilai S_p negatif menyatakan bahwa pada daerah tersebut pertumbuhan terspesialisasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tingkat nasional;
- Apabila nilai S_d positif menyatakan bahwa sektor-sektor di daerah tersebut tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan nasional secara keseluruhan atau pertumbuhan nasional secara agregat;
- Apabila nilai S_d negatif menyatakan bahwa sektor-sektor di daerah tersebut tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan nasional secara keseluruhan atau pertumbuhan nasional secara agregat.

Kelebihan metode *shift share* (Sriwahyuni, 2002) adalah :

- a. Mudah diaplikasikan karena sederhana;
- b. Data relatif mudah diperoleh;
- c. Dapat digunakan untuk analisa yang lebih detail, misalnya sub sektor;
- d. Memisahkan antara kontribusi nasional dengan dampak internal daerah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kelemahan metode *shift share* (Sriwahyuni, 2002) adalah :

- a. Tidak dapat berfungsi sebagai alat prediksi;
- b. Tidak memberikan informasi mengenai kapasitas daerah tersebut untuk mempertahankan industri yang sedang berkembang atau bagaimana daerah memilih investasi yang berlokasi di daerah tersebut.

2.4. Analisis Multiplier

Pertumbuhan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan tersebut berkaitan dengan pendapatan per kapita penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendidikan dan sebagainya.

Analisis basis dan nonbasis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah ataupun lapangan kerja. Persamaan dalam menentukan pengganda basis dengan menggunakan data lapangan kerja adalah sebagai berikut (Tarigan, 2009) :

$$\text{Pengganda Basis} = \frac{\text{Total Lapangan Kerja}}{\text{Lapangan Kerja Basis}}$$

Dimana, total lapangan kerja merupakan gabungan antara besarnya lapangan kerja basis dan lapangan kerja non basis. Dari persamaan tersebut, rasio yang diperoleh dinamakan pengganda basis lapangan kerja (*employment base multiplier*). Dengan diketahuinya nilai pengganda basis maka dapat diperkirakan jumlah tenaga kerja yang terserap apabila terjadi perubahan pada lapangan kerja basis. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan menggunakan ukuran lain, seperti pendapatan (*value added*). Maka formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Pengganda Basis Pendapatan} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Pendapatan Sektor Basis}}$$

Kriteria pengambilan keputusan yang diperoleh dari pendekatan dengan menggunakan metode *multiplier* ini adalah seberapa besar sektor-sektor basis memiliki *multiplier effect* bagi perekonomian secara keseluruhan di daerah tersebut. Apabila *multiplier effect* besar, berarti sektor basis memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa sektor basis merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif di daerah yang bersangkutan.

Multiplier merupakan rasio dari perubahan *output*/pendapatan dalam keseimbangan akibat dari perubahan variabel yang mempengaruhinya. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa *demand* merupakan satu-satunya penggerak pertumbuhan. Konsepnya adalah peningkatan permintaan atas suatu produk dapat menyebabkan peningkatan produksi terhadap produk tersebut. Keadaan ini mengakibatkan munculnya permintaan baru terhadap produk dari perusahaan/industri lain sebagai penyedia bahan baku atas produk tersebut. Demikian juga terhadap peningkatan *output* dari perusahaan/industri penyedia bahan baku tersebut akan menimbulkan permintaan lain terhadap perusahaan/industri yang terkait lainnya, begitu seterusnya. Sehingga dampak peningkatan produksi dari satu kegiatan usaha dapat menyebabkan peningkatan *output* secara keseluruhan yang lebih besar dari peningkatan semula. Proses ini dinamakan *multiplier*.

2.5. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis berdasarkan

faktor internal dan eksternal. Analisis SWOT juga dapat dikatakan sebagai instrumen analisis yang digunakan dalam pendekatan manajemen strategis untuk mencari strategi terpilih dan juga tepat yang akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam analisis SWOT ini dilakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan atau organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan *Strength* (kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), akan tetapi secara bersamaan meminimalkan *Weakness* (kelemahan) dan *Threat* (ancaman). Metode ini sering digunakan dalam evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT ini hanya menggambarkan situasi yang terjadi dan bukan sebagai pemecah masalah.

Di dalam analisis ini, ditentukan terlebih dahulu kondisi yang termasuk ke dalam faktor-faktor internal, yakni *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), maupun eksternal, yaitu *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman). Setelah itu dilakukan pemetaan analisis SWOT dengan membuat matriks dari faktor-faktor tersebut yang ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Selanjutnya dilakukan perbandingan untuk menentukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman yang paling kecil.

Sebelum menjabarkan analisis SWOT dan langkah-langkahnya, yang pertama harus dijabarkan adalah :

- a. Apa visi yang hendak dicapai oleh seseorang atau suatu badan sehubungan dengan proses perencanaan strategis yang akan dilakukan;
- b. Bagaimana misi yang hendak dicapai sebagai tindak lanjut dari penetapan visi yang dilakukan sebelumnya;
- c. Apakah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan perencanaan strategis yang akan dilakukan tersebut.

Setelah rumusan tersebut dibuat, tindakan selanjutnya adalah menentukan *stakeholder* utama. Hal ini sangat penting karena dalam manajemen strategik di sektor publik, seringkali memiliki *stakeholder* yang banyak dan juga seringkali berbeda tujuannya dan saling bertentangan. Tujuan analisis SWOT dalam

manajemen strategis adalah untuk mendapatkan strategi dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Pengidentifikasian Lingkungan Internal (S – W)
- Pengidentifikasian Lingkungan Eksternal (O – T)
- Menetapkan Alternatif Strategi
- Menetapkan Grand Strategi
- Merumuskan Strategi Terpilih (SO, WO, ST atau WT)

IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
EFAS	Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
OPPORTUNITY (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Tentukan faktor-faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREAT (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 2.1. Matrik SWOT

Sumber : Rangkuti (2009)

Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan ataupun sektor publik adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan bagaimana peluang atau ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dari matriks ini dapat menghasilkan empat kelompok kemungkinan alternatif strategis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 2.1.

Menurut Hendrawan Supratno dalam Soesilo (2002), ada dua pendekatan manajemen strategis yaitu pendekatan Harvard (versi Michael J Porter) yang lebih condong kepada sisi permintaan (dengan analisis TOWS) dan pendekatan Chicago (versi Hammel dan Prahalad) yang lebih condong pada analisis SWOT karena mengutamakan sisi pasokan (*supply*).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai strategi dan kebijakan perekonomian daerah sudah cukup banyak dibahas, dari beberapa penelitian yang menggunakan metoda yang sama dalam pembahasannya terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan, di antaranya :

Primarani Pangidaran (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perekonomian dan Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan Kota Jambi” yang mengambil kesimpulan bahwa Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Subsektor Pengangkutan merupakan sektor-sektor basis dapat berfungsi sebagai penggerak sektor-sektor lain di Kota Jambi sehingga menjadi sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Untuk itulah disarankan agar Pemerintah Kota Jambi mengembangkan kedua sektor tersebut dengan tujuan mempercepat pembangunan perekonomian di daerah tersebut.

Suhendri (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi Unggulan dan kebijakan perekonomian Kota Jambi” mengambil kesimpulan bahwa sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cukup baik dan perlu menjadi prioritas utama dalam pengembangannya di Kota Jambi adalah Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Tanpa Migas, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Subsektor Hotel dan Subsektor Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta Subsektor Jasa-jasa.

Sedangkan Akmal Malik (2002) dalam penelitiannya “Analisis Perekonomian dan Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung” mengambil kesimpulan bahwa Sektor Unggulan Tanaman Pangan sebagai prioritas utama, Sektor Unggulan Kehutanan sebagai prioritas kedua, dan Sektor Unggulan Penggalian sebagai prioritas ketiga.

Penelitian ini menggunakan metodologi yang sama dengan penelitian-penelitian di atas akan tetapi untuk lokasi penelitian di Kota Bekasi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan identifikasi terhadap sektor-sektor apa saja yang menjadi unggulan di Kota Bekasi serta arah pengembangannya.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berdekatan dengan ibukota Jakarta. Hari jadi kota ini diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

3.1. Kondisi Geografis

3.1.1. Letak Wilayah

Letak Kota Bekasi yang strategis merupakan keuntungan bagi Kota Bekasi terutama dari segi komunikasi dan perhubungan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Secara geografi, posisi Kota Bekasi terletak pada 106°55' Bujur Timur dan 6°7' – 6°15' Lintang Selatan dengan ketinggian 19 m di atas permukaan laut.

3.1.2. Administrasi Wilayah

Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Luas wilayah Kota Bekasi sekitar 210,49 km². Kecamatan Mustika Jaya merupakan wilayah terluas, yaitu 24,75 km² atau 11,75 % dari keseluruhan luas wilayah Kota Bekasi. Sedangkan Kecamatan Bekasi Timur merupakan wilayah terkecil dengan luas 13,49 km² atau 6,41 % dari luas Kota Bekasi. Luas wilayah beserta distribusi kelurahan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2008

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan
		Ha	%	
1	Pondok Gede	1.629	7,74	5
2	Jati Sampurna	1.449	6,88	5
3	Pondok Melati	1.857	8,82	4
4	Jati Asih	2.200	10,45	6
5	Bantar Gebang	1.704	8,10	4
6	Mustika Jaya	2.473	11,75	4
7	Bekasi Timur	1.349	6,41	4
8	Rawa Lumbu	1.567	7,44	4
9	Bekasi Selatan	1.496	7,11	5
10	Bekasi Barat	1.889	8,97	5
11	Medan Satria	1.471	6,99	4
12	Bekasi Utara	1.965	9,33	6
Total		21.049	100	56

Sumber : BPS Kota Bekasi

3.1.3. Kondisi Wilayah

Kondisi Kota Bekasi, terutama penggunaan lahan, umumnya didominasi oleh lahan yang sudah terbangun dengan luas 10.802,35 Ha atau sekitar 51,32 % dari seluruh luas wilayah. Sedangkan luas lahan yang tidak atau belum terbangun seluas 10.246,65 Ha atau sekitar 48,68 % dari luas wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

- Lahan terbangun, terbagi atas :
 - Permukiman (46,48 %)
 - Industri (1,90 %)
 - Perdagangan dan jasa (1,55 %)
 - Pendidikan (0,87 %)
 - Pemerintahan dan bangunan umum (0,52 %)
- Lahan tidak terbangun, terbagi atas :
 - Pertamanan (0,05 %)
 - Lapangan olah raga (0,35 %)
 - Lahan hijau (2,4 %)
 - Pemakaman (0,53 %)
 - Pertanian (45,35 %)

(sumber : Badan Perencanaan Daerah, 2003)

3.1.4. Kependudukan

Menurut definisi dari BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, akan tetapi bertujuan untuk menetap. Tabel 3.2. menunjukkan jumlah penduduk Kota Bekasi menurut kecamatan dan jenis kelamin, dari tabel tersebut penduduk Kota Bekasi pada Tahun 2008 sebanyak 1.890.171 jiwa yang terdiri dari 943.953 jiwa penduduk laki-laki dan 946.218 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 99,76.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2008

No	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Pondok Gede	101.136	108.149	209.285
2	Jati Sampurna	32.633	32.700	65.333
3	Pondok Melati	52.047	53.058	105.105
4	Jati Asih	74.801	75.577	150.378
5	Bantar Gebang	38.152	37.308	75.460
6	Mustika Jaya	51.256	49.670	100.926
7	Bekasi Timur	104.268	104.732	209.000
8	Rawa Lumbu	71.964	72.912	144.876
9	Bekasi Selatan	80.684	82.582	163.266
10	Bekasi Barat	107.343	107.350	214.693
11	Medan Satria	69.112	68.170	137.282
12	Bekasi Utara	160.557	154.010	314.567
Jumlah		943.953	946.218	1.890.171
2007		885.978	914.768	1.800.746

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2009 (BPS Kota Bekasi)

Jumlah penduduk Kota Bekasi relatif lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Perkembangan jumlah penduduk yang relatif tinggi merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Bekasi dalam hal penyediaan tenaga kerja. Dalam Rencana Strategis Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 menyatakan tinjauan terhadap struktur penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa pertumbuhan dan jumlah penduduk usia produktif lebih

besar dari pada penduduk usia tidak produktif, sehingga beban ketergantungan penduduk relatif rendah dan dapat lebih produktif dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Sedangkan banyaknya penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan ditunjukkan pada Tabel 3.3. Dari tabel tersebut terlihat bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, dimana wilayah ini merupakan wilayah permukiman. Sedangkan wilayah Kecamatan Bekasi Timur merupakan daerah terpadat kedua di Kota Bekasi, karena wilayah ini merupakan pusat kota dan juga pernah menjadi pusat pemerintahan disamping sebagai permukiman warga. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki infrastruktur yang cenderung lebih baik dari wilayah lain, termasuk Kecamatan Bekasi Utara.

Tabel 3.3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Km² menurut Kecamatan Tahun 2008

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Pondok Gede	16,29	209.285	12.847
2	Jati Sampurna	14,49	65.333	4.509
3	Pondok Melati	18,56	105.105	5.663
4	Jati Asih	22,00	150.378	6.835
5	Bantar Gebang	17,05	75.460	4.426
6	Mustika Jaya	24,73	100.926	4.081
7	Bekasi Timur	13,49	209.000	15.493
8	Rawa Lumbu	15,67	144.876	9.245
9	Bekasi Selatan	14,96	163.266	10.914
10	Bekasi Barat	18,89	214.693	11.365
11	Medan Satria	14,71	137.282	9.333
12	Bekasi Utara	19,65	314.567	16.008
Jumlah		210,49	1.890.171	8.980
2007		210,49	1.800.746	8.555

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2009 (BPS Kota Bekasi)

3.2. Sarana dan Prasarana

Selain menjadi wilayah permukiman, Kota Bekasi juga berkembang sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri. Pemerintah Kota Bekasi terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat, seperti

Universitas Indonesia

pasar tradisional dan modern, perumahan, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan serta masih banyak lagi. Dukungan sarana transportasi darat di Kota Bekasi terus dievaluasi dan dikembangkan. Kereta Api, angkutan kota dan bus telah memiliki trayek cukup banyak sehingga mobilitas masyarakat, barang, dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Kota Bekasi juga memiliki akses langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta melalui jalur bebas hambatan melalui pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur melintasi Jakarta atau sebaliknya.

3.2.1. Transportasi

Di Kota Bekasi, transportasi darat merupakan urat nadi dalam pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian, jalan sebagai satu-satunya alat penghubung antara satu wilayah ke wilayah lain dalam kota maupun dengan wilayah di luar Kota Bekasi.

Tabel 3.4. Panjang Jalan menurut Jenis Jalan dan Fungsi Jalan Tahun 2008 (km)

Jenis Jalan	Primer			Sekunder			Jumlah (km)
	Arteri	Kolektor	Lokal	Arteri	Kolektor	Lokal	
Jalan Tol	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Lingkar Luar	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Negara	20,07	-	-	-	-	-	20,07
Jalan Provinsi	-	28,75	-	-	-	-	28,75
Jalan Kota	-	-	61,04	5,61	142,45	292,40	501,50
Jalan Lingkungan/swasta	-	-	-	-	-	655,30	655,30
Jalan Irigasi	-	-	-	5,31	2,66	-	7,97
Jumlah (km)	20,07	28,75	61,04	10,92	145,11	947,70	1.213,59

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka (2009)

Menurut data dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2009 yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bekasi, panjang jalan di Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2008 mencapai 1.213,5 km. Dari seluruh jalan yang ada di Kota Bekasi, terdiri dari 729,95 km atau 60 % jalan dalam kondisi baik dan 483,63 km atau 40 % jalan dalam kondisi buruk atau rusak.

Karena akses ke dan menuju Kota Bekasi hanya dapat dilalui dengan menggunakan jalur perhubungan darat, maka transportasi umum yang

berkembang di Kota Bekasi adalah angkutan darat dan angkutan kereta api. Sarana angkutan darat ini terdiri dari kendaraan umum dan kendaraan bukan umum. Selain angkutan darat ini juga terdapat kereta api yang merupakan sarana transportasi massal yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi, terutama untuk tujuan luar Kota Bekasi seperti Jakarta.

Tabel 3.5. Panjang Jalan menurut Jenis Jalan dan Kondisi Jalan Tahun 2008

Uraian	Panjang Jalan (km)	Kondisi			
		baik (km)	%	buruk (km)	%
Arteri Primer	20,07	15,00	75	5,07	25
Kolektor Primer	28,75	20,00	70	8,75	30
Lokal Primer	61,04	40,00	66	21,04	34
Arteri Sekunder	10,92	6,55	60	4,37	40
Kolektor Sekunder	145,11	80,00	55	65,11	45
Lokal Sekunder	292,40	175,40	60	117,00	40
Lingkungan	655,30	393,00	60	262,30	40
Jumlah (km)	1213,59	729,95	60	483,64	40

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka (2009)

3.2.2. Komunikasi

Pos dan telekomunikasi merupakan sarana komunikasi yang juga berkembang di Kota Bekasi. Kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi terus berkembang seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi. PT. Telkom yang telah dikenal sebagai perusahaan telekomunikasi, terutama untuk *fixed telephone*, berupaya menjangkau wilayah yang belum memiliki akses telekomunikasi ini dengan kemudahan bertelekomunikasi bagi masyarakat melalui perluasan akses.

Di masa sekarang ini, penggunaan telepon genggam mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan jasa pos sebagai alat komunikasi. Dengan harga yang semakin terjangkau oleh masyarakat dan fasilitas yang kian lengkap, penggunaan telepon khususnya telepon genggam menjadi primadona. Meskipun saat ini pemakaian telepon genggam telah sangat populer di masyarakat, komunikasi melalui jasa pos tidak begitu saja tergusur. Hal ini

dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman, baik surat maupun paket barang.

Di samping telepon dan pos, juga terdapat sarana telekomunikasi lain yang mulai marak digunakan, yaitu internet. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kemudahan mengakses internet pun dirasakan juga di Kota Bekasi. Akses internet yang pada mulanya hanya dapat diakses di perusahaan-perusahaan besar, saat ini telah banyak dijumpai perumahan warga yang memiliki akses internet pribadi maupun dalam bentuk warnet. Bahkan sekarang ini telah banyak pusat perbelanjaan yang telah memberikan fasilitas *hotspot* sehingga mempermudah akses internet bagi pengunjung. Hanya saja data mengenai jumlah penggunaan teknologi ini belum ada.

Untuk saat ini data mengenai satuan sambungan telepon yang ada di Kota Bekasi terdapat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Potensi PT. Telkom Kota Bekasi Tahun 2008

Sentra Telepon Otomat (STO)	Kapasitas Sentral (STO)	Wartel	Telepon Umum Coin	Pelanggan (SST)	C Card MDK	Internet	Jumlah
Bekasi	53.739	1.914	316	41.229	27	320	43.806
Pekayon	70.622	2.182	219	56.888	27	288	59.604
Kranji	60.226	2.440	274	48.206	39	561	51.520
Bantar Gebang	23.346	747	63	19.039	7	68	19.924
Kali Abang	49.602	1.057	68	41.501	1	185	42.812

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, BPS (2009)

Seiring dengan makin banyaknya pengguna telepon genggam, saat ini telah banyak operator telekomunikasi yang melayani konsumen di Kota Bekasi, seperti Telkomsel, Indosat, Excelkomindo, Mobile8, dan lainnya. Hanya saja data mengenai jumlah pelanggan pengguna telepon genggam belum tersedia secara luas.

3.2.3. Listrik dan Air Minum

Listrik dan air minum merupakan kebutuhan vital terutama di perkotaan. Kedua komoditi ini sudah sangat luas digunakan, baik oleh rumah tangga maupun badan usaha. Menurut data BPS Kota Bekasi, pelanggan listrik di Kota Bekasi sebagian ada yang menjadi pelanggan PT. PLN cabang Jakarta dan cabang

Kabupaten Bekasi. Perkembangan daya terpasang pada unit rumah tangga mengalami kenaikan jumlah, dari 257.090.570 VA pada Tahun 2007 menjadi 369.527.323.055 VA pada Tahun 2008. Sedangkan secara keseluruhan, perkembangan daya terpasang mengalami kenaikan dari 580.048.776 VA pada Tahun 2007 menjadi 1.022.076.844.385 VA pada Tahun 2008 yaitu mengalami kenaikan sebesar 143,73 %. Selengkapnya tercantum dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Perkembangan Daya Terpasang menurut Jenis Pelanggan Tahun 2004 - 2008 (VA)

Jenis Pelanggan	2004	2005	2006	2007	2008
Sosial	17.515.700	9.136.518	9.559.198	10.702.933	11.467.897.502
Rumah Tangga	466.832.900	259.479.050	244.319.748	257.090.570	369.527.323.055
Bisnis	123.232.150	61.011.975	60.573.870	76.722.613	124.125.052.748
Industri	738.086.500	206.449.995	215.161.495	228.298.395	505.515.046.401
Gedung Pemerintah dan Penerangan Jalan	16.726.287	6.228.416	6.766.717	7.234.265	11.441.524.679
Jumlah	1.362.393.537	542.305.954	536.381.028	580.048.776	1.022.076.844.385

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, BPS (2009)

Untuk pelanggan air minum dari PDAM, volume air terjual juga mengalami kenaikan dari 15.716.463 m³ pada Tahun 2007 menjadi 32.350.852 m³ pada Tahun 2008.

Tabel 3.8. Cakupan Pelayanan PDAM Kota Bekasi Tahun 2008

Bulan	Volume Air yang terjual (m ³)
Januari	2.697.677
Februari	2.696.373
Maret	2.696.373
April	2.401.359
Mei	2.614.717
Juni	3.003.126
Juli	2.674.691
Agustus	2.676.804
September	2.762.487
Oktober	2.662.675
Nopember	2.714.165
Desember	2.750.405
Jumlah	32.350.852
2007	15.716.463

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, BPS (2009)

Untuk saat ini, kondisi pelayanan air bersih di Kota Bekasi ditangani oleh PDAM Bekasi dan PDAM Tirta Patriot milik Pemerintah Kota Bekasi. Cakupan pelayanannya meliputi :

- a. PDAM Bekasi, wilayah pelayanannya terdiri dari : Rawa Tembaga, Pondok Ungu (Bekasi Utara dan Medan Satria), Bekasi Kota, Rawa Lumbu serta Pondok Gede.
- b. PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi (IPA Teluk Buyung) dengan wilayah pelayanan Bekasi Utara.

Kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) untuk melayani kebutuhan air bersih di Kota Bekasi terdiri dari :

- IPA Rawa Tembaga dengan kapasitas pengolahan 190 liter/detik, bersumber dari air permukaan. Wilayah pelayanannya adalah Rawa Tembaga dengan tingkat pelayanan 18,40 %, meliputi Bekasi Barat dan Selatan.
- IPA Poncol/Bekasi Kota dengan kapasitas pengolahan 480 liter/detik, bersumber dari air permukaan. Wilayah pelayanan Bekasi Timur dengan tingkat pelayanan 41,22 %.
- IPA Pondok Ungu dengan kapasitas pengolahan 300 liter/detik, bersumber dari air permukaan. Wilayah pelayanan Wisma Asri dan PDAM Tirta Patriot dengan tingkat pelayanan 94,51 %, yang melayani Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara.
- IPA Rawa Lumbu dengan kapasitas pengolahan 260 liter/detik, bersumber dari air permukaan. Wilayah pelayanan Rawa Lumbu dengan tingkat pelayanan 17,10 %.
- IPA Teluk Buyung dengan kapasitas pengolahan 450 liter/detik, bersumber dari air permukaan. Wilayah pelayanan sebagian perumahan di Bekasi Utara dengan tingkat pelayanan 8,82 %.
- IPA Pondok Gede dengan kapasitas pengolahan 5 liter/detik, bersumber dari sumur bor. Wilayah pelayanan Pondok Gede.

Sedangkan masyarakat yang belum terlayani PDAM, umumnya menggunakan air dari sumur gali maupun sumur bor.

3.3. Potensi Ekonomi Daerah

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi adalah pengembangan potensi ekonomi. Berkaitan dengan pembangunan daerah, potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga dapat berkembang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat bahkan mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang mandiri dan berkesinambungan.

3.3.1. Pertanian

Kota Bekasi termasuk ke dalam daerah ekonomi perkotaan, dimana kegiatan perekonomian lebih bertumpu pada sektor sekunder dan tersier. Hal ini dikarenakan sumber daya alam merupakan sektor yang tidak dimiliki oleh Kota Bekasi, terutama yang termasuk ke dalam Sektor Pertambangan dan Penggalian di dalam struktur PDRB. Sedangkan Sektor Pertanian, kecuali Sub Sektor Kehutanan, masih dimiliki oleh Kota Bekasi dengan prosentase yang terus menurun.

Peranan Sektor Pertanian di Kota Bekasi relatif kecil karena keberadaannya tergeser oleh Sektor Industri Pengolahan dan juga Perdagangan. Meskipun demikian, Kota Bekasi masih memiliki potensi di sektor ini. Berkurangnya peran sektor ini tercermin dari penggunaan lahan untuk sawah yang relatif kecil. Pada tahun 2008, luas lahan sawah di Kota Bekasi hanya 600 Ha atau 2,85 % dari luas wilayah Kota Bekasi (21.049 Ha). Dilihat dari sistem pengairan yang digunakan, sebagian sawah di Kota Bekasi masih merupakan sawah tadah hujan (344 Ha). Sedangkan lahan sawah yang sudah menggunakan sistem pengairan irigasi teknis dan irigasi setengah teknis masing-masing hanya seluas 190 Ha dan 36 Ha (Kota Bekasi Dalam Angka, 2009). Berbagai jenis tanaman yang masih dimiliki oleh Kota Bekasi meliputi :

- Jenis tanaman pangan yang dibudidayakan dan menghasilkan di Kota Bekasi pada Tahun 2008 adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Meskipun produksinya mengalami penurunan dibandingkan dengan produksi pada Tahun 2007. Untuk produksi padi terjadi penurunan dari 8.363 ton pada

Tahun 2007 menjadi 6.932 ton pada Tahun 2008. Penurunan produksi ini umumnya disebabkan oleh berkurangnya luas panen.

- Jenis tanaman sayuran yang menghasilkan produksi di Kota Bekasi, yaitu : sawi, kacang panjang, bayam, ketimun, cabe, terong, dan kangkung. Produksi terbesar sayuran adalah kangkung sebanyak 4.280 ton, sawi sebanyak 5.798 ton, dan bayam 6.298 ton.
- Sedangkan jenis buah-buahan yang memiliki potensi di Kota Bekasi adalah rambutan, durian, jambu biji, mangga, duku, sawo, pepaya, dan pisang. Untuk produksi, rambutan mendominasi produksi buah di Kota Bekasi sebanyak 2.678,44 ton, durian 778,49 ton, jambu biji 889,55 ton. Jeruk siam, mangga, duku, sawo, pepaya, dan pisang produksinya masih di bawah 800 ton.
- Jenis tanaman perkebunan yang menghasilkan di Kota Bekasi antara lain : jahe, pandan, dan kencur. Jahe merupakan jenis tanaman perkebunan yang produktivitasnya cukup tinggi, yaitu 320,06 kwintal per Ha.

Untuk Sub Sektor Peternakan, populasi ayam ras pedaging merupakan jenis unggas yang paling banyak yaitu sebanyak 893.486 ekor. Sedangkan jenis unggas lainnya, ayam buras sebanyak 518.340 ekor, ras petelur sebanyak 187.000 ekor, dan itik sebanyak 16.076 ekor.

Sedangkan dari segi Sub Sektor Perikanan, seluruh produksi ikan di Kota Bekasi merupakan hasil produksi perikanan kolam/tambak, yang mencapai hasil sebanyak 398,60 ton pada Tahun 2008. Jenis ikan yang paling banyak produksinya adalah ikan mas sebanyak 112,50 ton, dengan nilai produksi sebesar Rp 1.856.904.000,-.

3.3.2. Industri

Sektor Industri masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Bekasi. Pembangunan industri di Kota Bekasi diarahkan untuk meningkatkan struktur perekonomian yang mampu meningkatkan pemulihan perekonomian rakyat. Tabel 3.9. menunjukkan investasi dan tenaga kerja yang terserap di sektor industri. Dari berbagai jenis industri yang berkembang di Kota Bekasi, industri dengan modal PMA dan PMDN cenderung tetap dalam hal investasi maupun tenaga kerja yang diserap. Sedangkan industri

Universitas Indonesia

kecil, menengah dan besar mengalami fluktuasi, baik dari segi jumlah, investasi yang ditanamkan di Kota Bekasi maupun tenaga kerja yang mampu diserap.

Tabel 3.9. Jumlah Investasi Sektor Industri di Kota Bekasi Tahun 2004 - 2008

Tahun	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Investasi (rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja
2004	1. PMA	79	175.303.115.504	32.733
	2. PMDN	56	1.338.012.177.490	16.823
	3. Industri Menengah dan Besar	249	534.846.307.001	26.498
	4. Industri Kecil	813	55.105.504.000	13.340
	Total	1.197	2.103.267.103.995	89.394
2005	1. PMA	79	8.975.583.115.504	32.733
	2. PMDN	56	1.338.012.177.490	16.823
	3. Industri Menengah dan Besar	286	654.364.207.001	32.194
	4. Industri Kecil	868	83.772.026.000	12.616
	Total	1.289	11.051.731.525.995	94.366
2006	1. PMA	79	8.975.583.115.504	32.733
	2. PMDN	56	1.338.012.177.490	16.823
	3. Industri Menengah dan Besar	318	742.421.407.001	34.640
	4. Industri Kecil	931	99.955.126.000	16.222
	Total	1.384	11.155.971.825.995	100.418
2007	1. PMA	79	8.975.583.115.504	32.733
	2. PMDN	56	1.338.012.177.490	16.823
	3. Industri Menengah dan Besar	34	111.701.079.000	2.541
	4. Industri Kecil	68	17.692.402.000	1.038
	Total	237	10.442.988.773.994	53.135
2008	1. PMA	79	8.975.583.115.504	32.733
	2. PMDN	56	1.338.012.177.490	16.823
	3. Industri Menengah dan Besar	53	212.351.042.000	4.922
	4. Industri Kecil	87	23.327.360.000	1.565
	Total	275	10.549.273.694.994	56.043

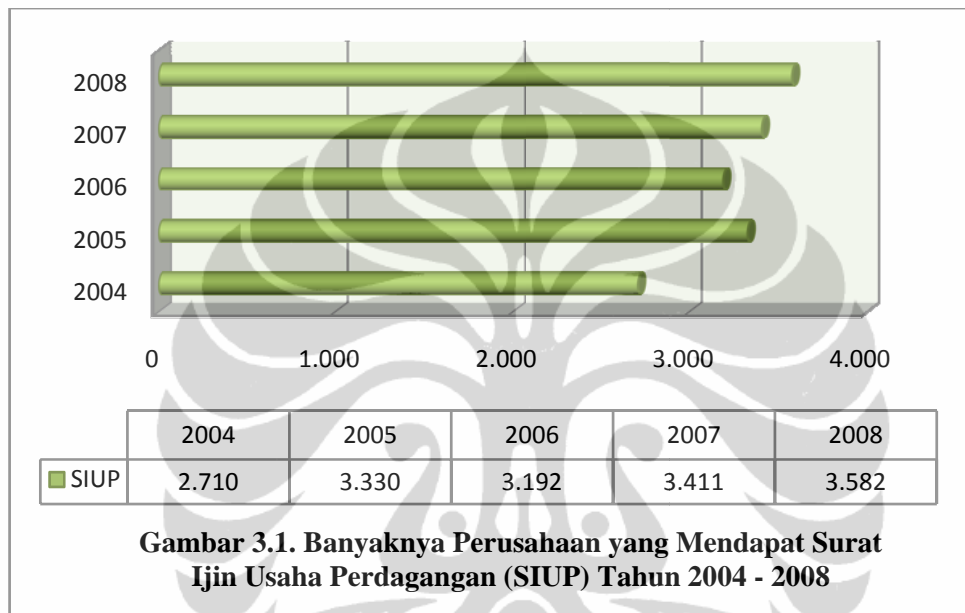
Sumber : RKPD Kota Bekasi (Bappeda) dan Data Potensi Industri Kota Bekasi (Disperindag)

Dari tabel tersebut, industri menengah dan besar serta industri kecil mengalami peningkatan hingga Tahun 2006. Sedangkan pada Tahun 2007 mengalami penurunan yang sangat tajam, akan tetapi pada Tahun 2008 mulai mengalami kenaikan.

3.3.3. Perdagangan

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003, visi Kota Bekasi adalah Kota unggul dalam jasa dan perdagangan bernuansa ihsan. Aspek perdagangan di Kota Bekasi menduduki posisi yang penting dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2004, perkembangan usaha perdagangan di Kota Bekasi cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dengan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran. Sejalan dengan itu, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan mengalami kenaikan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. yang merupakan data penerbitan SIUP menurut BPS Kota Bekasi dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2009.



Gambar 3.1. Banyaknya Perusahaan yang Mendapat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Tahun 2004 - 2008

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2009 (BPS)

3.3.4. Hotel dan Pariwisata

Hotel dan pariwisata merupakan salah satu sektor usaha yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hotel dan pariwisata juga diusahakan untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan juga pihak swasta. Hingga saat ini, Kota Bekasi memang belum memiliki daerah tujuan wisata khusus seperti daerah lain di Jawa Barat. Akan tetapi Kota Bekasi tetap berusaha untuk mengembangkan industri pariwisata.

Data-data mengenai hotel yang ada di Kota Bekasi menurut BPS Kota Bekasi hingga Tahun 2008, terdapat 16 hotel yang terdiri dari 1 buah hotel berbintang empat, 1 buah hotel berbintang satu dan 14 hotel tanpa bintang (Kota Bekasi Dalam Angka 2009).

3.3.5. UKM dan Koperasi

Secara nasional pelaku usaha skala kecil dan menengah serta koperasi mencapai 99,9 % dengan kontribusi sebesar 56,70 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan pelaku usaha skala besar yang memiliki aset bersih perusahaan di atas USD 15 juta hanya berjumlah 1 %, akan tetapi kontribusinya sebesar 43,30 % terhadap PDB. Untuk itu peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha, baik skala kecil maupun menengah, akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan aktivitas sektor riil serta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kota Bekasi, UKM memegang peranan penting dalam perekonomian karena 58,38 % dari PDRB merupakan kontribusi dari UKM, sedangkan usaha besar sebesar 41,62 % (PDRB Kota Bekasi Tahun 2006).

Tabel 3.10. Target dan Realisasi Jumlah Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003 - 2008 (unit)

TAHUN	USAHA KECIL		USAHA MENENGAH	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2003	48.595	76.430	776	7.883
2004	50.053	77.956	799	7.961
2005	51.555	79.515	823	8.040
2006	53.101	81.105	847	8.120
2007	54.694	83.727**	873	8.201**
2008	56.335	85.659**	899	8.282**

Sumber : RKPd Kota Bekasi Tahun 2008 (2007)

Ket : ** Angka Realisasi Berdasarkan Prediksi

Di Kota Bekasi, jumlah pelaku UKM selama Tahun 2003 – 2006 mengalami peningkatan melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Kota Bekasi 2003 – 2008. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Dari sejumlah UKM yang ada di Kota Bekasi, UKM dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran adalah UKM terbanyak, yaitu 55,35 %, Sektor Jasa-jasa 18,85 % serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebanyak 11,48 % dengan total omzet sebesar Rp 824,5 milyar. Akan tetapi dari sekian banyak UKM, sebanyak 93,55 % UKM tidak berbadan hukum (non formal/sektor informal) sehingga akan menghambat akses baik permodalan,

proses produksi maupun pemasaran yang selanjutnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan UKM itu sendiri.

Pengembangan UKM tidak terlepas dari pengembangan koperasi. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2008 jumlah koperasi di Kota Bekasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2003 berjumlah 481 unit, sedangkan koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 126 unit koperasi. Pada Tahun 2004 jumlah koperasi 489 unit, Tahun 2005 sebanyak 545 unit, dan pada Tahun 2006 sebanyak 560 unit, dan koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 187 unit koperasi dengan total omzet per tahunnya mencapai Rp 273 milyar.

3.4. Kebijakan dan Program Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam dokumen Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008, visi Daerah seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Propeda adalah “Bekasi Kota Unggul dalam Jasa dan Perdagangan Bernuansa Ihsan”. Dengan visi tersebut diharapkan Kota Bekasi menjadi daerah yang unggul dalam jasa dan perdagangan dalam naungan semangat spiritual. Jasa di sini meliputi pelayanan publik maupun pelayanan jasa kegiatan ekonomi. Sedangkan misi yang dicanangkan adalah “Memberikan Pelayanan yang Terbaik melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha di Bidang Jasa dan Perdagangan dengan Ikhlas”.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, strategi program yang akan dilaksanakan pada periode 2003 – 2008 adalah :

1. Memantapkan tumbuh kembangnya sentra-sentra ekonomi dengan titik berat pada kegiatan jasa dan perdagangan;
2. Meningkatkan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah dengan upaya mengurangi pengangguran dan permasalahan sosial lainnya;
4. Memantapkan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM);
5. Meningkatkan efektivitas kelembagaan, tata laksana dan aparatur daerah serta pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);

6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga pendidikan;
7. Memantapkan kerukunan kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
9. Meningkatkan perluasan sarana penerangan dan informasi;
10. Mewujudkan tata ruang dengan memperhatikan arah pengembangan kota serta keseimbangan antar wilayah.

Dengan strategi tersebut, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kota Bekasi 2003 – 2008 meliputi rencana kerja peningkatan pelayanan di beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, ekonomi serta infrastruktur dan penataan ruang. Untuk bidang ekonomi, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan tujuan dalam peningkatan pelayanan prima di bidang ekonomi kerakyatan yang merata. Dari tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yaitu : peningkatan PDRB, LPE, PAD, peningkatan investasi dan juga peningkatan nilai ekspor. Selain itu peningkatan pelaku usaha kecil dan menengah serta pembentukan lembaga keuangan syariah juga menjadi penetapan dalam sasaran dari kebijakan Renstra 2003 – 2008.

Arah kebijakan rencana kerja dengan tujuan Meningkatkan Pelayanan Prima di Bidang Ekonomi Kerakyatan yang Merata selama periode tersebut, meliputi :

- Meningkatkan kemitraan usaha untuk memajukan perekonomian daerah;
- Memberdayakan potensi agribisnis dan industri rumah tangga;
- Membentuk dan mengembangkan lembaga keuangan syariah dan BUMD;
- Meningkatkan penanaman modal (investasi);
- Pengembangan wisata daerah.

BAB 4

ANALISIS PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN

Pada bab ini dibahas mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, kontribusi sektor-sektor terhadap perekonomian serta analisis perekonomian dan potensi unggulan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menguji sektor atau sub sektor dalam perekonomian Kota Bekasi dan juga menentukan sektor atau sub sektor pilihan yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi Kota Bekasi.

Pengujian ini merupakan tahap untuk menganalisa sektor-sektor perekonomian Kota Bekasi dibandingkan dengan perekonomian daerah yang lebih tinggi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Proses menganalisa perekonomian tersebut terdiri dari analisa pertumbuhan perekonomian, kontribusi sektoral, analisa *location quotient* (LQ), analisa *shift share*, dan juga *multiplier*. Proses analisis ini menggunakan data sekunder, yaitu data Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi, PDRB Provinsi Jawa Barat, dan juga Pendapatan Indonesia. Uraian lebih lanjut mengenai analisis tersebut sebagaimana diuraikan dalam sub bab berikut ini :

4.1. Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah/negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dinyatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tersebut lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, dilakukan analisis terhadap 9 (sembilan) sektor dalam struktur PDRB Kota Bekasi dari Tahun 2004 hingga 2008. Dari data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 tersebut akan dapat diketahui pertumbuhan riil perekonomian Kota Bekasi pada tahun analisis. Gambaran perekonomian Kota Bekasi seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan Sektoral Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 -2008 (persen)

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	LPE
2004	3,22	0,00	3,92	5,78	4,86	2,33	7,53	4,38	5,76	5,38
2005	2,04	0,00	5,30	4,33	4,98	6,06	8,48	4,85	5,15	5,65
2006	-2,27	0,00	4,27	7,77	6,42	8,35	5,56	12,37	6,96	6,07
2007	4,91	0,00	7,00	9,17	11,97	5,14	2,54	15,85	3,45	6,44
2008 *	1,66	0,00	4,52	9,47	8,97	5,24	16,65	7,35	2,63	5,94
Rata-rata	1,91	0,00	5,00	7,30	7,44	5,42	8,15	8,96	4,79	5,90

Sumber : BPS Kota Bekasi (telah diolah kembali)

Keterangan :

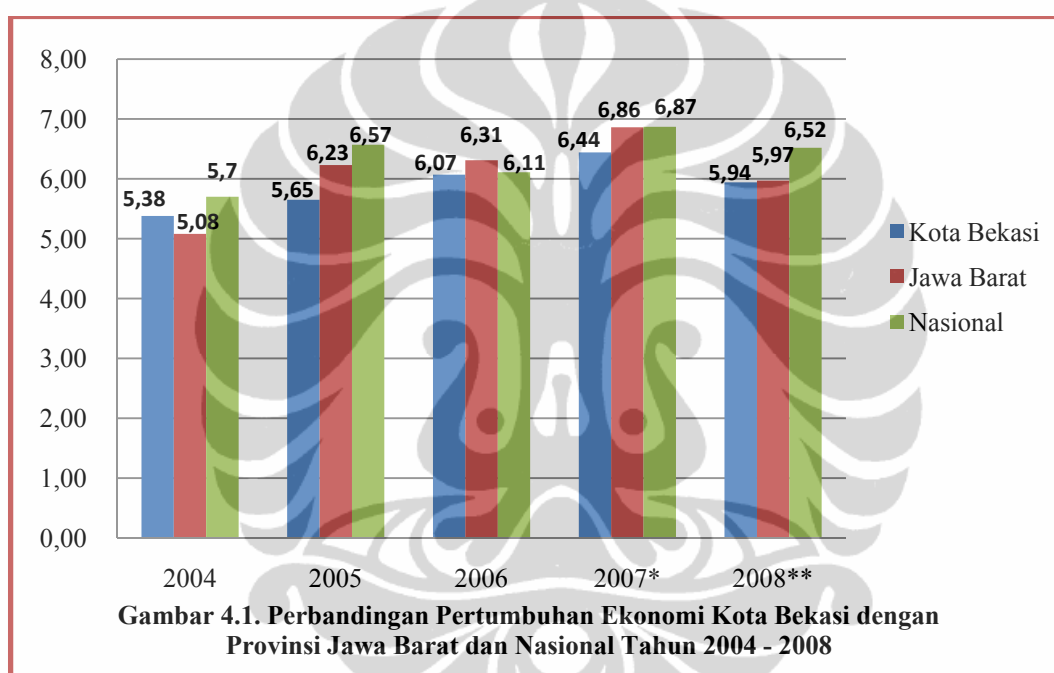
1. Pertanian; 2. Pertambangan dan Pengalihan; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas dan Air Bersih; 5. Bangunan/Konstruksi; 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7. Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa

*) Angka sementara

Berdasarkan data tersebut ditunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun selama tahun analisis kecuali pada Tahun 2008 terdapat sedikit penurunan dimana salah satu penyebabnya adalah krisis finansial dunia. Untuk melihat gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang lebih jelas, perlu dibandingkan antara pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan juga Nasional. Pada Gambar 4.1. ditunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2004 – 2008 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan juga Nasional. Di sana terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mengikuti pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat maupun Nasional, meskipun perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang dialami tidaklah sama.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mengalami sedikit fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dialami oleh Kota Bekasi adalah pada Tahun 2007

dengan laju pertumbuhan sebesar 6,44 %. Akan tetapi selama tahun analisis, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan juga Nasional. Dengan kata lain, Kota Bekasi belum memiliki atau belum menjadi daerah dengan spesialisasi tertentu yang menyebabkan Kota Bekasi mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi melebihi tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional sehingga secara umum pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan Nasional.



Sumber data : PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, Badan Pusat Statistik

Dari perbandingan pertumbuhan ekonomi ketiga wilayah perekonomian, ditunjukkan pada Tabel 4.2., terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi maupun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Data tingkat pertumbuhan ekonomi terendah maupun tertinggi ketiga wilayah tersebut berada pada tahun yang sama, yaitu Tahun 2004 untuk tingkat pertumbuhan ekonomi terendah sedangkan pada Tahun 2007 ketiga wilayah perekonomian tersebut mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara

umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mengikuti pola pertumbuhan ekonomi Jawa Barat maupun Nasional dengan besaran tingkat pertumbuhan yang berbeda.

Tabel 4.2. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2004 - 2008 (persen)

Cakupan Wilayah Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi		Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
	Terendah	Tertinggi	
Kota Bekasi	5,38	6,44	5,90
Provinsi Jawa Barat	5,08	6,86	6,09
Nasional	5,70	6,87	6,35

Sumber data : diolah dari data PDRB BPS

4.2. Kontribusi Sektoral

Kontribusi sektoral dimaksud adalah peranan sektor-sektor dalam struktur perekonomian Kota Bekasi, dalam hal ini ditunjukkan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi. Kontribusi di sini dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan juga Nasional pada Tahun 2004 hingga 2008. Dengan menganalisis kontribusi sektoral, akan dapat diketahui sektor apa saja dalam struktur PDRB yang dominan dan memberi sumbangan yang besar dalam menopang pertumbuhan perekonomian Daerah. Perubahan kontribusi sektoral ini juga dapat memberikan informasi mengenai kinerja masing-masing sektor dalam membentuk struktur perekonomian di daerah tersebut. Kontribusi sektoral Kota Bekasi ini sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Dengan adanya pembangunan yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, biasanya terjadi perubahan struktur perekonomian. Pergeseran komposisi sumbangan (*share*) yang diberikan oleh setiap sektor ekonomi dapat terjadi sejalan dengan perkembangan tingkat PDRB. Dengan demikian pertumbuhan PDRB dapat merubah struktur perekonomian suatu daerah. Perubahan struktur perekonomian pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara proses akumulasi perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Interaksi tersebut selanjutnya akan menimbulkan efek terhadap perubahan komposisi barang/jasa yang diproduksi di daerah tersebut. Berdasarkan data PDRB pada Tabel 4.3. dapat

Universitas Indonesia

dilihat bahwa kontribusi sektoral terbesar di Kota Bekasi selama Tahun 2004 – 2008 adalah Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan rata-rata kontribusi yang sangat mencolok dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu rata-rata sebesar 46,19 % dan 27,75 %. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi hampir mencapai 75 % dari total PDRB Kota Bekasi.

Tabel 4.3. Kontribusi Sektoral dalam PDRB Kota Bekasi atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 - 2008 (persen)

NO	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*	2008**	Rata-rata
1	Pertanian	1,11	1,08	0,99	0,98	0,94	1,02
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	46,82	46,67	45,87	46,11	45,50	46,19
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,43	3,39	3,44	3,53	3,65	3,49
5	Bangunan	3,49	3,47	3,48	3,66	3,77	3,57
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,48	27,59	28,18	27,84	27,65	27,75
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,69	7,90	7,86	7,57	8,34	7,87
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,46	3,44	3,64	3,96	4,01	3,70
9	Jasa-jasa	6,50	6,47	6,53	6,34	6,15	6,40

Sumber data : Diolah dari PDRB BPS

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, juga Sektor Jasa-jasa cukup besar kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bekasi, yaitu dengan rata-rata kontribusinya berturut-turut sebesar 7,87 % dan 6,40 %. Bila dijumlahkan kontribusi keempat sektor tersebut memberikan kontribusi hampir mencapai 90 % dari total PDRB Kota Bekasi. Sedangkan kontribusi rata-rata dari sektor-sektor lainnya di bawah 4 %, yaitu Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Sektor Bangunan; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. Khusus untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian tidak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi karena Kota Bekasi memang tidak memiliki sumber daya alam berupa barang tambang ataupun migas. Dengan demikian Sektor Pertanian menjadi sektor yang berkontribusi terkecil dalam perekonomian Kota Bekasi.

Besarnya rata-rata kontribusi keempat sektor tersebut dalam struktur PDRB Kota Bekasi menandakan bahwa Kota Bekasi merupakan daerah perkotaan sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi yang menyangkut keempat sektor tersebut

menjadi dominan. Sedangkan sektor-sektor lainnya merupakan sektor pendukung dan pelengkap bagi kegiatan-kegiatan yang menyangkut keempat sektor tersebut.

Untuk melengkapi analisis pertumbuhan dan kontribusi sektoral, perlu kiranya disajikan hubungan keduanya dalam suatu matriks atau tabel sebagai upaya untuk mempertajam analisis perekonomian kota secara sektoral. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hubungan Kontribusi Sektoral dengan Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Bekasi atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 - 2008

Laju Pertumbuhan	Kontribusi		
	< 5 %	5 % - 10 %	≥ 10 %
Di bawah rata-rata PDRB (< 5,90 %)	1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian	1. Jasa-Jasa	1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan, Hotel & Restoran
Di atas rata-rata PDRB (≥ 5,90 %)	1. Listrik, Gas & Air Bersih 2. Bangunan 3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1. Pengangkutan & Komunikasi	

Sumber : PDRB Kota Bekasi (telah diolah kembali)

Dari Tabel 4.4. terlihat bahwa 9 (sembilan) sektor perekonomian di Kota Bekasi terbagi ke dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

- Laju pertumbuhan yang lambat (di bawah rata-rata atau kurang dari 5,90 %) dan kontribusi terhadap PDRB juga rendah (di bawah 5 %), terdiri dari Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Kota Bekasi memiliki lahan sawah yang kurang dari 2,85 % dari luas wilayah Kota Bekasi yang umumnya berupa tanah kering yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai area pertanian. Dari 2,85 % atau 600 ha luas lahan sawah tersebut, sistem pengairan yang digunakan sebagian sawah di Kota Bekasi masih merupakan sawah tadah hujan yaitu 344 ha dan yang sudah menggunakan sistem pengairan teknis dan irigasi setengah teknis hanya seluas 190 ha dan 36 ha (Kota Bekasi dalam Angka, 2009). Sedangkan untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian tidak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi karena Kota Bekasi memang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat digolongkan ke dalam sektor tersebut.

Universitas Indonesia

- Laju pertumbuhan lambat dengan kontribusi terhadap PDRB cukup tinggi (antara 5 % hingga 10 %), yaitu Sektor Jasa-jasa.
- Laju pertumbuhan lambat akan tetapi kontribusi terhadap PDRB tinggi (di atas 10 %), terdiri dari Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kedua sektor ini merupakan dua sektor dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kota Bekasi, hanya saja laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.
- Laju pertumbuhan tinggi sedangkan kontribusi terhadap PDRB rendah, terdiri dari tiga sektor yaitu : Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Bangunan serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Tingginya laju pertumbuhan pada periode analisis disebabkan terjadi pembangunan atau pengembangan yang cukup tinggi pada periode tersebut. Akan tetapi tingginya pertumbuhan belum mampu mendorong tingginya kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap struktur perekonomian Kota Bekasi;
- Laju pertumbuhan tinggi dengan kontribusi terhadap PDRB cukup tinggi, yaitu Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Selain tingginya pengembangan atau pembangunan pada periode analisis, sektor tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kota Bekasi.

Dalam kaitannya dengan perekonomian yang lebih tinggi, yakni kontribusi sektoral PDRB Kota Bekasi terhadap pembentukan sektor dan PDRB Provinsi Jawa Barat serta kontribusi sektoral PDRB Kota Bekasi terhadap pembentukan sektor dan PDB Nasional, hal ini terangkum sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. hingga Tabel 4.7. Penyajian data-data tersebut dimaksudkan untuk mengetahui peran Kota Bekasi terhadap perekonomian tersebut.

Dari Tabel 4.5. terlihat bahwa kontribusi sektoral Kota Bekasi terhadap masing-masing sektor dalam PDRB Provinsi Jawa Barat masih di bawah 10 % dan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat di bawah 3 %. Dari 9 sektor tersebut, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, masing-masing sekitar 2,3 % dan 1,38 %.

Sedangkan sektor lainnya hanya mampu berkontribusi di bawah 0,5 % terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.5. Kontribusi Sektor-sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap Sektor dan Pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 - 2008 (persen)

Sektor/Lapangan Usaha	Kontribusi									
	2004		2005		2006		2007		2008	
	Terhadap Sektor	Terhadap PDRB	Terhadap Sektor	Terhadap PDRB	Terhadap Sektor	Terhadap PDRB	Terhadap Sektor	Terhadap PDRB	Terhadap Sektor	Terhadap PDRB
1. Pertanian	0,359	0,0562	0,361	0,0539	0,354	0,0496	0,363	0,0487	0,360	0,0562
2. Pertambangan & Penggalian	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000
3. Industri Pengolahan	5,513	2,3618	5,317	2,3412	5,102	2,2963	5,074	2,2994	4,856	2,2678
4. Listrik, Gas & Air Bersih	7,147	0,1732	7,045	0,1701	7,902	0,1724	8,144	0,1762	8,508	0,1820
5. Bangunan	5,880	0,1762	5,238	0,1742	5,268	0,1743	5,440	0,1827	5,438	0,1879
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,708	1,3864	6,854	1,3842	6,920	1,4107	6,735	1,3880	6,820	1,3784
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,289	0,3879	8,976	0,3962	8,782	0,3934	8,178	0,3775	9,568	0,4155
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,309	0,1746	5,291	0,1724	5,908	0,1822	6,073	0,1975	6,211	0,2001
9. Jasa-jasa	4,564	0,3281	4,518	0,3248	4,467	0,3268	4,490	0,3164	4,528	0,3064
TOTAL		5,0444		5,0169		5,0058		4,9863		4,9942

Sumber : PDRB Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Untuk kontribusi Kota Bekasi terhadap perekonomian Nasional, baik kontribusi terhadap masing-masing sektor maupun terhadap pembentukan PDB Nasional, ditunjukkan pada Tabel 4.6. Pada tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap sektor perekonomian Nasional masih di bawah 4 %, dengan 3 (tiga) sektor yang berturut-turut memberikan sumbangan tertinggi adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sekitar 3,464 %, Sektor Industri Pengolahan sekitar 1,24 %, serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sekitar 1,102 %. Sedangkan rata-rata kontribusi tertinggi sektor-sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap pembentukan PDB Nasional masih berasal dari Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, masing-masing sekitar 0,33 % dan 0,2 %.

Dari kontribusi rata-rata masing-masing sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi, juga terhadap masing-masing sektor dan pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat serta terhadap masing-masing sektor dan pembentukan PDB Nasional ditunjukkan pada Tabel 4.7. Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi rata-rata sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 4,844 %. Sedangkan

kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap perekonomian Nasional adalah sekitar 0,73 %.

Tabel 4.6. Kontribusi Sektor-sektor dalam PDRB Kota Bekasi terhadap Sektor dan Pembentukan PDB Nasional atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 - 2008 (persen)

Sektor/Lapangan Usaha	Kontribusi									
	2004		2005		2006		2007		2008	
	Terhadap Sektor	Terhadap PDB	Terhadap Sektor	Terhadap PDB	Terhadap Sektor	Terhadap PDB	Terhadap Sektor	Terhadap PDB	Terhadap Sektor	Terhadap PDB
1. Pertanian	0,050	0,008	0,050	0,008	0,047	0,007	0,048	0,007	0,046	0,007
2. Pertambangan & Penggalian	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3. Industri Pengolahan	1,244	0,345	1,237	0,341	1,225	0,335	1,247	0,336	1,252	0,329
4. Listrik, Gas & Air Bersih	3,501	0,025	3,436	0,025	3,501	0,025	3,464	0,026	3,419	0,026
5. Bangunan	0,403	0,026	0,393	0,025	0,386	0,025	0,398	0,027	0,405	0,027
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,126	0,203	1,103	0,202	1,123	0,206	1,089	0,203	1,069	0,200
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,882	0,057	0,848	0,058	0,784	0,057	0,705	0,055	0,705	0,060
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,255	0,026	0,250	0,025	0,266	0,027	0,286	0,029	0,284	0,029
9. Jasa-jasa	0,473	0,048	0,473	0,047	0,476	0,048	0,462	0,046	0,446	0,045
TOTAL		0,738		0,731		0,731		0,728		0,724

Sumber : PDRB Kota Bekasi dan PDB Indonesia (telah diolah kembali)

Tabel 4.7. Kontribusi Rata-rata Sektor terhadap Pembentukan PDRB Kota Bekasi, Sektor dan Pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat serta terhadap Sektor dan Pembentukan PDB Nasional atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 - 2008 (persen)

Sektor/Lapangan Usaha	Kontribusi				
	PDRB Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat		Nasional	
		Terhadap Sektor	Terhadap PDRB	Terhadap Sektor	Terhadap PDB
1. Pertanian	1,02	0,360	0,051	0,048	0,007
2. Pertambangan & Penggalian	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Industri Pengolahan	46,19	5,080	2,237	1,241	0,337
4. Listrik, Gas & Air Bersih	3,49	7,749	0,169	3,464	0,025
5. Bangunan	3,57	5,453	0,173	0,397	0,026
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	27,75	6,807	1,344	1,102	0,203
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,87	8,759	0,381	0,785	0,057
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,70	5,758	0,179	0,268	0,027
9. Jasa-jasa	6,40	4,513	0,310	0,466	0,047
TOTAL			4,844		0,730

Sumber : PDRB Kota Bekasi, PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDB Indonesia (telah diolah kembali)

4.3. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tahap awal terhadap keunggulan komparatif suatu daerah. Pada penelitian ini akan dikemukakan perbandingan relatif antara perekonomian Kota Bekasi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat dan juga perekonomian Kota Bekasi terhadap perekonomian Nasional. Berdasarkan perhitungan LQ ini akan diketahui sektor apa saja yang memiliki peranan yang besar dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu daerah melalui identifikasi sektor basis dan non basis.

4.3.1. Analisis LQ Kota Bekasi terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data PDRB, kontribusi sektoral maupun laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi dan juga Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan perhitungan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) untuk mencari keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat dengan cara mengidentifikasi sektor basis dan non basis. Data yang dipergunakan adalah data atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk melihat perkembangan perekonomian secara riil yang pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi.

Pada Tabel 4.8. ditunjukkan hasil perhitungan LQ berdasarkan data PDRB Kota Bekasi dan PDRB Provinsi Jawa Barat. Dengan perhitungan tersebut dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis, dimana $LQ > 1$, dan sektor non basis, dimana nilai $LQ < 1$. Sektor-sektor yang termasuk dalam sektor basis menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dengan bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah maka arus pendapatan yang masuk ke daerah tersebut (*monetary inflow*) akan bertambah karena adanya kegiatan ekspor. Sebaliknya, kegiatan non basis menyebabkan keluarnya pendapatan dari daerah tersebut ke daerah lain (*monetary outflow*) yang disebabkan daerah bersangkutan mengimpor kekurangan akan permintaan di sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah.

Tabel 4.8. Hasil Perhitungan LQ Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat serta Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kota Bekasi atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 - 2008

LAPANGAN USAHA	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO														
	2004			2005			2006			2007			2008		
	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket
1. PERTANIAN	1,11	0,071	NB	1,08	0,072	NB	0,99	0,071	NB	0,98	0,073	NB	0,94	0,072	NB
1.1. Tanaman Bahan Makanan	0,37	0,032		0,37	0,034		0,34	0,033		0,33	0,034		0,32	0,034	
1.2. Tanaman Perkebunan	0,02	0,018		0,01	0,006		0,00	0,006		0,00	0,005		0,00	0,005	
1.3. Peternakan	0,72	0,311		0,69	0,308		0,64	0,295		0,63	0,315		0,60	0,320	
1.4. Kehutanan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
1.5. Perikanan	0,01	0,010		0,01	0,010		0,01	0,011		0,01	0,012		0,01	0,012	
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	46,82	1,093	B	46,67	1,060	B	45,87	1,019	B	46,11	1,018	B	45,50	0,974	NB
3.1. Industri Migas	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
3.2. Industri Tanpa Migas	46,82	1,093		46,67	1,060		45,87	1,019		46,11	1,018		45,50	0,974	
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,43	1,417	B	3,39	1,404	B	3,44	1,579	B	3,53	1,633	B	3,65	1,707	B
4.1. Listrik	1,94	0,935		1,95	0,932		1,97	1,043		2,00	1,071		2,06	1,150	
4.2. Gas	1,36	6,771		1,31	7,060		1,35	8,519		1,40	9,204		1,47	6,977	
4.3. Air Bersih	0,14	0,895		0,13	0,956		0,13	0,948		0,13	0,910		0,13	0,908	
5. BANGUNAN	3,49	1,166	B	3,47	1,044	B	3,48	1,052	B	3,66	1,091	B	3,77	1,091	B
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	27,48	1,330	B	27,59	1,366	B	28,18	1,382	B	27,84	1,351	B	27,65	1,368	B
6.1. Perdagangan Besar & Eceran	23,45	1,355		23,53	1,358		24,00	1,366		23,77	1,326		23,73	1,354	
6.2. Hotel	0,12	0,305		0,12	0,280		0,13	0,299		0,12	0,280		0,12	0,267	
6.3. Restoran	3,91	1,316		3,94	1,612		4,06	1,694		3,95	1,745		3,80	1,700	
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7,69	1,643	B	7,90	1,789	B	7,86	1,754	B	7,57	1,640	B	8,34	1,920	B
7.1. Pengangkutan	6,83	2,050		7,02	2,244		6,95	2,260		6,70	2,238		7,50	2,726	
7.1.1. Angkutan Rel	0,08	0,767		0,08	0,828		0,09	0,868		0,08	1,012		0,08	1,004	
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	5,72	2,168		5,90	2,323		5,78	2,324		5,58	2,277		5,35	2,388	
7.1.3. Angkutan Laut	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7.1.4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7.1.5. Angkutan Udara	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	1,03	4,537		1,03	4,753		1,08	4,941		1,03	5,381		2,07	11,247	
7.2. Komunikasi	0,86	0,639		0,88	0,684		0,91	0,648		0,87	0,538		0,84	0,526	
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	3,46	1,053	B	3,44	1,055	B	3,64	1,180	B	3,96	1,218	B	4,01	1,246	B
8.1. Bank	0,32	0,397		0,50	0,588		0,54	0,754		0,96	0,983		1,13	1,059	
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,46	1,670		0,45	1,464		0,43	1,206		0,43	1,039		0,41	0,978	
8.3. Sewa Bangunan	2,34	1,409		2,14	1,353		2,28	1,504		2,21	1,607		2,13	1,670	
8.4. Jasa Perusahaan	0,34	0,618		0,35	0,670		0,39	0,783		0,37	0,747		0,35	0,754	
9. JASA-JASA	6,50	0,905	NB	6,47	0,901	NB	6,53	0,892	NB	6,34	0,901	NB	6,15	0,908	NB
9.1. Pemerintahan Umum	3,36	0,822		3,35	0,833		3,37	0,843		3,27	0,850		3,17	0,863	
9.2. Swasta	3,14	1,014		3,12	0,987		3,16	0,952		3,08	0,961		2,97	0,962	
9.2.1. Sosial Kemasyarakatan	0,59	1,098		0,60	1,066		0,58	1,052		0,57	1,001		0,56	1,039	
9.2.2. Hiburan & Rekreasi	0,06	0,766		0,06	0,782		0,06	0,737		0,06	0,734		0,06	0,690	
9.2.3. Perorangan & Rumah Tangga	2,49	1,004		2,46	0,976		2,52	0,938		2,45	0,960		2,35	0,954	

Sumber : PDRB Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi (diolah)

Dari hasil perhitungan LQ, jika dibandingkan terhadap Provinsi Jawa Barat seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.8. terlihat bahwa Kota Bekasi memiliki 5 (lima) sektor yang berturut-turut termasuk dalam kegiatan basis selama periode analisis. Kelima sektor tersebut adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor

Pengangkutan dan Komunikasi; serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Untuk Sektor Industri Pengolahan selama periode analisis, hanya pada Tahun 2008 yang tidak termasuk kegiatan basis sedangkan dari Tahun 2004 – 2007 sektor tersebut termasuk ke dalam kegiatan basis. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan terhadap PDRB Kota Bekasi pada sektor tersebut, akibatnya terjadi sedikit penurunan pada nilai LQ sektor ini sehingga kurang dari 1 yang menyatakan bahwa sektor tersebut termasuk ke dalam sektor non basis pada Tahun 2008. Akan tetapi secara umum, sektor ini berpotensi menjadi kegiatan basis karena kontribusinya yang sangat besar (hampir 50 %) terhadap PDRB Kota Bekasi dan juga selama 4 tahun sebelumnya selama periode analisis, sektor ini merupakan kegiatan basis.

Dari keenam sektor tersebut, yang berpotensi sebagai kegiatan basis di Kota Bekasi dan juga merupakan keunggulan komparatif Kota Bekasi, dilihat dari kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi dan juga kondisi perkotaan yang dimiliki, terdapat dua sektor yang paling strategis yaitu Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Secara rata-rata, kedua sektor tersebut memiliki kontribusi tertinggi dalam PDRB Kota Bekasi dan juga nilai LQ yang lebih besar dari 1 (Tabel 4.9.) yang berarti memiliki keunggulan komparatif dalam perekonomian Kota Bekasi.

Tabel 4.9. Kontribusi Rata-rata Sektor dalam PDRB Kota Bekasi Tahun 2004 - 2008 dan Nilai LQ Sektoral

SEKTOR/LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Bekasi	Nilai LQ
1. Pertanian	1,02	0,072
2. Pertambangan & Penggalian	0,00	-
3. Industri Pengolahan	46,19	1,033
4. Listrik, Gas & Air Bersih	3,49	1,548
5. Bangunan	3,57	1,089
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	27,75	1,359
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,87	1,749
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,70	1,150
9. Jasa-jasa	6,40	0,901

Sumber : PDRB Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat (diolah)

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, meskipun kontribusinya masih di bawah 10 % terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi, merupakan sektor dengan kontribusi ketiga tertinggi terhadap perekonomian Kota Bekasi. Akan tetapi sektor ini memiliki nilai LQ yang tertinggi yaitu 1,92 pada Tahun 2008 atau secara rata-rata memiliki nilai LQ sebesar 1,749. Dengan pertimbangan tersebut, sektor ini juga bisa dikatakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi Kota Bekasi. Dengan demikian ketiga sektor tersebut dinilai merupakan sektor basis yang strategis untuk dikembangkan dalam perekonomian Kota Bekasi.

Dengan demikian, sektor atau kegiatan basis yang dimiliki Kota Bekasi adalah sektor sekunder, yaitu Sektor Industri Pengolahan, dan sektor tersier, yakni Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Hal ini sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur penunjang untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan sektor atau kegiatan non basis terdiri dari Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan Penggalian yang merupakan sektor primer (sektor sumber daya alam atau penyedia bahan baku) termasuk ke dalam sektor-sektor yang tidak dimiliki oleh Kota Bekasi serta Sektor Jasa-jasa.

Melihat kontribusi Sektor Jasa-jasa yang berada pada urutan keempat dalam pembentukan PDRB Kota Bekasi dan nilai LQ yang mendekati 1, sektor ini memiliki peluang atau potensi untuk dikembangkan menjadi sektor atau kegiatan basis. Dapat dikatakan bahwa tidak sama halnya dengan sektor primer yang kontribusinya sangat kecil bahkan terus menurun, Sektor Jasa-jasa memiliki kontribusi yang cukup baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Dari nilai LQ yang kurang dari 1, Sektor Jasa-jasa memang termasuk ke dalam golongan sektor atau kegiatan non basis. Hal ini bisa jadi karena struktur perekonomian Kota Bekasi masih berada pada level dimana industri mulai atau bahkan sedang berkembang pesat, sedangkan jasa atau pelayanan perkembangannya masih belum melebihi perkembangan industri.

4.3.2. Analisis LQ Kota Bekasi terhadap Perekonomian Nasional

Berdasarkan data PDRB Kota Bekasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008, dapat dilakukan perhitungan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Bekasi dibandingkan dengan perekonomian Nasional. Dengan cara yang sama terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat, akan diketahui sektor atau kegiatan basis maupun non basis.

Dari hasil perhitungan LQ (Tabel 4.10), Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sektor yang berturut-turut selama periode analisis termasuk ke dalam sektor atau kegiatan basis dan 1 (satu) sektor berpotensi sebagai sektor atau kegiatan basis karena dalam 2 (dua) tahun terakhir selama periode analisis terjadi penurunan sehingga nilai LQ kurang dari 1. Sektor-sektor tersebut adalah :

- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan
- Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang mengalami sedikit penurunan pendapatan pada dua tahun terakhir pada periode analisis.

Dari keempat sektor ekonomi tersebut, berdasarkan nilai LQ rata-rata dan kontribusi rata-rata sektor PDRB Kota Bekasi (Tabel 4.11), terdapat 7 (tujuh) sektor dan sub sektor yang termasuk ke dalam kegiatan basis, yaitu :

- a. Industri Pengolahan tanpa Migas (1,699);
- b. Listrik (3,977);
- c. Gas (11,32);
- d. Air Bersih (1,155);
- e. Perdagangan Besar dan Eceran (1,561);
- f. Restoran (1,599);
- g. Pengangkutan (1,727).

Tabel 4.10. Hasil Perhitungan LQ Kota Bekasi terhadap Perekonomian Indonesia serta Kontribusi Sektorial terhadap PDRB Kota Bekasi atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 - 2008

LAPANGAN USAHA	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO														
	2004			2005			2006			2007			2008		
	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket	Kontr (%)	Nilai LQ	Ket
1. PERTANIAN	1,11	0,068	NB	1,08	0,068	NB	0,99	0,064	NB	0,98	0,065	NB	0,94	0,064	NB
1.1. Tanaman Bahan Makanan	0,37	0,045		0,37	0,047		0,34	0,044		0,33	0,045		0,32	0,044	
1.2. Tanaman Perkebunan	0,02	0,006		0,01	0,002		0,00	0,002		0,00	0,002		0,00	0,002	
1.3. Peternakan	0,72	0,344		0,69	0,345		0,64	0,327		0,63	0,337		0,60	0,330	
1.4. Kehutanan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
1.5. Perikanan	0,01	0,003		0,01	0,003		0,01	0,003		0,01	0,003		0,01	0,003	
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	46,82	1,686	B	46,67	1,691	B	45,87	1,676	B	46,11	1,712	B	45,50	1,730	B
3.1. Industri Migas	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
3.2. Industri Tanpa Migas	46,82	1,686		46,67	1,691		45,87	1,676		46,11	1,712		45,50	1,730	
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,43	4,745	B	3,39	4,698	B	3,44	4,789	B	3,53	4,758	B	3,65	4,721	B
4.1. Listrik	1,94	3,903		1,95	3,921		1,97	3,956		2,00	3,998		2,06	4,104	
4.2. Gas	1,36	12,510		1,31	12,039		1,35	12,466		1,40	10,666		1,47	8,917	
4.3. Air Bersih	0,14	1,146		0,13	1,156		0,13	1,146		0,13	1,155		0,13	1,172	
5. BANGUNAN	3,49	0,546	NB	3,47	0,538	NB	3,48	0,529	NB	3,66	0,547	NB	3,77	0,559	NB
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	27,48	1,527	B	27,59	1,508	B	28,18	1,536	B	27,84	1,496	B	27,65	1,476	B
6.1. Perdagangan Besar & Eceran	23,45	1,589		23,53	1,562		24,00	1,585		23,77	1,543		23,73	1,526	
6.2. Hotel	0,12	0,156		0,12	0,156		0,13	0,167		0,12	0,160		0,12	0,166	
6.3. Restoran	3,91	1,581		3,94	1,602		4,06	1,657		3,95	1,610		3,80	1,547	
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7,69	1,196	B	7,90	1,160	B	7,86	1,073	B	7,57	0,968	NB	8,34	0,973	NB
7.1. Pengangkutan	6,83	1,646		7,02	1,696		6,95	1,672		6,70	1,675		7,50	1,945	
7.1.1. Angkutan Rel	0,08	2,025		0,08	2,271		0,09	2,367		0,08	2,383		0,08	2,117	
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	5,72	3,186		5,90	3,339		5,78	3,307		5,58	3,292		5,35	3,201	
7.1.3. Angkutan Laut	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7.1.4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7.1.5. Angkutan Udara	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	1,03	1,026		1,03	1,044		1,08	1,084		1,03	1,098		2,07	2,338	
7.2. Komunikasi	0,86	0,377		0,88	0,330		0,91	0,287		0,87	0,229		0,84	0,178	
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	3,46	0,345	NB	3,44	0,342	NB	3,64	0,365	NB	3,96	0,393	NB	4,01	0,392	NB
8.1. Bank	0,32	0,070		0,50	0,113		0,54	0,126		0,96	0,224		1,13	0,260	
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,46	0,572		0,45	0,548		0,43	0,528		0,43	0,511		0,41	0,477	
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
8.4. Sewa Bangunan	2,34	0,800		2,14	0,720		2,28	0,751		2,21	0,720		2,13	0,679	
8.5. Jasa Perusahaan	0,34	0,202		0,35	0,201		0,39	0,215		0,37	0,202		0,35	0,189	
9. JASA-JASA	6,50	0,641	NB	6,47	0,646	NB	6,53	0,651	NB	6,34	0,635	NB	6,15	0,615	NB
9.1. Pemerintahan Umum	3,36	0,700		3,35	0,730		3,37	0,749		3,27	0,737		3,17	0,729	
9.2. Swasta	3,14	0,588		3,12	0,575		3,16	0,572		3,08	0,553		2,97	0,527	
9.2.1. Sosial Masyarakat	0,59	0,419		0,60	0,423		0,58	0,405		0,57	0,398		0,56	0,386	
9.2.2. Hiburan & Rekreasi	0,06	0,152		0,06	0,153		0,06	0,148		0,06	0,144		0,06	0,136	
9.2.3. Perorangan & Rumah Tangga	2,49	0,706		2,46	0,684		2,52	0,685		2,45	0,661		2,35	0,628	

Sumber : PDB Indonesia dan PDRB Kota Bekasi (diolah)

Tabel 4.11. Kontribusi Rata-rata Sektor dalam PDRB Kota Bekasi Tahun 2004 - 2008 dan Nilai LQ terhadap PDB Indonesia

SEKTOR/LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Bekasi	Nilai LQ
1. Pertanian	1,02	0,066
2. Pertambangan & Penggalian	0,00	-
3. Industri Pengolahan	46,19	1,699
- Industri Pengolahan tanpa Migas	46,19	1,699
4. Listrik, Gas & Air Bersih	3,49	4,742
- Listrik	1,98	3,977
- Gas	1,38	11,320
- Air Bersih	0,13	1,155
5. Bangunan	3,57	0,544
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	27,75	1,509
- Perdagangan Besar dan Eceran	23,70	1,561
- Restoran	3,93	1,599
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,87	1,074
- Pengangkutan	7,00	1,727
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,70	0,367
9. Jasa-jasa	6,40	0,638

Sumber : PDRB Kota Bekasi dan PDB Indonesia (diolah)

Penjelasan mengenai sektor maupun sub sektor yang termasuk basis sehingga memiliki keunggulan komparatif bagi Kota Bekasi adalah :

a. Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan yang ada dan berkembang di Kota Bekasi hanyalah industri pengolahan tanpa migas. Sektor ini memiliki kontribusi yang paling tinggi dengan nilai kontribusi rata-rata mendekati 50 % dari PDRB Kota Bekasi. Dengan kontribusi yang sangat tinggi dan juga nilai LQ Kota Bekasi terhadap perekonomian Nasional yang juga terbilang tinggi menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan basis yang sangat baik untuk dikembangkan karena banyak sekali dampak positif yang ditimbulkan dari sektor ini, antara lain :

- Sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga bisa mengurangi pengangguran. Selama periode 1998 – 2002, Sektor Industri Pengolahan yang ada dan telah berproduksi di Kota Bekasi sebanyak 256 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 77.527 orang dan memberikan kontribusi rata-rata terhadap PDRB Kota Bekasi sebesar 47,89 % dengan laju pertumbuhan mencapai 13,51 % per tahun (Renstra

Universitas Indonesia

Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008). Sehingga menjadi suatu keuntungan apabila Sektor Industri berkembang dan terus bertambah karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat;

- Sektor ini merupakan sektor yang menghasilkan produk yang bisa diperdagangkan. Dengan berkembangnya sektor ini memungkinkan sektor lain yang menyediakan bahan baku bisa ikut berkembang, terlebih lagi bila industri tersebut menggunakan bahan baku lokal. Salah satu industri pengolahan yang berkembang dan paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri makanan dan minuman, yaitu 9.015 pekerja (Kota Bekasi dalam Angka, 2009). Pengembangan industri makanan dan minuman berarti meningkatkan konsumsi bahan baku yang dibutuhkan, oleh karenanya pengembangan sektor ini diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain khususnya Sektor Pertanian dalam memenuhi kebutuhan akan bahan baku.

b. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Pada sektor ini, seluruh sub sektornya memiliki nilai LQ lebih besar dari 1. Hal ini lebih dikarenakan kondisi Kota Bekasi yang merupakan daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi terutama akibat adanya arus urbanisasi sehingga berpengaruh terhadap tingginya konsumsi listrik, gas maupun air bersih. Ditambah lagi dengan adanya konversi penggunaan minyak tanah menjadi gas pada Tahun 2007 yang berakibat pada bertambahtingginya konsumsi gas oleh masyarakat luas, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun oleh pedagang. Secara keseluruhan, konsumsi listrik dan air bersih mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2008 perkembangan daya yang terpasang mencapai 1.022.076.844.385 VA, sedangkan pada Tahun 2007 daya terpasang sebesar 580.048.776 VA untuk konsumsi listrik. Untuk konsumsi air bersih, pada Tahun 2008 tercatat volume air yang terjual adalah 32.350.852 m³, sedangkan Tahun 2007 tercatat 15.716.463 m³ volume air yang terjual (Kota Bekasi dalam Angka, 2009).

c. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi kedua tertinggi terhadap PDRB Kota Bekasi, yang didominasi oleh Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sub sektor yang termasuk ke dalam kegiatan basis adalah Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sub Sektor Restoran. Sektor perdagangan sangat terkait dengan sektor industri sebagai produsen, oleh karena itu sangat tepat apabila tingginya sektor industri diimbangi dengan baiknya sektor perdagangan. Sehingga suatu daerah tidak hanya dijadikan sebagai tujuan pemasaran hasil produksi semata akan tetapi sekaligus sebagai produsen untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Karena selain banyak tenaga yang terserap di sektor industri, juga banyak tenaga kerja yang bergerak di sektor perdagangan ini, baik formal maupun informal.

d. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Dengan kontribusi rata-rata tertinggi ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Bekasi, sektor ini pun menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan di Kota Bekasi karena sektor ini berperan penting untuk kelancaran kegiatan industri maupun perdagangan serta kegiatan lain yang berkembang di suatu daerah. Sub sektor yang menjadi kegiatan basis pada sektor ini adalah Sub Sektor Pengangkutan. Sedangkan Sub Sektor Komunikasi cenderung mengalami penurunan selama periode analisis, yang berarti bahwa pada sub sektor ini pertumbuhannya masih lebih lambat dari daerah lain. Sebagai salah satu jenis infrastruktur penunjang kegiatan merupakan keharusan bagi suatu daerah untuk mengembangkan sektor ini agar diperoleh nilai ekonomis dari suatu produk yang berpengaruh langsung terhadap biaya produksi sehingga mampu meningkatkan daya saing, salah satunya dengan cara menekan biaya pengangkutan atau transportasi suatu produk sampai ke konsumen.

Berdasarkan perbandingan antara perekonomian Kota Bekasi terhadap kedua daerah acuan dengan menggunakan analisis LQ dapat disimpulkan bahwa :

- Sektor Industri Pengolahan termasuk ke dalam sektor basis, meskipun terjadi penurunan pendapatan pada Tahun 2008 sehingga terjadi sedikit penurunan

nilai LQ terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Yang berarti bahwa pada tahun tersebut, sektor ini mengalami perlambatan dibandingkan daerah lain di wilayah Jawa Barat.

- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tergolong sektor basis selama periode analisis, dengan demikian sektor ini juga berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan komparatif.
- Sektor yang termasuk dalam jasa berdasarkan definisi jasa pada Visi Kota Bekasi, meliputi : pelayanan publik dan pelayanan jasa kegiatan ekonomi, yaitu : Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa. Dari sekian sektor, hanya Sektor Jasa-jasa yang termasuk non basis pada kedua daerah acuan selama periode analisis. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi masih tergolong basis pada kedua daerah acuan meskipun pada tingkat Nasional terjadi sedikit penurunan nilai LQ pada dua tahun terakhir sehingga nilai $LQ < 1$. Untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tergolong basis pada tingkat Provinsi Jawa Barat, dan non basis pada tingkat Nasional.

4.4. Analisis *Shift Share*

Perkembangan sektor-sektor dalam struktur perekonomian Kota Bekasi perlu dibandingkan dengan sektor-sektor perekonomian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional melalui analisis *shift share*. Hal ini dilakukan untuk mengisolasi efek-efek yang berasal dari struktur industri Provinsi Jawa Barat maupun Nasional terhadap Kota Bekasi karena diasumsikan bahwa pertumbuhan Kota Bekasi dipengaruhi oleh perekonomian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

4.4.1. Analisis *Shift Share* Kota Bekasi terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Untuk mengetahui besaran pertumbuhan aktual Kota Bekasi, penyimpangan (*shift*), penambahan nilai tambah (*value added*) perekonomian Kota Bekasi, seandainya pertumbuhannya dianggap sama dengan laju pertumbuhan nilai tambah perekonomian Provinsi Jawa Barat maka dilakukan

perhitungan menggunakan analisis *shift share*. Hasil perhitungan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 4.12.

Dari hasil perhitungan pada tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa :

- Pertumbuhan aktual Kota Bekasi pada periode analisis sebesar 2.929.884,78;
- *Regional share* antara perekonomian Kota Bekasi dengan perekonomian Provinsi Jawa Barat selama periode analisis adalah sekitar 3.097.942,17. Hal ini berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan besarnya nilai tambah yang dicapai Kota Bekasi seandainya laju pertumbuhan Kota Bekasi sama dengan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Barat. Nilai *regional share* ini lebih besar bila dibandingkan dengan nilai pertumbuhan regional Kota Bekasi, yang berarti secara keseluruhan pertumbuhan Kota Bekasi lebih lambat dari pada pertumbuhan Provinsi Jawa Barat.
- *Proportional shift* (Sp) Kota Bekasi secara keseluruhan sebesar 362.104,03. Tanda positif dari nilai Sp ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki komposisi sektor-sektor industri dengan tingkat pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.
- *Differential shift* (Sd) Kota Bekasi sebesar - 530.161,42. Dalam Tarigan (2009) dinyatakan komponen Sd ini kadang-kadang dinamakan komponen lokasional atau regional. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada daerah acuan yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Tanda negatif (-) pada nilai Sd menunjukkan bahwa Kota Bekasi secara lokasional tidak menguntungkan. Kondisi fisik/lokasional meliputi kajian tentang kondisi dan bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis ekonominya, termasuk penilaian tentang sumber daya fisik (pertanian, pertambangan, dan sebagainya), ketersediaan lahan untuk kawasan industri, jaringan transportasi dan komunikasi, persediaan perumahan dan juga aset yang dapat digunakan untuk daerah tujuan wisata. Sd ini membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.
- Bila dilihat nilai $Sd < S$, menyatakan Kota Bekasi berspesialisasi pada sektor-sektor yang pertumbuhannya pada tingkat provinsi rendah.

Universitas Indonesia

Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Nilai *Shift Share* PDRB Kota Bekasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 - 2008 (dalam jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	G	R	S	Sp	Sd
1. PERTANIAN	7.859,21	34.487,61	-26.628,40	-27.134,99	506,59
1.1. Tanaman Bahan Makanan	4.449,88	11.325,23	-6.875,35	-8.018,20	1.142,85
1.2. Tanaman Perkebunan	-1.284,40	506,96	-1.791,36	-383,86	-1.407,50
1.3. Peternakan	4.527,22	22.398,57	-17.871,35	-19.166,56	1.295,22
1.4. Kehutanan	-	-	-	-	-
1.5. Perikanan	166,51	256,85	-90,34	-242,80	152,46
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.185.738,37	1.450.467,07	-264.728,70	600.001,56	-864.730,26
3.1. Industri Migas	-	-	-	-	-
3.2. Industri Tanpa Migas	1.185.738,37	1.450.467,07	-264.728,70	600.001,56	-864.730,26
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	131.097,17	106.358,03	24.739,14	-57.257,33	81.996,47
4.1. Listrik	74.045,84	59.956,60	14.089,24	-37.129,19	51.218,42
4.2. Gas	54.570,00	42.183,32	12.386,68	8.710,20	3.676,48
4.3. Air Bersih	2.481,33	4.218,11	-1.736,78	-1.779,14	42,36
5. BANGUNAN	141.004,49	108.226,37	32.778,12	75.767,08	-42.988,96
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	828.906,91	851.415,45	-22.508,54	-86.100,46	63.591,91
6.1. Perdagangan Besar & Eceran	726.301,19	726.550,59	-249,40	42.443,62	-42.693,02
6.2. Hotel	3.658,92	3.725,98	-67,06	2.617,93	-2.684,99
6.3. Restoran	98.946,80	121.138,89	-22.192,09	-137.739,32	115.547,24
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	315.955,99	238.248,91	77.707,08	-78.765,12	156.472,20
7.1. Pengangkutan	294.042,58	211.557,37	82.485,21	-169.168,17	251.653,38
7.1.1. Angkutan Rel	2.045,68	2.512,36	-466,68	-2.976,50	2.509,82
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	114.992,18	177.272,79	-62.280,61	-123.252,30	60.971,69
7.1.3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
7.1.4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
7.1.5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	177.004,72	31.772,22	145.232,50	-26.966,29	172.198,80
7.2. Komunikasi	21.913,41	26.691,54	-4.778,13	22.115,48	-26.893,60
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	178.961,63	107.248,60	71.713,03	-10.142,56	81.855,60
8.1. Bank	123.276,39	9.767,21	113.509,18	15.238,21	98.270,97
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	6.103,25	14.205,78	-8.102,53	33.466,44	-41.568,97
8.3. Sewa Bangunan	38.446,55	72.619,26	-34.172,71	-77.738,06	43.565,35
8.4. Jasa Perusahaan	11.135,44	10.656,34	479,10	-7.977,17	8.456,26
9. JASA-JASA	140.361,01	201.490,13	-61.129,12	-54.264,15	-6.864,97
9.1. Pemerintahan Umum	72.247,39	104.116,11	-31.868,72	-48.234,30	16.365,58
9.2. Swasta	68.113,62	97.374,02	-29.260,40	-1.304,77	-27.955,63
9.2.1. Sosial Kemasyarakatan	13.628,23	18.183,01	-4.554,78	863,62	-5.418,40
9.2.2. Hiburan & Rekreasi	1.224,42	1.971,04	-746,62	269,80	-1.016,42
9.2.3. Perorangan & Rumah Tangga	53.260,97	77.219,97	-23.959,00	-2.436,41	-21.522,59
PDRB	2.929.884,78	3.097.942,17	-168.057,39	362.104,03	-530.161,42

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan Tabel 4.12. terdapat 8 (delapan) sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yang menyatakan pertumbuhan dari masing-masing sektor dan juga keunggulan komparatifnya. Ketiga kelompok itu adalah sebagai berikut :

- a. Sektor yang memiliki daya saing atau keunggulan lokasional yang menguntungkan (Sd positif) dibandingkan perekonomian Provinsi Jawa Barat, akan tetapi pertumbuhannya dalam lingkup Provinsi Jawa Barat masih rendah (Sp negatif) adalah Sektor Pertanian; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;
- b. Sektor dengan daya saing masih rendah (Sd negatif), sedangkan pertumbuhannya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan baik (Sp positif) adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Bangunan;
- c. Sektor dengan daya saing masih rendah (Sd negatif) dan pertumbuhannya dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat juga rendah (Sp negatif) adalah Sektor Jasa-jasa. Hal ini berarti disamping jumlah yang masih sedikit, pertumbuhan sektor ini pun dinyatakan lambat. Yang termasuk ke dalam Sektor Jasa-jasa adalah Sub Sektor Pemerintahan Umum dan Sub Sektor Swasta yang terdiri dari : Sosial Kemasyarakatan, Hiburan dan Rekreasi serta Perorangan dan Rumah Tangga.

4.4.2. Analisis *Shift Share* Kota Bekasi terhadap Perekonomian Nasional

Untuk hasil perhitungan perbandingan perekonomian Kota Bekasi terhadap perekonomian nasional menggunakan analisis *shift share* ditunjukkan pada Tabel. 4.13. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat dinyatakan :

- Pertumbuhan aktual Kota Bekasi selama Tahun 2004 – 2008 adalah sebesar 2.929.884,78;
- *Regional share* antara perekonomian Kota Bekasi dengan perekonomian Nasional selama periode analisis adalah sekitar 3.194.060,16. Hal ini berarti bahwa besarnya nilai tambah Kota Bekasi seandainya laju pertumbuhan Kota Bekasi sama dengan laju pertumbuhan Nasional. Nilai *regional share* ini lebih besar bila dibandingkan dengan nilai pertumbuhan regional Kota Bekasi,

Universitas Indonesia

dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan regional Kota Bekasi lebih rendah dari pada pertumbuhan Nasional.

- *Proportional shift* (Sp) Kota Bekasi secara keseluruhan sebesar 210.269,25. Tanda positif dari nilai Sp ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki komposisi sektor-sektor industri dengan tingkat pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan dengan Nasional.
- *Differential shift* (Sd) Kota Bekasi sebesar - 474.444,62. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Tanda negatif (-) pada nilai Sd menunjukkan bahwa Kota Bekasi secara lokasional tidak menguntungkan.
- Bila dilihat nilai S dan Sd, pada Tabel 4.13. nilai $Sd < S$ yang menyatakan bahwa Kota Bekasi berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya pada tingkat Nasional rendah.

Berdasarkan Tabel 4.13. terdapat 8 (delapan) sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi yang terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok yang menyatakan pertumbuhan dari masing-masing sektor dan juga keunggulan komparatifnya. Keempat kelompok itu adalah sebagai berikut :

- a. Sektor dengan daya saing tinggi atau keunggulan lokasional menguntungkan (Sd positif) dan pertumbuhannya juga tinggi (Sp positif) sehingga pertumbuhan aktual sektor tersebut melebihi pertumbuhan Nasional adalah Sektor Bangunan dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;
- b. Sektor yang memiliki daya saing atau keunggulan lokasional yang menguntungkan (Sd positif) dibandingkan perekonomian Nasional, akan tetapi pertumbuhannya secara Nasional masih rendah (Sp negatif) sehingga pertumbuhan aktual Kota Bekasi (nilai G) yang berasal dari sektor tersebut berada di bawah pertumbuhan Nasional (nilai R) adalah Sektor Industri Pengolahan;
- c. Sektor dengan daya saing rendah (Sd negatif), sedangkan pertumbuhannya secara Nasional dapat dikatakan baik (Sp positif) adalah Sektor Listrik, Gas

Universitas Indonesia

dan Air Bersih, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Dengan kondisi tersebut, memungkinkan pertumbuhan aktual Kota Bekasi dari sektor tersebut melebihi pertumbuhan Nasional;

- d. Sektor dengan daya saing rendah (Sd negatif) dan pertumbuhannya secara Nasional rendah (Sp negatif) adalah Sektor Pertanian dan Sektor Jasa-jasa.

Dengan demikian bila dibandingkan perekonomian Kota Bekasi terhadap kedua daerah acuan dengan menggunakan analisis *shift share* dapat diambil kesimpulan bahwa Sektor Jasa-jasa memiliki laju pertumbuhan yang rendah dan juga keunggulan lokasionalnya tidak menguntungkan. Dengan kata lain, sektor ini tidak mempunyai keunggulan komparatif bagi Kota Bekasi. Sehingga selama periode analisis sektor ini belum mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik, baik dari segi pertumbuhan maupun keunggulan lokasionalnya atau daya saing yang masih rendah pada kedua daerah acuan. Untuk sektor yang termasuk dalam pelayanan jasa kegiatan ekonomi, seperti : Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, keunggulan lokasionalnya menguntungkan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat meskipun pertumbuhannya masih tergolong rendah. Sebaliknya untuk tingkat Nasional, sektor ini mengalami pertumbuhan yang tinggi akan tetapi daya saingnya masih tergolong rendah. Untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki pertumbuhan dan daya saing yang tinggi pada tingkat Nasional. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, sektor ini memiliki daya saing yang tinggi sementara pertumbuhannya masih tergolong rendah.

Berdasarkan analisis ini pula dapat dijelaskan bahwa Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang termasuk dalam salah satu sektor yang diprioritaskan dalam kebijakan perekonomian Kota Bekasi, pada tingkat Provinsi Jawa Barat pertumbuhannya rendah sedangkan daya saingnya termasuk baik. Pada tingkat Nasional, sektor ini kurang memiliki daya saing meskipun mengalami pertumbuhannya tinggi.

Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Nilai *Shift Share* PDRB Kota Bekasi terhadap PDB Indonesia Tahun 2004 - 2008
(dalam jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	G	R	S	Sp	Sd
1. PERTANIAN	7.859,21	35.557,64	-27.698,43	-16.951,36	-10.747,07
1.1. Tanaman Bahan Makanan	4.449,88	11.676,61	-7.226,73	-5.318,98	-1.907,75
1.2. Tanaman Perkebunan	-1.284,40	522,69	-1.807,09	-244,49	-1.562,60
1.3. Peternakan	4.527,22	23.093,51	-18.566,29	-13.250,18	-5.316,12
1.4. Kehutanan	-	-	-	-	-
1.5. Perikanan	166,51	264,82	-98,31	-34,30	-64,01
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.185.738,37	1.495.469,84	-309.731,47	-354.656,30	44.924,84
3.1. Industri Migas	-	-	-	-	-
3.2. Industri Tanpa Migas	1.185.738,37	1.495.469,84	-309.731,47	-354.656,30	44.924,84
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	131.097,17	109.657,94	21.439,23	33.742,08	-12.302,85
4.1. Listrik	74.045,84	61.816,84	12.229,00	3.286,76	8.942,24
4.2. Gas	54.570,00	43.492,12	11.077,88	99.460,44	-88.382,56
4.3. Air Bersih	2.481,33	4.348,98	-1.867,65	-1.927,54	59,89
5. BANGUNAN	141.004,49	111.584,24	29.420,25	27.370,87	2.049,37
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	828.906,91	877.831,81	-48.924,90	160.369,83	-209.294,73
6.1. Perdagangan Besar & Eceran	726.301,19	749.092,84	-22.791,65	179.558,23	-202.349,88
6.2. Hotel	3.658,92	3.841,58	-182,66	-831,74	649,08
6.3. Restoran	98.946,80	124.897,39	-25.950,59	-4.153,15	-21.797,44
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	315.955,99	245.640,91	70.315,08	364.517,13	-294.202,05
7.1. Pengangkutan	294.042,58	218.121,23	75.921,35	-69.141,77	145.063,11
7.1.1. Angkutan Rel	2.045,68	2.590,31	-544,63	-827,64	283,01
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	114.992,18	182.772,93	-67.780,75	-57.393,52	-10.387,23
7.1.3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
7.1.4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
7.1.5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	177.004,72	32.757,99	144.246,73	-16.621,73	160.868,46
7.2. Komunikasi	21.913,41	27.519,68	-5.606,27	130.874,31	-136.480,58
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	178.961,63	110.576,13	68.385,50	10.791,24	57.594,25
8.1. Bank	123.276,39	10.070,25	113.206,14	-1.993,26	115.199,40
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	6.103,25	14.646,53	-8.543,28	4.148,03	-12.691,31
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	38.446,55	74.872,38	-36.425,83	23.530,71	-59.956,54
8.5. Jasa Perusahaan	11.135,44	10.986,97	148,47	4.694,66	-4.546,20
9. JASA-JASA	140.361,01	207.741,65	-67.380,64	-14.914,24	-52.466,39
9.1. Pemerintahan Umum	72.247,39	107.346,46	-35.099,07	-45.099,36	10.000,29
9.2. Swasta	68.113,62	100.395,19	-32.281,57	24.179,52	-56.461,09
9.2.1. Sosial Kemasyarakatan	13.628,23	18.747,17	-5.118,94	3.306,31	-8.425,24
9.2.2. Hiburan & Rekreasi	1.224,42	2.032,19	-807,77	376,50	-1.184,27
9.2.3. Perorangan & Rumah Tangga	53.260,97	79.615,83	-26.354,86	21.733,64	-48.088,50
PDRB	2.929.884,78	3.194.060,16	-264.175,38	210.269,25	-474.444,62

Sumber : Diolah penulis

4.5. Analisis *Multiplier* dan Identifikasi Sektor Unggulan

Dengan menggabungkan hasil analisis LQ dan *shift share*, yang ditunjukkan pada Tabel 4.14., akan dilakukan identifikasi sektor-sektor yang memiliki kemampuan dan peluang yang cukup baik dalam upaya meningkatkan perekonomian Kota Bekasi. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki menjadi sebab perlunya penetapan skala prioritas dalam upaya lebih memacu suatu sektor dengan tidak mengabaikan sektor lainnya. Selain itu, dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang jadi prioritas maka kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dapat terpenuhi.

Menurut Nining I. Soesilo dalam Herlambang Hartono dalam penelitian berjudul “Analisa Perekonomian DKI Jakarta (Identifikasi Sektor-sektor Unggulan) (2003) dan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan ada 3 kriteria dalam penentuan prioritas dari hasil penggabungan kedua analisis (Analisis LQ dan *Shift Share*), dimana ketentuan dari setiap prioritas adalah sebagai berikut :

- **Prioritas Pertama** : sektor/sub sektor yang menjadi sektor basis pada tingkat Provinsi dan juga Nasional serta kontribusi yang tinggi; salah satu atau kedua nilai Sp dan Sd adalah positif, baik pada tingkat Provinsi maupun Nasional.
- **Prioritas Kedua** : sektor/sub sektor yang menjadi salah satu sektor basis pada salah satu wilayah, Provinsi atau Nasional serta kontribusi yang sedang; salah satu nilai Sp atau Sd adalah positif, pada tingkat Provinsi ataupun Nasional.
- **Prioritas Ketiga** : sektor/sub sektor yang menjadi sektor non basis pada salah satu atau kedua wilayah di atasnya, baik tingkat Provinsi maupun Nasional serta kontribusinya rendah; salah satu atau kedua dari nilai Sp dan Sd adalah negatif pada tingkat Provinsi maupun Nasional.

Dari Tabel 4.14. ini dinyatakan urutan prioritas pengembangannya adalah :

- a. Prioritas Pertama, sektor/sub sektor yang termasuk prioritas ini adalah :
 - Industri Pengolahan, yaitu Sub Sektor Industri Tanpa Migas;
 - Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan
 - Pengangkutan dan Komunikasi, yaitu Sub Sektor Pengangkutan.
- b. Prioritas Kedua, sektor/sub sektor yang termasuk dalam prioritas ini adalah :

Universitas Indonesia

- Listrik, Gas dan Air Bersih, yaitu Sub Sektor Listrik dan Sub Sektor Gas;
 - Bangunan;
 - Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu Sub Sektor Restoran;
 - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;
 - Jasa-jasa.
- c. Prioritas Ketiga, sektor/sub sektor yang termasuk prioritas ini adalah :
- Pertanian;
 - Pertambangan dan Penggalian;
 - Listrik, Gas dan Air Bersih, yaitu Sub Sektor Air Bersih;
 - Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu Sub Sektor Hotel;
 - Pengangkutan dan Komunikasi, yaitu Sub Sektor Komunikasi.

Secara keseluruhan, dari total PDRB Kota Bekasi Tahun 2008 dimana terdapat sektor/sub sektor basis dan non basis, serta dari perhitungan total *share* sektor/sub sektor basis adalah sebesar Rp 11.820.145.800.000,- atau 81,74 % dari total PDRB Kota Bekasi. Sedangkan total *share* sektor/sub sektor non basis sebesar Rp 2.639.658.950.000,- atau 18,26 % dari total PDRB Kota Bekasi. Dengan demikian, *multiplier* yang diperoleh menggunakan persamaan $1/\text{share}$ sektor/sub sektor adalah sebesar 1,188. Dari nilai *multiplier* ini dapat diartikan bahwa apabila sektor/sub sektor basis ini diprioritaskan dalam investasi pembangunan, maka setiap investasi senilai Rp 1.000,- akan memperoleh dampak penggandaan atau *multiplier effect* menjadi Rp 1.188,-.

Tabel 4.14. Hasil Analisis Perhitungan LQ dan Shift Share PDRB Kota Bekasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDB Indonesia Tahun 2004 - 2008 serta Multiplier PDRB Kota Bekasi Tahun 2008 atas Dasar Harga Konstan 2000

Sektor	Terhadap Provinsi Jawa Barat						Terhadap Indonesia						Prioritas	PDRB 2008	
	LQ	Shift Share					LQ	Shift Share						Basis	Non Basis
		G	R	S	Sp	Sd		G	R	S	Sp	Sd			
1.	NB	7.859,21	34.487,61	-26.628,40	-27.134,99	506,59	NB	7.859,21	35.557,64	-27.698,43	-16.951,36	-10.747,07	III		131.568,51
2.	NB	-	-	-	-	-	NB	-	-	-	-	-	III		0,00
3.	B	1.185.738,37	1.450.467,07	-264.728,70	600.001,56	-864.730,26	B	1.185.738,37	1.495.469,84	-309.731,47	-354.656,30	44.924,84	I		
3.2.	B	1.185.738,37	1.450.467,07	-264.728,70	600.001,56	-864.730,26	B	1.185.738,37	1.495.469,84	-309.731,47	-354.656,30	44.924,84	I	6.388.657,78	
4.	B	131.097,17	106.358,03	24.739,14	-57.257,33	81.996,47	B	131.097,17	109.657,94	21.439,23	33.742,08	-12.302,85	II		
4.1.	B	74.045,84	59.956,60	14.089,24	-37.129,19	51.218,42	B	74.045,84	61.816,84	-12.229,00	3.286,76	8.942,24	II	289.114,06	
4.2.	B	54.570,00	42.183,32	12.386,68	8.710,20	3.676,48	B	54.570,00	43.492,12	11.077,88	99.460,44	-88.382,56	II	205.884,30	
4.3.	NB	2.481,33	4.218,11	-1.736,78	-1.779,14	42,36	B	2.481,33	4.348,98	-1.867,65	-1.927,54	59,89	III	17.611,97	
5.	B	141.004,49	108.226,37	32.778,12	75.767,08	-42.988,96	NB	141.004,49	111.584,24	29.420,25	27.370,87	2.049,37	II		529.219,49
6.	B	828.906,91	851.415,45	-22.508,54	-86.100,46	63.591,91	B	828.906,91	877.831,81	-48.924,90	-160.369,83	-209.294,73	I		
6.1.	B	726.301,19	726.550,59	-249,40	42.443,62	-42.693,02	B	726.301,19	749.092,84	-22.791,65	179.558,23	-202.349,88	I	3.332.485,27	
6.2.	NB	3.658,92	3.725,98	-67,06	2.617,93	-2.684,99	NB	3.658,92	3.841,58	-182,66	-831,74	649,08	III		17.024,24
6.3.	B	98.946,80	121.138,89	-22.192,09	-137.739,32	115.547,24	B	98.946,80	124.897,39	-25.950,59	-4.153,15	-21.797,44	II	533.479,84	
7.	B	315.955,99	238.248,91	77.707,08	-78.765,12	156.472,20	B	315.955,99	245.640,91	70.315,08	364.517,13	-294.202,05	I		
7.1.	B	294.042,58	211.557,37	82.485,21	-169.168,17	251.653,38	B	294.042,58	218.121,23	75.921,35	-69.141,77	145.063,11	I	1.052.912,58	
7.2.	NB	21.913,41	26.691,54	-4.778,13	22.115,48	-26.893,60	NB	21.913,41	27.519,68	-5.606,27	130.874,31	-136.480,58	III		117.657,68
8.	B	178.961,63	107.248,60	71.713,03	-10.142,56	81.855,60	NB	178.961,63	110.576,13	68.385,50	10.791,24	57.594,25	II		563.669,30
9.	NB	140.361,01	201.490,13	-61.129,12	-54.264,15	-6.864,97	NB	140.361,01	207.741,65	-67.380,64	-14.914,24	-52.466,39	II		863.119,18
Total													11.820.145,80	2.222.258,40	
Prosentase dari Total													84,17%	15,83%	
Multiplier Kota Bekasi													$\frac{1}{0,8417} =$	1,188	

Sumber : PDRB Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, PDB Indonesia (diolah)

4.6. Hasil Analisis Perekonomian

Dari uraian mengenai analisis perekonomian di Kota Bekasi, rangkuman mengenai hasil analisis perekonomian Kota Bekasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Hasil Analisis Perekonomian Kota Bekasi

ANALISIS	HASIL ANALISIS	KETERANGAN
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	<p>a. Selama periode analisis (Tahun 2004 - 2008) pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah diperoleh Kota Bekasi adalah 6,44 % pada Tahun 2007 dan yang terendah adalah sebesar 5,38 % terjadi pada Tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional, yaitu 6,86 % (untuk provinsi) dan 6,87 % (nasional) yang terjadi pada Tahun 2007. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah yang diperoleh Kota Bekasi masih lebih baik dibandingkan provinsi, yaitu 5,08 %, akan tetapi masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,7 % yang terjadi pada Tahun 2004.</p> <p>b. Besarnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi adalah 5,9 %, sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 6,09 % dan Nasional sebesar 6,35 %.</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.</p> <p>Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi dan juga nasional.</p>
2. Kontribusi Sektoral	<p>a. Selama tahun analisis, rata-rata kontribusi sektoral terbesar dalam struktur PDRB Kota Bekasi disumbangkan oleh Sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 46,19 %. Diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran rata-rata sebesar 27,75 %, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi rata-rata sebesar 7,87 % dan Sektor Jasa-jasa rata-rata sebesar 6,4 %. Sektor lainnya hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata di bawah 4 % akan tetapi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali Sektor Pertanian yang terus menurun.</p> <p>b. Rata-rata kontribusi terkecil berasal dari Sektor Pertanian, sedangkan Sektor Pertambangan dan Pengalihan tidak memberikan kontribusi sama sekali.</p> <p>c. Rata-rata kontribusi agregat perekonomian Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat sebesar 4,844 %.</p> <p>d. Kontribusi sektoral terbesar dalam PDRB Kota Bekasi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat adalah Sub Sektor Industri Pengolahan, rata-rata sebesar 2,31 %, diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, rata-rata sebesar 1,35 %.</p> <p>e. Rata-rata kontribusi agregat perekonomian Kota Bekasi terhadap Nasional selama periode analisis adalah sebesar 0,73 %.</p> <p>f. Kontribusi sektoral terbesar dalam PDRB Kota Bekasi terhadap perekonomian Nasional adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dengan rata-rata besaran masing-masing sektor 0,337 % dan 0,203 %.</p>	<p>- Untuk Sektor Industri, seluruhnya disumbangkan oleh Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas karena Kota Bekasi tidak memiliki sumber daya alam.</p> <p>- Perkembangan kontribusi dari sektor-sektor yang ada menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah perkotaan dimana kegiatan-kegiatan industri dan jasa terus mengalami peningkatan, sedangkan kegiatan agraris semakin menurun.</p> <p>Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi rata-rata sebesar 1,02 %. Kecilnya kontribusi Sektor Pertanian ini salah satunya disebabkan terjadi pergeseran fungsi tanah akibat kegiatan perkotaan.</p>

(Sambungan Tabel 4.15.)

ANALISIS	HASIL ANALISIS	KETERANGAN
c. Analisis <i>Multiplier</i>	<p>- <i>Differential shift</i> (Sd) adalah - 474.444,62 yang menunjukkan bahwa Kota Bekasi berspesialisasi pada industri atau sektor yang pertumbuhan nasionalnya rendah.</p> <p>Dari perhitungan total <i>share</i> terhadap sektor/sub sektor basis diketahui sebesar Rp 11.820.145,8 juta atau 84,17 % dari total PDRB Kota Bekasi. Besaran multiplier yang diperoleh adalah 1,188 yang berarti setiap investasi senilai Rp 1.000,- akan memperoleh dampak penggandanya sebesar Rp 1.188,-.</p>	Apabila sektor/sub sektor basis diprioritaskan dalam investasi pembangunan

Berdasarkan seluruh analisis perekonomian yang telah dilakukan, sektor-sektor yang diidentifikasi sebagai potensi unggulan di Kota Bekasi dan strategis untuk dikembangkan adalah :

- Sektor Industri Pengolahan, karena kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Kota Bekasi meskipun laju pertumbuhan masih sedikit di bawah rata-rata LPE Kota Bekasi, sektor ini juga termasuk dalam sektor basis akan tetapi berdasarkan analisis *shift share* sektor ini belum menguntungkan dari segi keunggulan lokasional. Keunggulan lokasional dalam hal ini meliputi : ketersediaan sumber daya, ketersediaan lahan untuk kawasan industri, jaringan transportasi dan komunikasi. Untuk Kota Bekasi, keunggulan lokasional bila dibandingkan dengan perekonomian Nasional masih menguntungkan, sedangkan dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Jawa Barat, kurang menguntungkan. Dengan kata lain, daya saing Kota Bekasi masih terbilang rendah untuk lingkup Jawa Barat. Hal ini bisa disebabkan oleh sumber daya atau bahan baku yang lebih banyak impor dan juga belum memiliki kawasan industri, khususnya industri kecil dan menengah yang menampung industri-industri sejenis dalam satu wilayah sehingga dapat *share* faktor produksi untuk menekan biaya produksi.
- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Berdasarkan analisis, komposisi industri yang bergerak di sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, baik pada tingkat provinsi maupun nasional sehingga merupakan potensi yang baik untuk dikembangkan meskipun daya saing atau keunggulan lokasionalnya masih kurang menguntungkan. Sebagaimana Sektor Industri, kurangnya daya saing ini bisa

Universitas Indonesia

disebabkan produk atau bahan baku lebih banyak yang impor, mungkin juga kawasan perdagangan yang masih kurang menguntungkan dibanding Jakarta sebagai wilayah terdekat Kota Bekasi. Sehingga banyak masyarakat Kota Bekasi yang lebih memilih Jakarta sebagai tempat bertransaksi atau melakukan kegiatan perdagangan dari pada di Kota Bekasi karena akses yang mudah dan cukup terjangkau dari segi biaya.

- Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sub Sektor Pengangkutan. Sub sektor ini pun layak untuk dikembangkan. Melihat hasil analisis yaitu kontribusi yang besar, merupakan sektor basis dan juga memiliki daya saing yang cukup baik dibandingkan dengan provinsi maupun nasional akan tetapi sektor ini masih terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih lambat dari pada perekonomian daerah acuan (terlihat dari nilai Sp yang negatif). Mengingat jaringan transportasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing pada sektor perdagangan maupun industri, maka perkembangan sektor ini harus dipacu agar dapat berkembang lebih cepat sehingga dapat mendorong perkembangan Sektor Industri dan juga Perdagangan, baik dari segi ketersediaannya atau kemudahan akses dan juga biaya yang terjangkau.

Berdasarkan analisis *shift share*, Jasa Penunjang Angkutan yang termasuk dalam Sub Sektor Pengangkutan memiliki pertumbuhan aktual yang sangat tinggi dibandingkan pertumbuhan perekonomian daerah acuan, selain itu juga memiliki keunggulan lokasional yang menguntungkan. Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh BPS, Sub Sektor Jasa Penunjang Angkutan mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan. Untuk Kota Bekasi, yang termasuk ke dalam sub sektor ini terdiri dari jasa pelabuhan darat (terminal dan parkir), bongkar muat darat, keagenan penumpang, jalan tol dan lain-lain (Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2008, BPS Kota Bekasi). Dengan definisi tersebut maka hal-hal yang menyangkut kelancaran kegiatan pengangkutan perlu ditingkatkan, seperti terminal, perparkiran, dan juga lalu lintasnya, agar diperoleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor ini sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing sektor lain yang bergantung pada sektor ini.

Universitas Indonesia

BAB 5

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

Penetapan strategi dalam upaya pengembangan potensi unggulan di Kota Bekasi dilakukan melalui perencanaan strategis berdasarkan pada sektor-sektor unggulan yang telah direkomendasikan pada pembahasan sebelumnya. Penetapan strategi pengembangan potensi unggulan Kota Bekasi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional dimaksudkan untuk memberi arah kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan perekonomian Kota Bekasi yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi sumber daya dan optimalisasi terhadap potensi yang ada.

5.1. Penetapan *Stakeholder*

Stakeholder yang utama dalam perencanaan kebijakan pengembangan potensi unggulan di Kota Bekasi adalah Pemerintah Kota Bekasi, yang terdiri dari Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan, Bappeda, dan Dinas terkait. Alasan pemilihan Pemerintah Kota Bekasi sebagai *stakeholder* utama didasarkan pada tugas dan fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan stabilitator selain sebagai penyelenggara pemerintahan dan juga pelayanan publik di Kota Bekasi yang memberikan arah dan juga pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penentuan kebijakan pembangunan. Selain itu, pemilihan *stakeholder* utama ini yang hanya melibatkan instansi terkait adalah untuk mempersempit domain dokumen perencanaan kebijakan pengembangan potensi unggulan pemerintah sehingga akan lebih mudah dikelola dan difokuskan pada sisi perencanaan Kota Bekasi.

5.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT dalam pembuatan dokumen perencanaan kebijakan pengembangan potensi unggulan di Kota Bekasi ini dilakukan melalui kegiatan survey dengan menyebarkan kuesioner kepada *stakeholder* utama dalam penelitian ini. Berdasarkan jawaban kuesioner terhadap 13 responden di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang terkait dengan sektor terpilih dalam

analisa perekonomian, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, serta Bappeda Kota Bekasi. Setelah dilakukan pembobotan dan diambil rata-ratanya maka jawaban untuk faktor internal yang nilainya di bawah rata-rata dimasukkan ke dalam kelemahan (*weakness*), sedangkan yang nilainya di atas rata-rata dimasukkan ke dalam kekuatan (*strength*). Begitu pula dengan faktor eksternal, jawaban yang nilainya di atas rata-rata dimasukkan ke dalam peluang (*opportunity*), sedangkan yang nilainya di bawah rata-rata dimasukkan ke dalam ancaman (*threat*).

Nomor angka atau nomor urut yang tertera dalam kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) ditentukan berdasarkan besarnya bobot dari masing-masing *item*. Untuk *Strength* dan *Opportunity*, yang memiliki nilai bobot tertinggi diletakkan pada nomor urut 1 (satu), sebaliknya untuk *Weakness* dan *Threat*, yang memiliki nilai bobot paling rendah diletakkan pada nomor urut 1 (satu).

Dengan menggunakan analisis SWOT, dilakukan upaya untuk menentukan strategi yang paling tepat dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bekasi untuk mengembangkan potensi unggulan dan peningkatan kegiatan perekonomian kota.

5.3. Strategi Jangka Pendek

5.3.1. Identifikasi Lingkungan Internal (S – W)

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan;
2. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian;
3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
4. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah (Pola Pembangunan Daerah, Renstra ataupun RPJMD) Kota Bekasi;
5. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi;
6. Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi;
7. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi;

8. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi;
2. Tersedianya data dan informasi yang akurat;
3. Kemauan politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan;
4. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi.

5.3.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal (O – T)

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota;
2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru;
4. Kualitas masyarakat Kota Bekasi;
5. Kondisi perekonomian Kota Bekasi;
6. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
7. Pengaruh kondisi perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi;
8. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas, serta Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

b. Ancaman (*Threat*)

1. Banyaknya *urban unskill*;

2. Daya dukung sektor belakang (*backward supporting*), terutama sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku;
3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi;
4. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi.

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategi internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan upaya mencari keterkaitan antara faktor strategi internal dan eksternal. Upaya ini dilakukan dengan pembobotan dan pemberian prioritas urutan terhadap masing-masing pernyataan. Pembobotan dan pemberitan prioritas faktor-faktor internal dan eksternal ini menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Pembobotan dilakukan menggunakan kriteria penilaian mulai dari bilangan 1 (satu) yang berarti "buruk sekali" sampai dengan bilangan 10 (sepuluh) untuk "baik sekali". Dalam pengisian bobot pada tabel IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) dan tabel EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*) menggunakan perhitungan persentase.
- Penentuan prioritas merupakan kriteria yang diperoleh dari urgensi (*rating*) penanganan masing-masing pernyataan (*item*). Penilaian urgensi penanganan ini terdiri dari huruf "d" dengan nilai 1 (satu) yang berarti "tidak penting" hingga huruf "a" dengan nilai 4 (empat) yang berarti "penting sekali".

Hasil dari pembobotan dan *rating* dari faktor-faktor internal maupun eksternal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.1. dan Tabel 5.2.

5.3.3. Alternatif Strategi Jangka Pendek

Untuk mengetahui alternatif strategi kebijakan pengembangan potensi unggulan jangka pendek oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kota Bekasi disesuaikan dengan peluang dan ancaman yang ada. Pemilihan strategi ini menggunakan matrik SWOT, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.1. *Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) Jangka Pendek*

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot (%)	Urgensi	Total Nilai (2 x 3)
1	2	3	4
Kekuatan (Strength) :			
1. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan	9,05	3,769	34,109
2. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian	8,95	3,308	29,607
3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	8,95	3,308	29,607
4. Tersedianya dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi	8,73	3,769	32,903
5. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi	8,73	3,462	30,223
6. Fasilitas Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi	7,99	3,462	27,661
7. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi	7,88	3,538	27,879
8. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	7,88	3,538	27,879
9. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi	7,77	3,769	29,285
Sub Total Kekuatan (Strength)	75,93		269,153
Kelemahan (Weakness)			
1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi	1,28	1,231	1,576
2. Tersedianya data dan informasi yang akurat	7,56	3,692	27,912
3. Kemauan Politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan	7,56	3,769	28,494
4. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi	7,67	3,462	26,554
Sub Total Kelemahan (Weakness)	24,07		84,534
Total Faktor Strategi Internal (S + W)	100		353,687

Sumber : Hasil pendapat responden

Dari matrik SWOT, dimana penilaiannya berdasarkan pembobotan terhadap IFAS maupun EFAS, maka strategi dengan bobot yang paling tinggi adalah strategi yang dipilih sebagai strategi kebijakan. Berdasarkan hasil matrik SWOT tersebut didapatkan bahwa alternatif strategi untuk jangka pendek adalah Strategi *Strength + Opportunity* (SO) dengan bobot 490,823. Hal ini berarti strategi yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam jangka pendek adalah strategi yang menggunakan atau mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Tabel 5.2. *External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) Jangka Pendek*

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot (%)	Urgensi	Total Nilai (2 x 3)
1	2	3	4
Peluang (<i>Opportunity</i>) :			
1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota	10,65	3,154	33,590
2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik	9,25	3,385	31,311
3. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru	9,25	2,293	21,210
4. Kualitas (SDM) masyarakat Kota Bekasi	9,14	2,846	26,012
5. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	8,92	3,231	28,821
6. Kondisi perekonomian Kota Bekasi	8,71	2,923	25,459
7. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	8,71	3,231	28,142
8. Pengaruh perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi	8,60	3,154	27,124
Sub Total Peluang (<i>Opportunity</i>)	73,23		221,670
Ancaman (<i>Threat</i>)			
1. Banyaknya <i>urban unskill</i>	3,87	2,308	8,932
2. Daya dukung sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku	6,77	2,846	19,267
3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi	7,85	3,308	25,968
4. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi	8,28	3,077	25,478
Sub Total Ancaman (<i>Threat</i>)	26,77		79,645
Total Faktor Strategi Eksternal (O + T)	100		301,315

Sumber : Hasil pendapat responden

5.3.4. *Grand Strategy* untuk Jangka Pendek

Strategi terpilih berdasarkan matrik SWOT, yakni strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (strategi S-O) dimana strategi tersebut masih merupakan strategi yang bersifat umum sehingga perlu dijabarkan ke dalam strategi-strategi khusus yang akan diimplementasikan lebih lanjut dalam rencana tindakan (*action plan*). Untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan strategi terpilih, akan diuraikan dalam *Grand Strategy*, yaitu matrik yang berisi beberapa kemungkinan langkah ataupun strategi kecil yang akan dijalankan dalam rangka

mencapai strategi besar (S-O, W-O, S-T, dan W-T). *Grand Strategy* ini ditunjukkan pada Tabel 5.4. Adapun langkah-langkah atau upaya yang terdapat dalam masing-masing strategi (S-O, W-O, S-T, dan W-T) merupakan hasil kajian dari literatur yang mendukung, hasil analisis, dan telaah selama penulis melakukan penelitian.

Tabel 5.3. Matrik SWOT untuk Jangka Pendek

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan 2. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian 3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 4. Tersedianya dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi 5. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi 6. Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi 7. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi 8. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 9. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi 	<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi 2. Tersedianya data dan informasi yang akurat 3. Kemauan Politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan 4. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi
<p>Peluang (Opportunity) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota 2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik 3. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru 4. Kualitas masyarakat Kota Bekasi 5. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 6. Kondisi perekonomian Kota Bekasi 7. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 8. Pengaruh kondisi perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi 	<p>Strategi SO</p> <p>(490,823)</p>	<p>Strategi WO</p> <p>(306,204)</p>
<p>Ancaman (Threat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya <i>urban unskill</i> 2. Daya dukung sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku 3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi 4. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi 	<p>Strategi ST</p> <p>(348,798)</p>	<p>Strategi WT</p> <p>(164,179)</p>

Sumber : Hasil pendapat responden

Tabel 5.4. Matrik *Grand Strategy* untuk Jangka Pendek

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan 2. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian 3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 4. Tersedianya dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi 5. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi 6. Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi 7. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi 8. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 9. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi 2. Tersedianya data dan informasi yang akurat 3. Kemauan Politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan 4. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota 2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik 3. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru 4. Kualitas masyarakat Kota Bekasi 5. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 6. Kondisi perekonomian Kota Bekasi 7. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 8. Pengaruh kondisi perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi 2. Optimalisasi pengembangan sektor unggulan melalui peningkatan infrastruktur jaringan transportasi dan sarana pelayanan publik lainnya 3. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pengembangan sektor unggulan 4. Optimalisasi sistem birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi guna peningkatan perekonomian Kota 5. Peningkatan kualitas SDM Pemkot terutama SDM perencana dalam pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan politik dan komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk jaringan transportasi dan pelayanan publik lainnya dalam mendukung masuknya investasi 2. Kebijakan yang meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat/swasta yang dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan 3. Menyediakan data dan informasi yang akurat, terutama mengenai data potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 4. Memanfaatkan SDM Pemkot Bekasi dalam pengembangan sektor unggulan
<p>Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya <i>urban unskill</i> 2. Daya dukung sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku 3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi 4. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian dalam pengembangan potensi daerah 2. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif bagi peningkatan investasi 3. Meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan fasilitasi Pemkot terhadap sektor unggulan yang bernilai ekspor sebagai upaya promosi terhadap potensi daerah 	<p>Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem dalam upaya penyediaan data dan informasi yang akurat terutama mengenai potensi daerah 2. Memberi keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga swasta dalam berusaha dan berinvestasi

Sumber : Hasil pendapat responden

5.3.5. Strategi Terpilih untuk Jangka Pendek

Sesuai dengan pembobotan pada matrik SWOT, strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek adalah strategi S–O, yang terdiri dari :

1. Sosialisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi;
2. Optimalisasi pengembangan sektor unggulan melalui peningkatan infrastruktur jaringan transportasi dan sarana pelayanan publik lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pengembangan sektor unggulan;
4. Optimalisasi sistem birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi guna peningkatan perekonomian Kota Bekasi;
5. Peningkatan kualitas SDM Pemkot terutama SDM perencana dalam pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru.

Dari strategi besar tersebut dapat ditentukan strategi kecil yang akan diimplementasikan. Pemilihan strategi kecil ini dilakukan berdasarkan pertimbangan pada kekuatan dan peluang yang paling besar di antara strategi terpilih, yaitu meningkatkan sosialisasi potensi daerah untuk memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi.

5.4. Strategi Jangka Panjang

5.4.1. Identifikasi Lingkungan Internal (S – W)

Seperti pada strategi jangka pendek, identifikasi terhadap faktor-faktor internal ini berdasarkan bobot yang diperoleh seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.5. tentang IFAS. Faktor-faktor internal tersebut terbagi ke dalam faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan juga kelemahan (*weakness*) bagi Pemerintah Kota Bekasi. Kedua faktor tersebut terdiri dari :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi;
2. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan;
3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

4. Tersedianya data dan informasi yang akurat;
5. Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi;
6. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi;
7. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian;
8. Kemauan politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan;
9. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Tabel 5.5. *Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) Jangka Panjang*

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot (%)	Urgensi	Total Nilai (2 x 3)
1	2	3	4
Kekuatan (Strength) :			
1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi	8,76	3,769	33,016
2. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan	8,61	3,769	32,451
3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	8,31	3,308	27,489
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat	8,31	3,692	30,681
5. Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi	8,17	3,462	28,285
6. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi	8,09	3,769	30,491
7. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian	8,09	3,308	26,762
8. Kemauan politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan	8,09	3,769	30,491
9. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	7,87	3,358	31,729
Sub Total Kekuatan (Strength)	74,30		271,395
Kelemahan (Weakness)			
1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi	3,10	1,231	3,816
2. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi	7,30	3,462	25,273
3. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi	7,65	3,462	26,484
4. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi	7,65	3,538	27,066
Sub Total Kelemahan (Weakness)	25,70		55,573
Total Faktor Strategi Internal (S + W)	100		326,968

Sumber : Hasil pendapat responden

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi;
2. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi;

Universitas Indonesia

3. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi;
4. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi.

5.4.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal (O – T)

Demikian juga halnya dengan faktor-faktor eksternal, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 5.6. identifikasi faktor-faktor eksternal terdiri dari :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota;
2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik lainnya;
3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi;
4. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
5. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru;
6. Kondisi perekonomian Kota Bekasi.

b. Ancaman (*Threat*)

1. Daya dukung sektor belakang, terutama sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku;
2. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi;
3. Pengaruh perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi;
4. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas, serta Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
5. Kualitas (SDM) masyarakat Kota Bekasi.

5.4.3. Alternatif Strategi Jangka Panjang

Untuk mengetahui alternatif strategi kebijakan pengembangan potensi unggulan jangka panjang oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kota Bekasi disesuaikan dengan peluang dan ancaman yang ada, dilakukan perhitungan berdasarkan pada total nilai yang diperoleh dari

tabel IFAS dan EFAS. Pemilihan strategi ini menggunakan matrik SWOT, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.6. *External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) Jangka Panjang*

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot (%)	Urgensi	Total Nilai (2 x 3)
1	2	3	4
Peluang (<i>Opportunity</i>) :			
1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota	10,06	3,154	31,729
2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik	9,79	3,385	33,139
3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi	9,79	3,308	32,385
4. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	9,61	3,231	31,050
5. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru	9,61	2,923	28,090
6. Kondisi perekonomian Kota Bekasi	9,16	2,923	26,775
Sub Total Peluang (<i>Opportunity</i>)	58,02		183,168
Ancaman (<i>Threat</i>)			
1. Daya dukung sektor belakang, terutama sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku	6,47	2,846	18,414
2. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi	8,54	3,077	26,278
3. Pengaruh perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi	8,83	3,154	27,850
4. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	9,07	3,231	29,305
5. Kualitas (SDM) masyarakat Kota Bekasi	9,07	2,846	25,813
Sub Total Ancaman (<i>Threat</i>)	41,98		101,846
Total Faktor Strategi Eksternal (O + T)	100		285,015

Sumber : Hasil pendapat responden

Dari matrik SWOT, dimana penilaiannya berdasarkan pembobotan terhadap IFAS maupun EFAS, maka strategi dengan bobot yang paling tinggi adalah strategi yang dipilih sebagai strategi kebijakan. Berdasarkan hasil matrik SWOT tersebut didapatkan bahwa alternatif strategi untuk jangka panjang adalah Strategi *Strength + Opportunity* (SO) dengan bobot 449,262. Hal ini berarti strategi yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam jangka panjang adalah strategi yang menggunakan atau mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Tabel 5.7. Matriks SWOT untuk Jangka Panjang

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi 2. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan 3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 4. Tersedianya data dan informasi yang akurat 5. Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi 6. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi 7. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian 8. Kemauan politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan 9. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 	<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi 2. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi 3. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi 4. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi
<p>Peluang (Opportunity) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota 2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik 3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi 4. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 5. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru 6. Kondisi perekonomian Kota Bekasi 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <p style="text-align: center;">(449,262)</p>	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <p style="text-align: center;">(238,741)</p>
<p>Ancaman (Threat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung sektor belakang, terutama sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku 2. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi 3. Pengaruh perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi 4. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 5. Kualitas (SDM) masyarakat Kota Bekasi 	<p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <p style="text-align: center;">(367,940)</p>	<p style="text-align: center;">Strategi WT</p> <p style="text-align: center;">(157,419)</p>

Sumber : Hasil pendapat responden

5.4.4. Grand Strategy untuk Jangka Panjang

Strategi terpilih berdasarkan matrik SWOT, yakni strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (strategi S-O) dimana strategi tersebut masih merupakan strategi yang bersifat umum sehingga perlu dijabarkan ke dalam strategi-strategi khusus yang akan diimplementasikan lebih lanjut dalam rencana tindakan (*action plan*). Untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan strategi terpilih, akan diuraikan dalam *Grand Strategy*, yaitu matrik yang berisi beberapa

kemungkinan langkah ataupun strategi kecil yang akan dijalankan dalam rangka mencapai strategi besar (S-O, W-O, S-T, dan W-T). *Grand Strategy* ini ditunjukkan pada Tabel 5.8. Adapun langkah-langkah atau upaya yang terdapat dalam masing-masing strategi (S-O, W-O, S-T, dan W-T) merupakan hasil kajian dari literatur yang mendukung, hasil analisis, dan telaah selama penulis melakukan penelitian.

5.4.5. Strategi Terpilih untuk Jangka Panjang

Sesuai dengan pembobotan pada matrik SWOT, strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang adalah strategi S–O, yang terdiri dari :

1. Optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya;
2. Peningkatan sistem birokrasi (reformasi birokrasi) untuk memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi dalam menarik masuknya investasi;
3. Implementasi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
4. Penggunaan perencanaan yang mengarah pada pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru;
5. Pembangunan sistem yang mampu menyediakan data dan informasi, terutama mengenai potensi ekonomi guna meningkatkan perekonomian Kota Bekasi.

Dari strategi besar tersebut dapat ditentukan strategi kecil yang akan diimplementasikan. Pemilihan strategi kecil ini dilakukan berdasarkan pertimbangan pada kekuatan dan peluang yang paling besar di antara strategi terpilih, yaitu optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya.

Tabel 5.8. Matriks *Grand Strategy* untuk Jangka Panjang

<p style="text-align: center;">IFAS</p>	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi 2. Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan 3. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 4. Tersedianya data dan informasi yang akurat 5. Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi 6. Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi 7. Upaya sosialisasi mengenai potensi daerah di bidang perekonomian 8. Kemauan politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan 9. Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan investasi 2. Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi 3. Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi 4. Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi
<p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>Peluang (<i>Opportunity</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Kota Bekasi dalam memanfaatkan posisi wilayah yang strategis, dekat dengan ibukota 2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik 3. Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi 4. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 5. Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru 6. Kondisi perekonomian Kota Bekasi 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya 2. Peningkatan sistem birokrasi (reformasi birokrasi) untuk memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi dalam menarik masuknya investasi 3. Implementasi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 4. Penggunaan perencanaan yang mengarah pada pengembangan pusat pertumbuhan baru 5. Pembangunan sistem yang mampu menyediakan data dan informasi guna peningkatan ekonomi Kota Bekasi <p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal dan eksternal dalam memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi untuk meningkatkan pembangunan melalui pengembangan sektor unggulan 2. Peningkatan kualitas SDM Pemerintah Kota Bekasi dalam merencanakan pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru 3. Implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi dalam upaya penyediaan infrastruktur maupun jaringan transportasi dan pelayanan publik lainnya
<p>Ancaman (<i>Threat</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung sektor belakang, terutama sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku 2. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi 3. Pengaruh perekonomian nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi 4. Prospek sektor unggulan, terdiri dari : Sub Sektor Pengangkutan, Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 5. Kualitas (SDM) masyarakat Kota Bekasi 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pemkot Bekasi dalam meningkatkan sektor-sektor unggulan guna peningkatan perekonomian 2. Penyediaan data dan informasi yang akurat terutama mengenai potensi daerah guna mengantisipasi pengaruh globalisasi ekonomi dengan perencanaan yang mantap 3. Upaya sosialisasi potensi daerah dalam pengembangan sektor unggulan serta pemanfaatan daya dukung sektor belakang guna meningkatkan industri hilir 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal dan eksternal dalam meningkatkan prospek sektor-sektor unggulan 2. Peningkatan kualitas SDM Pemerintah Kota Bekasi, terutama SDM bidang perencanaan guna mengantisipasi kondisi perekonomian global 3. Dukungan dari Pemkot Bekasi terhadap penggunaan teknologi untuk meningkatkan pemanfaatan sektor belakang terutama sektor pertanian untuk menambah nilai sektor tersebut

Sumber : Hasil pendapat responden

BAB 6

PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup dari penelitian, dimana penulis akan berusaha menarik kesimpulan dan juga mengemukakan saran terhadap pokok atau topik yang diangkat dalam penelitian.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap data sekunder, sektor-sektor yang strategis dikembangkan adalah :
 - Sektor Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar meskipun daya saingnya masih tergolong kurang, khususnya dibandingkan Provinsi Jawa Barat, sehingga pertumbuhannya masih di bawah LPE Kota Bekasi.
 - Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, terutama Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi terbesar kedua dalam perekonomian Kota Bekasi layak untuk diprioritaskan dengan catatan peningkatan daya saing.
 - Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, terutama Sub Sektor Pengangkutan yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dan merupakan sektor dengan kontribusi ketiga tertinggi dalam perekonomian Kota Bekasi. Meskipun sektor ini pada tingkat provinsi maupun nasional pertumbuhannya lambat, sektor ini memiliki keunggulan lokasional yang menguntungkan pada kedua daerah acuan sehingga pertumbuhan aktual Kota Bekasi melebihi pertumbuhan kedua daerah acuan.
2. Untuk melihat kesesuaian mengenai kebijakan yang diambil dalam dokumen perencanaan dengan hasil analisis perekonomian menggunakan data sekunder, maka dapat dijelaskan bahwa :
 - a. Data yang dianalisis adalah data sekunder periode Tahun 2004 – 2008. Periode tersebut merupakan periode yang tercakup dalam Rencana

Strategis Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008, dimana Visi yang tercantum dalam Renstra tersebut adalah visi daerah yang merupakan kondisi yang diinginkan atau diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka panjang. Di sana disebutkan bahwa Visi Kota Bekasi adalah “Unggul dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan”. Ini berarti bahwa untuk jangka panjang, Kota Bekasi menginginkan menjadi kota yang mengedepankan jasa dan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian. Sedangkan misi Kota Bekasi pada jangka menengah cenderung pada peningkatan pelayanan di bidang jasa dan perdagangan. Keadaan ini sejalan dengan kondisi Kota Bekasi yang kurang menguntungkan dalam hal sumber daya alam. Di sisi lain sebagai wilayah perkotaan, Kota Bekasi berpotensi dalam mengembangkan jasa maupun perdagangan. Hal ini terlihat dari hasil analisis data sekunder bahwa sektor-sektor yang potensial adalah sektor sekunder maupun tersier meskipun selama periode analisis jasa dan perdagangan belum menampakkan hasil yang signifikan melebihi industri. Melihat kontribusi yang sangat besar dan pertumbuhan yang juga cukup baik dari Sektor Industri Pengolahan, tidak berarti Kota Bekasi mengabaikan sektor tersebut dalam pengembangannya. Ini dapat dibuktikan dengan kebijakan yang diambil selama periode Renstra, bahwa Kota Bekasi telah mengakomodasi pengembangan Sektor Industri. Meskipun industri yang tumbuh subur di Kota Bekasi ini cenderung industri kecil dan menengah, sedangkan jumlah industri besar yang termasuk PMA maupun PMDN cenderung tetap.

- b. Dengan demikian, arah kebijakan dalam dokumen perencanaan Kota Bekasi dapat dikatakan sudah baik akan tetapi ada ketidaksesuaian antara visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 dengan kondisi perekonomian Kota Bekasi saat ini. Kondisi perekonomian Kota Bekasi selama Tahun 2004 – 2008, bidang jasa sebagai prioritas dalam visi dan misi Kota Bekasi ini secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam perekonomian Kota Bekasi, terutama Sektor Jasa-jasa. Meskipun sektor ini belum menunjukkan sebagai sektor unggulan pada periode analisis (Tahun 2004 – 2008), akan tetapi pelaksanaan

pembangunan telah mengarah pada penyediaan sarana dan prasarana publik seperti : perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan infrastruktur lainnya. Untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan juga masih perlu peningkatan. Sub Sektor Pengangkutan sebagai salah satu pelayanan jasa kegiatan ekonomi di Kota Bekasi telah menjadi bagian dari potensi unggulan pada periode tersebut. Akan tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki dalam penyediaan jasa publik ini, salah satunya dalam penyediaan terminal dengan kapasitas dan kualitas yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kemacetan yang ada.

3. Dari analisis SWOT, terdapat beberapa strategi untuk jangka pendek maupun jangka panjang sebagai langkah yang dapat diambil terhadap pengembangan sektor unggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang memilih strategi SO, yaitu strategi yang memaksimalkan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*).

a. Jangka Pendek, terdiri dari :

- Sosialisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi. Strategi ini sekaligus sebagai strategi terpilih yang akan diimplementasikan dalam rangka pengembangan potensi unggulan yang ada;
- Optimalisasi pengembangan sektor unggulan melalui peningkatan infrastruktur jaringan transportasi dan sarana pelayanan publik lainnya;
- Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pengembangan sektor unggulan;
- Optimalisasi sistem birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi guna peningkatan perekonomian Kota Bekasi;
- Peningkatan kualitas SDM Pemkot terutama SDM perencana dalam pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru.

b. Jangka Panjang, terdiri dari :

- Optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya. Strategi ini sekaligus sebagai strategi terpilih yang

akan diimplementasikan dalam rangka pengembangan potensi unggulan dalam jangka panjang;

- Peningkatan sistem birokrasi (reformasi birokrasi) untuk memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi dalam menarik masuknya investasi;
- Implementasi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- Penggunaan perencanaan yang mengarah pada pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru;
- Pembangunan sistem yang mampu menyediakan data dan informasi, terutama mengenai potensi ekonomi guna meningkatkan perekonomian Kota Bekasi.

6.2. Saran Kebijakan

Kota Bekasi termasuk ke dalam struktur daerah perkotaan karena tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk dijadikan sektor unggulan dalam perekonomian Kota Bekasi. Dengan keadaan tersebut, seperti daerah perkotaan pada umumnya, Kota Bekasi mengandalkan sektor-sektor sekunder dan tersier dalam pengembangan perekonomiannya. Visi Kota Bekasi, yakni unggul dalam jasa dan perdagangan, sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini juga sesuai dengan hasil analisis data sekunder periode Tahun 2004 – 2008. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa arah kebijakan dalam dokumen perencanaan sudah baik dan akan lebih baik lagi apabila :

- a. Kota Bekasi meningkatkan daya saing Sektor Industri Pengolahan sebagai pendukung Sektor Perdagangan, yaitu :
 - Memiliki atau menyediakan sentra industri dan juga pusat perdagangan, terutama bagi produk industri kecil dan menengah. Dengan adanya suatu kawasan untuk produk tertentu, industri kecil dan menengah tersebut dapat meningkatkan daya saingnya dengan cara menurunkan biaya produksi melalui *share* bahan baku maupun faktor produksi lainnya.

- Penataan wilayah yang memunculkan jenis produk tertentu yang akan dijadikan ciri khas suatu wilayah, misalnya industri daur ulang plastik terpusat di Bantar Gebang, industri kerajinan kerang terpusat di Bekasi Utara atau industri tanaman hias terpusat di Mustika Jaya dan sebagainya. Dengan demikian terjadi pemetaan wilayah berdasarkan produk unggulan.
 - Penyediaan atau pembangunan gedung yang berfungsi sebagai etalase atau *showroom* produk-produk lokal dan akan lebih baik lagi apabila menyatu dengan kawasan kampung wisata. Sehingga selain menampilkan kesenian, juga mempromosikan produk lokal.
- b. Peningkatan daya saing Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu : Penataan pasar tradisional yang ada menjadi pasar tradisional dengan fasilitas seperti pasar modern yang bersih, rapi dan juga nyaman, terutama di wilayah perbatasan untuk menarik konsumen. Selain itu juga perlu penataan lingkungan serta lalu lintas di sekitar pasar agar tidak terkesan semrawut dan kumuh.
- c. Untuk Sub Sektor Pengangkutan, dimana keunggulan lokasionalnya yang menguntungkan walaupun pertumbuhannya masih tergolong lambat di tingkat provinsi maupun nasional, tetapi mampu menjadikan pertumbuhan aktual Kota Bekasi lebih tinggi dari kedua daerah acuan. Khusus sektor ini, agar Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti kajian tentang pembangunan terminal tipe A dengan tujuan :
- Menguraikan simpul kemacetan karena terminal induk yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung dan melayani kendaraan yang ada sehingga menimbulkan kemacetan.
 - Mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada wilayah sekitar lokasi terminal tipe A tersebut sehingga selain untuk meningkatkan pelayanan publik, juga sebagai alternatif pemasukan bagi Pemerintah Kota Bekasi.
 - Meningkatkan daya saing Sektor Industri dan Perdagangan karena kemacetan lalu lintas bisa menyebabkan pergerakan arus barang dan orang menjadi tersendat. Hal ini mempengaruhi biaya perjalanan, selanjutnya juga akan mempengaruhi biaya produksi.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membatasi *stakeholder* pada lingkup Pemerintah Kota Bekasi, dengan demikian opini pihak-pihak di luar Pemerintah Kota Bekasi seperti : masyarakat, dunia usaha, dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak terwakili dalam pembahasan. Oleh sebab itu diharapkan hasil penelitian ini diinterpretasikan secara hati-hati, mengingat keterbatasan waktu dan biaya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- BPS Pusat, (2004 – 2008). *Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta.
- BPS Provinsi Jawa Barat, (2004 – 2008). *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha*. Bandung.
- BPS Kota Bekasi, (2009). *Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2008*. Kota Bekasi.
- BPS Kota Bekasi, (2003-2009). *Kota Bekasi dalam Angka*.
- Dunn, William N., (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press.
- Jhingan, M.L. (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Terjemahan). Edisi 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, (2009). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Richardson, Harry W., (1975). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional* (Paul Sitohang, Penerjemah). Jakarta : Program Perencanaan Nasional dan Lembaga Penerbit FE UI.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Baduouse Media. Padang, Sumatera Barat.
- Soesilo, Nining. I. (2002). *Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis)*. Buku II. Jakarta : MPKP FE-UI.
- (2002). *Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik*. Buku I. Jakarta : MPKP FE-UI.
- Tarigan, Robinson, (2009). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C.(2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Haris Munandar & Puji A.L., Penerjemah). Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Laporan :

Bappeda Kota Bekasi, (2003). *Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008*. Kota Bekasi.

Bappeda Kota Bekasi, (2003). *Rencana Tahunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2004*. Kota Bekasi.

Bappeda Kota Bekasi, (2004). *Rencana Tahunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2005*. Kota Bekasi.

Bappeda Kota Bekasi, (2005). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2006*. Kota Bekasi.

Bappeda Kota Bekasi, (2006). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2007*. Kota Bekasi.

Bappeda Kota Bekasi, (2007). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2008*. Kota Bekasi.

Penelitian :

Amalia, Pritta, (2007). *Analisis Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor-Sektor Perekonomian di Kota Bekasi Pada Masa Otonomi Daerah*. [Skripsi]. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

Fakhrunraji, Muhammad, (2005). *Analisis Sektor Unggulan Kota Bima dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. [Tesis]. MPKP FE UI.

Fauzan, Roni, (2000). *Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan di Kabupaten Sanggau*. [Tesis]. MPKP FE UI.

Hartono, Herlambang, (2003). *Analisa Perekonomian DKI Jakarta (Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan)*. [Tesis]. MPKP FE UI.

Malik, Akmal. (2002). *Analisis Perekonomian dan Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung*. [Tesis]. MPKP FE UI.

- Pangidaran, Primarani, (2004). *Analisis Perekonomian dan Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan Kota Jambi*. [Tesis]. MPKP FE UI.
- Ropingi. *Aplikasi Analisis Shift Share Esteban-Marquillas pada Sektor Pertanian di Kabupaten Boyolali*. Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Sriwahyuni, R.R. Emy, (2002). *Analisis Perekonomian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagai Dasar Kebijakan Penentuan Sektor Strategis s/d Tahun 2006 (Dalam Lingkup Jabotabek, Provinsi Jawa Barat dan Nasional)*. [Tesis]. MPKP FE UI.
- Suhendri, (2003). *Analisis Potensi Unggulan dan Kebijakan Perekonomian Kota Jambi*. [Tesis]. MPKP FE UI.
- Syaifudin, Achmad, (2002). *Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan di Kota Depok*. [Tesis]. MPKP FE UI.



QUESTIONER

Nama Lengkap :
Jabatan :

Ketentuan pengisian :

Lingkarilah jawaban yang dipilih :

- Untuk Penilaian :

Angka 1 = buruk sekali;
Angka 10 = baik sekali;
Angka 2 s/d 9 berada diantaranya.

- Untuk Urgensi Penanganan :

Huruf : a menyatakan penting sekali;
b = penting;
c = kurang penting;
d = tidak penting.

Faktor Internal Pemkot Bekasi	Penilaian Responden										Urgensi Penanganan			
	Kondisi Saat Ini					Harapan di Masa Datang					a	b	c	d
1 Tersedianya dokumen perencanaan daerah (Pola Dasar Pembangunan/Rencana Strategis/RPJMD) Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
2 Koordinasi internal/eksternal Pemerintah Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
3 Komitmen dari segenap jajaran aparat Pemerintah Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
4 Upaya sosialisasi mengenai potens daerah di bidang perekonomian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
5 Sistem birokrasi/manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
6 Kuantitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
7 Kualitas SDM pada Pemerintah Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
8 Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
9 Kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				

Faktor Internal Pemkot Bekasi		Penilaian Responden										Urgensi Penanganan			
		Kondisi Saat Ini					Harapan di Masa Datang								
10	Tersedianya data dan informasi yang akurat	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
11	Kemauan politik dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan berkelanjutan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
12	Fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan perdagangan, industri pengolahan dan transportasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
13	Lainnya (sebutkan jika ada)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
Faktor Eksternal Pemkot Bekasi		Penilaian Responden										Urgensi Penanganan			
		Kondisi Saat Ini					Harapan di Masa Datang								
1	Kemampuan dalam memanfaatkan posisi wilayah Kota Bekasi yang strategis, dekat dengan Ibukota Jakarta	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
2	Dukungan dari sektor belakang (<i>backward supporting</i>), terutama sektor pertanian dalam menyediakan bahan baku	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
3	Ketersediaan dan kondisi infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan umum	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
4	Kondisi sosial politik dalam upaya mendukung iklim investasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
5	Kondisi perekonomian Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
6	Pengaruh kondisi perekonomian Nasional terhadap perekonomian Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
7	Kualitas masyarakat (SDM) Kota Bekasi	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				
8	Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	a	b	c	d
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10				

Faktor Eksternal Pemkot Bekasi	Penilaian Responden										Urgensi Penanganan			
	Kondisi Saat Ini					Harapan di Masa Datang					a	b	c	d
9	Dampak atau pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Kota Bekasi										a	b	c	d
10	Prospek sektor unggulan Kota Bekasi, yang terdiri dari : - Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, terutama Sub Sektor Pengangkutan; - Sub Sektor Industri Pengolahan Non Migas; - Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.										a	b	c	d
11	Pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru										a	b	c	d
12	Lainnya (sebutkan jika ada)										a	b	c	d

Jawaban Responden untuk Jangka Pendek

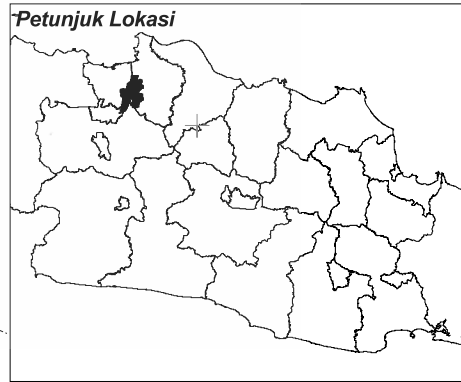
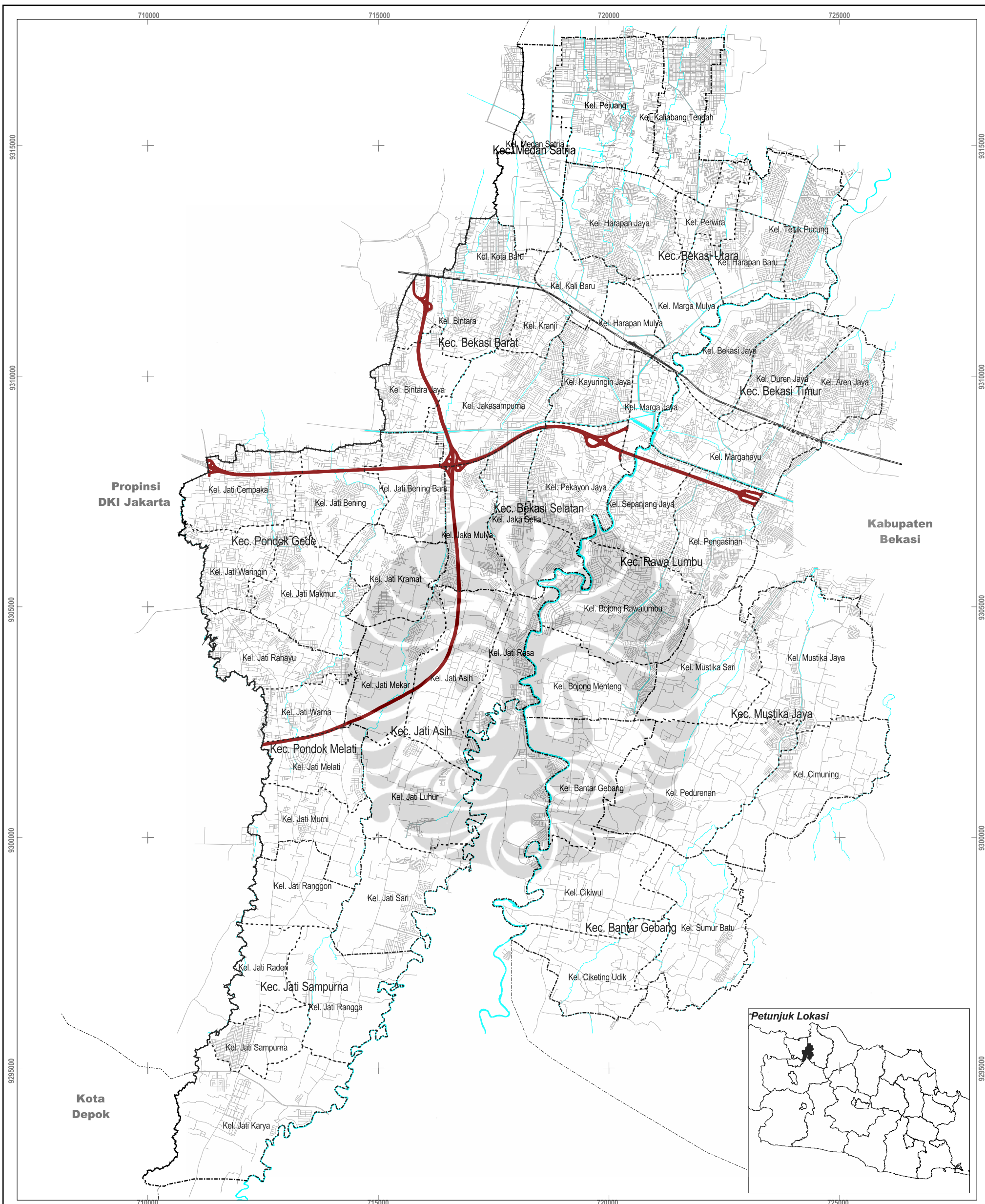
NO PERTANYAAN FAKTOR INTERNAL	BOBOT PENILAIAN RESPONDEN														URGENSI PENANGANAN																
	RESPONDEN													Jumlah	Bobot	Rata-rata	Ket	RESPONDEN													Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	5	6	8	8	8	9	8	6	6	6	7	4	82	0,0873	6,308	S	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3,769
2	4	5	4	7	7	6	9	7	7	6	5	4	3	74	0,0788	5,692	S	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3,538
3	1	5	6	6	7	6	9	7	7	7	5	5	2	73	0,0777	5,615	S	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3,769
4	3	8	7	7	8	4	9	8	6	7	6	6	5	84	0,0895	6,462	S	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3,308
5	5	3	7	4	7	8	8	7	6	6	5	5	3	74	0,0788	5,692	S	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3,538
6.a	4	4	4	6	7	6	8	7	6	8	5	4	3	72	0,0767	5,538	W	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3,462
6.b	4	7	6	8	8	6	8	7	6	8	5	6	3	82	0,0873	6,308	S	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3,462
7	5	3	7	3	7	10	8	8	5	9	6	6	7	84	0,0895	6,462	S	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,308
8	4	7	6	1	7	8	9	8	7	9	5	7	7	85	0,0905	6,538	S	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3,769	
9	1	3	4	4	7	7	8	7	5	6	6	6	7	71	0,0756	5,462	W	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3,692
10	3	4	5	2	7	7	8	7	6	9	6	5	2	71	0,0756	5,462	W	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3,769
11	1	5	4	8	7	7	8	7	5	8	6	6	3	75	0,0799	5,769	S	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3,462
12	4	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0,0128	0,923	W	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,231
														939	1,0000	5,556															3,391

NO PERTANYAAN FAKTOR EKSTERNAL	BOBOT PENILAIAN RESPONDEN														URGENSI PENANGANAN																
	RESPONDEN													Jumlah	Bobot	Rata-rata	Ket	RESPONDEN													Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	9	9	8	9	7	9	8	8	7	9	8	6	2	99	0,1065	7,615	O	4	4	1	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3,154
2	5	5	0	5	7	4	7	8	5	6	4	4	3	63	0,0677	4,846	T	3	4	0	3	3	2	3	4	3	4	2	3	3	2,846
3	6	8	6	7	7	8	9	8	6	7	5	7	2	86	0,0925	6,615	O	4	4	1	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3,385
4	6	2	6	2	6	6	8	8	6	6	6	7	4	73	0,0785	5,615	T	4	4	1	4	4	4	3	3	2	3	4	3	4	3,308
5	6	5	0	8	7	7	7	7	5	8	8	7	6	81	0,0871	6,231	O	3	4	0	2	3	4	3	3	2	3	4	3	4	2,923
6	6	8	0	6	7	8	8	7	5	8	6	7	4	80	0,0860	6,154	O	3	4	0	3	4	4	3	4	2	3	3	4	4	3,154
7	6	7	0	8	7	8	8	7	5	8	7	7	7	85	0,0914	6,538	O	3	4	0	2	3	4	4	3	2	3	3	3	3	2,846
8	5	5	7	5	7	7	9	7	5	7	5	7	5	81	0,0871	6,231	O	3	4	1	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3,231
9	6	5	0	8	7	7	9	7	5	7	6	7	3	77	0,0828	5,923	T	3	4	0	3	3	4	4	3	2	2	4	4	4	3,077
10.a	4	4	7	8	7	6	8	8	6	8	5	8	4	83	0,0892	6,385	O	4	4	0	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3,231
11	5	5	7	7	7	8	9	8	5	8	6	7	4	86	0,0925	6,615	O	4	4	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,923
12	0	0	6	3	4	5	5	0	5	0	0	5	3	36	0,0387	2,769	T	0	0	4	4	4	4	4	0	4	0	0	3	3	2,308
														930	1,0000	5,962															3,032

Jawaban Responden untuk Jangka Panjang

NO PERTANYAAN FAKTOR INTERNAL	BOBOT PENILAIAN RESPONDEN														URGENSI PENANGANAN																	
	RESPONDEN													Jumlah	Bobot	Rata-rata	Ket	RESPONDEN													Rata-rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	9	10	9	10	10	10	10	9	9	8	8	9	8	119	0,0876	9,154	S	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3,769	
2	8	8	9	8	8	8	9	8	8	8	8	7	7	104	0,0765	8,000	W	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3,538	
3	8	9	9	9	8	8	10	9	8	8	8	8	8	110	0,0809	8,462	S	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3,769	
4	8	9	9	9	9	7	9	9	7	9	8	8	9	110	0,0809	8,462	S	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3,308	
5	8	8	9	9	9	10	8	9	7	8	8	8	6	107	0,0787	8,231	S	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3,538	
6.a	7	7	7	8	7	8	9	9	8	9	8	6	6	99	0,0728	7,615	W	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3,462	
6.b	8	8	8	8	9	8	9	9	8	9	8	6	6	104	0,0765	8,000	W	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3,462	
7	8	9	9	9	8	10	8	9	9	9	8	8	9	113	0,0831	8,692	S	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,308	
8	9	9	9	9	10	9	10	9	9	9	8	9	8	117	0,0861	9,000	S	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3,769	
9	9	10	8	10	10	9	10	8	8	8	7	8	8	113	0,0831	8,692	S	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3,692	
10	9	9	8	9	8	10	9	8	8	9	8	8	7	110	0,0809	8,462	S	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3,769	
11	9	9	8	9	8	10	9	8	8	9	8	8	8	111	0,0817	8,538	S	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3,462	
12	8	8	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	8	42	0,0309	3,231	W	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,231	
														1359	1,0000	8,041																3,391

NO PERTANYAAN FAKTOR EKSTERNAL	BOBOT PENILAIAN RESPONDEN														URGENSI PENANGANAN																	
	RESPONDEN													Jumlah	Bobot	Rata-rata	Ket	RESPONDEN													Rata-rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	9	10	8	10	9	10	8	9	8	10	8	8	5	112	0,1006	8,615	O	4	4	1	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3,154	
2	5	7	0	7	9	0	7	9	6	8	8	0	6	72	0,0647	5,538	T	3	4	0	3	3	2	3	4	3	4	2	3	3	2,846	
3	8	10	9	9	9	10	9	9	7	9	8	8	4	109	0,0979	8,385	O	4	4	1	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3,385	
4	8	10	9	9	8	10	8	9	7	8	8	8	7	109	0,0979	8,385	O	4	4	1	4	4	4	3	3	2	3	4	3	4	3,308	
5	8	10	0	9	9	10	7	9	6	9	8	8	9	102	0,0916	7,846	O	3	4	0	2	3	4	3	3	2	3	4	3	4	2,923	
6	8	10	0	8	8	9	8	9	6	9	8	9	6	98	0,0881	7,538	T	3	4	0	3	4	4	3	4	2	3	3	4	4	3,154	
7	8	10	0	9	8	10	8	8	6	9	8	8	9	101	0,0907	7,769	T	3	4	0	2	3	4	4	3	2	3	3	3	3	2,846	
8	8	10	9	8	8	8	9	9	6	9	8	7	8	107	0,0961	8,231	O	3	4	1	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3,231	
9	8	10	0	9	9	5	9	9	6	9	8	8	5	95	0,0854	7,308	T	3	4	0	3	3	4	4	3	2	2	4	4	4	3,077	
10.a	8	10	0	9	9	8	8	9	7	9	8	8	8	101	0,0907	7,769	T	4	4	0	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3,231	
11	8	10	8	9	8	10	9	9	6	9	8	8	5	107	0,0961	8,231	O	4	4	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,923	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														1113	1,0000	7,783																3,098



KETERANGAN

- Batas Propinsi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- ~~~~~ Sungai
- Jalan
- Jalan Tol
- Rel Kereta Api

Lampiran 1

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NO. TAHUN 2008
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BEKASI TAHUN 2008 - 2028

WALIKOTA BEKASI

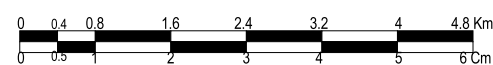
H. MOCHTAR MOHAMAD

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BEKASI TAHUN 2008 - 2028**

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA BEKASI



Skala 1 : 80.000



PEMERINTAH KOTA BEKASI